

DASAR-DASAR ILMU PEMERINTAHAN



Penulis :

- Neng Suryanti Nengsih
- Bambang Irawan
- Ahmad Mustanir
- Yulius Luturmas
- Nur Rohim Yunus
- Krsthiana Anthonia Laratmase
- Iwan Henri Kusnadi



DASAR-DASAR ILMU PEMERINTAHAN

**Neng Suryanti Nengsih
Bambang Irawan
Ahmad Mustanir
Yulius Luturmas
Nur Rohim Yunus
Kristhiana Anthonia Laratmase
Iwan Henri Kusnadi**



PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI

DASAR-DASAR ILMU PEMERINTAHAN

Penulis :

Neng Suryanti Nengsih
Bambang Irawan
Ahmad Mustanir
Yulius Luturmas
Nur Rohim Yunus
Krishthiana Anthonia Laratmase
Iwan Henri Kusnadi

ISBN : 978-623-198-097-7

Editor : Ari Yanto, M.Pd

Penyunting : Tri Putri Wahyuni, S.Pd

Desain Sampul dan Tata Letak : Atyka Trianisa, S.Pd

Penerbit : PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI
Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Redaksi :

Jl. Pasir Sebelah No. 30 RT 002 RW 001
Kelurahan Pasie Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah
Padang Sumatera Barat

Website : www.globaleksekutifteknologi.co.id

Email : globaleksekutifteknologi@gmail.com

Cetakan pertama, Februari 2023

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan
dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT dalam segala kesempatan. Sholawat beriring salam dan doa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah atas Rahmat dan Karunia-Nya penulis telah menyelesaikan Buku Dasar-Dasar Ilmu Pemerintahan ini.

Buku ini membahas Pemerintahan sebagai kebutuhan manusia, Munculnya ilmu pemerintahan sebagai suatu ilmu dan seni, Pengertian, obyek dan ruang lingkup ilmu pemerintahan, Problematika dan penelitian pemerintahan, Metode dan pendekatan analisa dalam ilmu pemerintahan, Perkembangan dan pertumbuhan ilmu pemerintahan, Tantangan dan Masa Depan Ilmu Pemerintahan.

Proses penulisan buku ini berhasil diselesaikan atas kerjasama tim penulis. Demi kualitas yang lebih baik dan kepuasan para pembaca, saran dan masukan yang membangun dari pembaca sangat kami harapkan.

Penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam penyelesaian buku ini. Terutama pihak yang telah membantu terbitnya buku ini dan telah mempercayakan mendorong, dan menginisiasi terbitnya buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

Padang, Februari 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB 1 PEMERINTAHAN SEBAGAI KEBUTUHAN	
MANUSIA	1
1.1Pendahuluan	1
1.2 Makna Manusia	2
1.3 Makna Pemerintah dan Pemerintahan	4
1.4 Peran Pemerintahan menjadi Kebutuhan	
Manusia yang Paling Utama	12
DAFTAR PUSTAKA	18
BAB 2 ILMU PEMERINTAHAN SEBAGAI ILMU	
DAN SENI	19
2.1 Konsep Pemerintah	19
2.2 Ilmu Pemerintahan Sebagai Ilmu.....	20
2.2.1 Pendekatan Ontologi	20
2.2.2 Pendekatan Epistimologi	22
2.2.3 Pendekatan Aksiologi.....	24
2.3 Ilmu Pemerintahan Sebagai Seni.....	25
DAFTAR PUSTAKA	27
BAB 3 PENGERTIAN, OBYEK & RUANG LINGKUP	
ILMU PEMERINTAHAN.....	29
3.1 Pendahuluan	29
3.2 Pengertian Ilmu Pemerintahan.....	34
3.3 Objek Ilmu Pemerintahan.....	38
3.3.1 Objek Pemerintahan Secara Ontologis	42
3.3.2 Objek Pemerintahan Secara Epistemologis	45
3.3.3 Objek Pemerintahan Secara Aksiologis.....	49
3.4 Ruang Lingkup Ilmu Pemerintahan	51
DAFTAR PUSTAKA	55

BAB 4 PROBLEMATIKA DAN PENELITIAN	
PEMERINTAHAN.....	58
4.1 Pendahuluan.....	58
4.2 Problematika Pemerintahan	59
DAFTAR PUSTAKA.....	67
BAB 5 METODE DAN PENDEKATAN ANALISA	
DALAM ILMU PEMERINTAHAN	70
5.1 Pendahuluan.....	70
5.2 Urgensi Metodologi Dalam Ilmu Pemerintahan	71
5.3 Metodologi Analisis Ilmu Pemerintahan	73
5.4 Pendekatan-Pendekatan Dalam Analisa	
Ilmu Pemerintahan	74
5.4.1 Pendekatan Eklektik Dalam Analisa	
Ilmu Pemerintahan.....	74
5.4.2 Pendekatan Integratif Dalam Analisa	
Ilmu Pemerintahan.....	75
5.4.3 Pendekatan Terapan Dalam Analisa	
Ilmu Pemerintahan.....	76
5.5 Penutup	78
DAFTAR PUSTAKA.....	80
BAB 6 PERKEMBANGAN DAN PERTUMBUHAN	
ILMU PEMERINTAHAN	82
6.1 Pendahuluan.....	82
6.2 Perkembangan Ilmu Pemerintahan.....	83
6.3 Pertumbuhan Ilmu Pemerintahan	89
DAFTAR PUSTAKA.....	91
BAB 7 TANTANGAN DAN MASA DEPAN	
ILMU PEMERINTAHAN	92
7.1 Ilmu Pengetahuan dan Tantangannya.....	92
7.2 Dinamika Ilmu Pengetahuan dan Tantangannya ...	98
7.3 Prospek Ilmu Pemerintahan di Indonesia	103
7.4 Pengembangan Ilmu Pemerintahan	108
DAFTAR PUSTAKA.....	113
BIODATA PENULIS	

BAB 1

PEMERINTAHAN SEBAGAI KEBUTUHAN MANUSIA

Oleh Neng Suryanti Nengsih

1.1 Pendahuluan

Mengawali pemerintahan sebagai kebutuhan manusia tidaklah lepas daripada kodrat manusia yang memiliki fitrah sebagai makhluk ciptaan Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi ini, manusia pada hakekatnya memiliki kesucian dan kemurnian jiwa sebagai makhluk ciptaan Allah. Oleh karena manusia itu memiliki fitrah maka untuk itu ia harus dihormati serta di akui keberadaannya. Pengakuan tersebut hanya dapat di wujudkan dalam bentuk otorisasi yang dimiliki oleh negara melalui pemerintah.

Ketidakberdayaan manusia telah menunjukkan bukti bahwa ketergantungan manusia dengan orang lain. Manusia dalam menjalankan kehidupannya memerlukan arahan, bimbingan, bantuan, dan motivasi dari orang lain. Dengan demikian ketergantungan manusia itu bukan hanya ketika bayi saja, tetapi sampai akhir hayat hidup manusia tersebut tetap akan membutuhkan orang lain. Ketika manusia itu sudah dewasa pun tetap akan selalu membutuhkan pertolongan orang lain. Sehingga manusia harus memiliki kesadaran bahwa dirinya memang lemah dan sangat lemah.

Manusia adalah makhluk hidup pilihan yang dimuliakan oleh Allah SWT dari makhluk hidup ciptaan-Nya yang lainnya, dengan segala keistimewaan yang ada pada manusia, seperti akal yang mampu membedakan antara kebaikan dan keburukan, kemudian memilihnya. Allah SWT menciptakan

manusia dengan sebaik-baiknya cipta (*ahsanutaqwim*), serta menundukkan alam semesta baginya agar dia dapat memakmurkan serta memelihara dan kemudian melestarikan keberlangsungan hidup di alam semesta ini. Dengan hati, manusia dapat memutuskan sesuatu hal yaitu sesuai dengan petunjuk Robbnya, dengan raganya, dan manusia diharapkan aktif untuk menciptakan karya besar serta tindakan yang benar, hingga manusia tersebut tetap pada posisi kemuliaan yang sudah diberikan oleh Allah SWT kepadanya seperti *ahsanu taqwim*, *ulul albab*, *rabbaniun* dan sebagainya. Dengan demikian semua sifat kemuliaan dan semua sifat insaniah yang ada dan yang telah diberikan serta diikuti dengan kekurangan dan keterbatasan, Allah SWT menugaskan misi khusus kepada umat manusia untuk menguji dan mengetahui mana yang jujur, amanah, beriman dan berdusta.

1.2 Makna Manusia

Manusia adalah makhluk yang diciptakan dengan kesempurnaan dalam cara berpikir serta caranya untuk mengendalikan diri. Menurut Adz-Dzaky (2004:13), manusia merupakan salah satu makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna, baik dari aspek jasmaniyah dan juga aspek rohaniyahnya. Manusia merupakan satu-satunya makhluk paling sempurna yang telah diciptakan oleh Allah SWT.

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), manusia merupakan makhluk hidup yang berakal budi, memiliki pikiran, serta mampu menguasai makhluk lain. Manusia akan menjalani proses kehidupan yang memiliki 5 proses yakni diantaranya proses pada masa bayi, masa anak, masa remaja, masa dewasa hingga masa lanjut usia (*lansia*). Yang dimaksud dengan *lansia* adalah manusia yang berusia 60 tahun ke atas (WHO, 2014).

Manusia merupakan makhluk yang bertanya, yaitu yang mempunyai hasrat untuk mengetahui akan segala sesuatu hal. Atas adanya suatu dorongan akan hasrat keingintahuan tersebut, manusia kemudian tidak hanya akan bertanya tentang berbagai hal yang ada di luar dirinya, manusia tersebut yang kemudian juga akan bertanya tentang berbagai hal dalam dirinya sendiri. Dalam berbagai ruang dan waktu, manusia telah dan selalu berupaya untuk mengetahui tentang dirinya sendiri. Hakikat manusia tersebut dipelajari melalui berbagai macam pendekatan (*common sense*, ilmiah, filosofis, religi) serta melalui berbagai macam sudut pandang (biologi, sosiologi, antropobiologi, psikologi, politik).

Dalam kehidupannya yang riil, manusia mampu menunjukkan keragaman dalam berbagai hal, baik dari tampilan fisiknya, strata sosialnya, bahkan kebiasaannya. Pengetahuan tentang manusia pun sangat beragam yaitu sesuai dengan pendekatan dan sudut pandang dalam melakukan studinya. Alasannya yakni bahwa bukankah karena mereka semua adalah manusia sehingga harus diakui kesamaannya sebagai manusia? (M.I. Soelaiman, 1988). Berbagai kesamaan yang menjadi karakteristik esensial dari setiap manusia tersebut yang kemudian disebut sebagai hakikat manusia, karena dengan karakteristik esensial manusia tersebut menjadikan manusia mempunyai martabat khusus sebagai manusia yang berbeda dari makhluk yang lainnya. Sebagai contoh: manusia adalah *animal rasional*, *animal symbolicum*, *homo feber*, *homo sapiens*, *homo sicius*, dan lain-lain.

Manusia juga merupakan makhluk Sosial. Yaitu dalam kehidupan bersama dengan sesamanya (bermasyarakat) setiap individu atau manusia menempati kedudukan (status) tertentu. Selain itu, setiap individu juga mempunyai dunia dan tujuan hidup masing-masing yang berbeda satu dengan lainnya, mereka juga mempunyai dunia bersama dan tujuan hidup bersama dengan sesamanya. Oleh karena itu, selain dengan

adanya kesadaran diri, terdapat pula kesadaran sosial ada pada manusia dan dibutuhkan manusia. Melalui hidup dengan sesama manusia tersebut dapat menjadikan manusia dalam mengukuhkan eksistensinya. Berkaitan dengan ini, Aristoteles menyatakan bahwa manusia sebagai makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat (Ernst Cassirer, 1987). Terdapat beberapa pengaruh hubungan timbal balik antara individu dengan masyarakatnya, yakni diantaranya manusia tidak akan menemukan diri, manusia tidak akan menyadari individualitasnya, kecuali melalui perantara pergaulan sosial.

1.3 Makna Pemerintah dan Pemerintahan

Kata “pemerintahan” berasal dari kata “perintah” yang setelah ditambah awalan “pe” menjadi pemerintah, dan ketika ditambah akhiran “an” menjadi pemerintahan, dalam hal ini perbedaan antara “pemerintah” dengan “pemerintahan” yaitu karena pemerintah merupakan badan, lembaga atau organisasi yang bersangkutan, sedangkan pemerintahan merupakan berbagai perihal, kegiatan ataupun hal ikhwat pemerintahan itu sendiri. Kata perintah memiliki paling sedikit 4 (empat) unsur yang terkandung di dalamnya, yaitu antara lain:

1. Terdapat dua pihak yang terlibat.
2. Pihak pertama yaitu yang memerintah disebut sebagai penguasa atau pemerintah.
3. Pihak kedua adalah pihak yang diperintah yaitu rakyat.
4. Antara kedua pihak tersebut saling berhubungan satu sama lain (Syafiie, 2011).

Berdasarkan pemahaman awal dari kata “pemerintah”, maka kata pemerintahan sebagaimana dalam bukunya Jurdi (2014) dapat diartikan sebagai berikut:

1. Pengertian pemerintahan dalam arti luas adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan-badan legislatif,

- eksekutif, dan yudikatif di suatu Negara dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara.
2. Dalam arti sempit, pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan eksekutif beserta jajarannya dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara.

Secara umum, pemerintahan didefinisikan sebagai sebuah lembaga atau organisasi yang memiliki kekuasaan yang sah dalam pembuatan dan penerapan hukum serta undang-undang di suatu wilayah tertentu. Pemerintah merupakan sebuah lembaga atau organisasi yang memiliki:

1. Otoritas (kewenangan) memerintah dari sebuah unit politik.
2. Kekuasaan memerintah dalam suatu masyarakat politik (*political*).
3. Aparatus yaitu sebagai badan pemerintahan yang berfungsi dalam menjalankan kekuasaan.
4. Kekuasaan untuk membuat peraturan perundangundangan, untuk menangani perselisihan dan membicarakan putusan administrasi dengan monopoli atas kekuasaan yang sah.

Kebutuhan akan pemerintahan berasal dari fakta bahwa manusia membutuhkan kehidupan dalam suatu komunitas, serta membutuhkan otonomi pribadi yang harus tetap dipertahankan dalam komunitas-komunitas tersebut. Suatu negara yang memiliki luas dan kompleksitas yang sangat besar, biasanya akan memiliki 3 (tiga) tingkatan pemerintahan yaitu lokal, regional, dan nasional. Berdasarkan hal inilah kemudian dibentuk sebuah sistem pemerintahan yang akan mampu menghantarkan negara menjadi suatu pemerintahan yang baik.

Sistem pemerintahan merupakan salah satu alat yang digunakan dalam menciptakan dan mencapai tujuan negara.

Radjab (2005) menyatakan bahwa sistem pemerintahan merupakan berbagai organ pemerintahan yang saling berfungsi untuk menciptakan tujuan negara. Sistem pemerintahan adalah sekelompok organ (alat) pemerintah baik dalam arti luas maupun dalam arti sempit yang bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan dari pemerintah itu, yang telah ditentukan sebelumnya. Seperti di Indonesia tujuannya dapat dilihat dalam Pembukaan UUD 1945 (Jurdi, 2014).

Oleh karena setiap manusia merupakan individu atau pribadi, serta dengan adanya pengaruh hubungan timbal balik antara satu individu dengan sesama individu lainnya, maka idealnya situasi hubungan antara satu individu dengan sesamanya itu bukan merupakan suatu hubungan antara subjek dengan objek, melainkan sebuah hubungan antara subjek dengan subjek. Berdasarkan hal tersebut dan karena adanya hubungan timbal-balik antara satu individu dengan sesamanya dalam rangka mengukuhkan eksistensi dari masing-masing individu maka sebaiknya terdapat keseimbangan (*balance*) antara individualitas dengan sosialitas pada setiap umat manusia. Manusia sebagai Makhluk Berbudaya tentunya memiliki rasa inisiatif dan kreatifitas dalam menciptakan dan membentuk sebuah kebudayaan, hidup berbudaya, serta mampu membudayakannya. Kebudayaan tersebut berkaitan dengan kehidupan manusia sepenuhnya, yang dimana kebudayaan tersebut bersangkutan dengan sesuatu yang nampak dalam bidang eksistensinya terhadap setiap manusia. Manusia tidak dapat dilepaskan dari kebudayaan, bahkan manusia itu dapat menjadi manusia karena bersama dan bersangkutan dengan kebudayaannya (C. A. Van Peursen, 1957). Berkaitan dengan hal ini, Ernest Cassirer menegaskan bahwa "manusia tidak dapat menjadi manusia karena dipengaruhi oleh sebuah faktor dalam dirinya, seperti misalnya yaitu akal budi atau naluri, melainkan dipengaruhi oleh fungsi kehidupannya, yaang mencakup pekerjaannya dan

kebudayaannya. Dengan demikian kebudayaan termasuk hakikat manusia" (C.A. Van Peursen, 1988).

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa suatu kebudayaan memiliki beberapa fungsi positif bagi kemungkinan akan eksistensi manusia, namun apabila manusia tersebut tidak terlalu bijaksana dalam mengembangkan kebudayaan tersebut, maka kebudayaan itu dapat menimbulkan kekuatan-kekuatan yang dapat mengancam eksistensi manusia. Sebagai contoh: dalam perkembangan kebudayaan yang terjadi begitu cepat, yaitu sejak abad yang sudah berlalu bahwa kebudayaan disinyalir telah menimbulkan suatu krisis antropologis. Martin Buber mengemukakan bahwa keterhukuman manusia yaitu oleh karyanya sendiri. Manusia mampu menciptakan mesin untuk melayani dirinya sendiri, tetapi pada akhirnya manusia hanya menjadi pelayan mesin. Sama halnya dalam bidang ekonomi, semula manusia memproduksi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, namun pada akhirnya manusia tenggelam dan kemudian dikuasai oleh produksi tersebut (Ronald Gregor Smith, 1959).

Kebudayaan tidak bersifat statis (tetap), melainkan dinamis (dapat berubah). Kodrat dinamika dalam diri manusia mengimplikasikan akan adanya perubahan serta pembaharuan kebudayaan. Hal ini didukung oleh pengaruh kebudayaan masyarakat maupun bangsa lain terhadap suatu kebudayaan masyarakat yang bersangkutan. Selain itu, melihat adanya berbagai dampak positif dan dampak negatif kebudayaan terhadap manusia, dapat menyebabkan masyarakat terombang-ambing antara dua relasi kecenderungan. Di satu pihak ada yang mau dan mampu melestarikan berbagai bentuk lama (tradisi), sedangkan di pihak yang lain cenderung terdorong untuk menciptakan berbagai hal yang baru (inovasi). Ada pergolakan yang tak kunjung reda atau selesai antara tradisi dan inovasi. Hal tersebut meliputi seluruh kehidupan budaya (Ernst Cassirer, 1987). Kebutuhan akan adanya

pemerintahan yaitu berasal dari fakta bahwa manusia membutuhkan kehidupan dalam suatu komunitas, serta otonomi pribadi yang tetap harus dipertahankan dalam komunitas tersebut.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pemerintah merupakan sebuah sistem yang menjalankan wewenang dan kekuasaan, ataupun sistem yang menjalankan perintah, atau merupakan yang memerintah. Di Belanda, pemerintah disebut juga *administratie* untuk pemerintah dalam arti luas, dan *bestuur* dalam arti sempit. Dalam konteks lain pemerintah disebut juga sebagai *overheid*, sedangkan di Indonesia disebut sebagai penguasa. J.J. Rousseau, sebagai seorang filosof dan pencetus teori *The Social Contract*, memberikan pengertian bahwa pemerintah adalah sebagai suatu badan atau lembaga penengah yang didirikan antara rakyat sebagai subjek dan penguasa, untuk saling menyesuaikan, yang ditugaskan untuk melaksanakan hukum serta memelihara dengan baik kemerdekaan sipil dan politik. Sementara, Max Weber (dalam Dahl, 1994) memberikan pengertian bahwa pemerintah sebagai apa pun yang berhasil dalam menopang klaim bahwa dialah yang secara eksklusif berhak menggunakan kekuatan fisik secara sah untuk memaksakan aturan-aturannya dalam suatu batas wilayah tertentu. Soewargono, juga memberikan pengertian bahwa pemerintah sebagai pemegang kekuasaan politik, yang kemudian sering disebut sebagai seorang penguasa atau penyelenggara utama dalam pemerintahan umum (Soewargono, 1979 dalam Sumaryadi, 2010: 20). Ramlan Surbakti kemudian menjelaskan bahwa pemerintah (*government*) secara etimologis berasal dari kata Yunani: yaitu *kubernan* atau *nakhoda kapal*, yang berarti menatap ke depan, menentukan berbagai kebijakan yang diselenggarakan untuk mencapai tujuan bersama (masyarakat-negara), memperkirakan arah perkembangan masyarakat-negara pada masa yang

akan datang, serta mempersiapkan berbagai langkah untuk menyongsong perkembangan masyarakat, serta mengarahkan dan mengelola masyarakat ke tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu, kegiatan pemerintah lebih berkaitan dengan pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik dalam rangka mencapai tujuan bersama (masyarakat-negara) (Surbakti, 1992: 167).

Adapun Ndraha (2003) mengartikan pemerintah yaitu sebagai sebuah badan atau lembaga yang memproses pemenuhan terhadap seluruh kebutuhan manusia sebagai konsumen produk pemerintahan baik pelayanan publik dan pelayanan sipil. Pemerintah (*government*) berasal dari delegasi kekuasaan oleh rakyat. Sedangkan pemerintah (*governance*) menunjuk pada kemampuan serta spontanitas dari berbagai kelompok sosial dalam mengatur diri sendiri, menunjuk pada metode, organisasi, dan manajemen. *Governance* dianggap sebagai gejala sosial, yang lebih luas dari *government*. *Government* membutuhkan sebuah proses politik. *Governance* menunjukkan adanya suatu tatanan dan kemampuan, sedangkan *government* menunjuk pada suatu organ. Konsep *government* menunjuk pada organisasi pengelolaan yang berdasarkan kewenangan tertinggi (negara dan pemerintah). Konsep *governance* tidak hanya sekedar melibatkan negara dan pemerintah, tetapi juga melibatkan peran berbagai aktor di luar negara dan pemerintah sehingga pihak yang terlibat sangat luas. Menurut W.S. Sayre, *Government is best as the organized agency of the state, expressing and exercising its authority*. Maksudnya dalam definisi terbaik, pemerintah sebagai organisasi dari negara yang memperlihatkan serta menjalankan kekuasaannya.

Menurut C.F. Strong (1960: 6), *“Government in the broader sense is changed with the maintenance of the peace and security of state with in and with out. It must therefore, have first military power or the control of armed forces, secondly*

legislative power or the mean's making lows, thirdly financial power or the ability to extract sufficient money from the community to defray the cost of state and of enforcing the low it makes on the state's behalf". Maksudnya dalam artian yang luas, pemerintahan mempunyai kewenangan yang sah untuk memelihara kedamaian dan keamanan negara, sehingga harus mempunyai kekuatan militer atau memiliki kemampuan dalam mengendalikan angkatan perang, harus mempunyai kekuatan legislatif (pembuatan undang-undang), serta harus mempunyai kekuatan finansial atau kemampuan guna mencukupi keuangan seluruh masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan negara dalam penyelenggaraan berbagai peraturan dalam rangka penyelenggaraan kepentingan negara. Menurut Robert Mac Iver (1960: 5), "*Government is the organization of men under authority... how man can be govern*". Yang dimaksud Mac Iver yaitu pemerintah sebagai sebuah organisasi dari berbagai macam orang yang mempunyai kekuasaan... bagaimana manusia itu dapat diperintah.

Menurut Woodrow Wilson (1924: 9), *Government in last analysis, is organized force, not necessarily or invariably organized armed force, but two of a few man, of many man, or of a community prepared by organization to realized its own purpose with references to the common affairsor the community.* Adapun yang dimaksud oleh Wilson yaitu bahwa pemerintah dalam akhir uraiannya, merupakan suatu pengorganisasian kekuatan, yang tidak selalu berhubungan dengan sebuah organisasi kekuatan angkatan bersenjata, tetapi berhubungan dengan dua atau sekelompok orang dari sekian banyak kelompok yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh suatu organisasi guna mewujudkan maksud atau tujuan bersama mereka, terhadap beberapa hal yang memberikan keterangan akan beberapa urusan umum kemasyarakatan. Adapun menurut David Apter (1977: 10), *Government is most generalized membership unit prossessing (a) defined*

responsibilities for maintenance of the system of which it is a part and also (b) a practical monopoly of coercive power. Yang dimaksud oleh David yakni pemerintahan merupakan satuan anggota yang paling umum yang memiliki serangkaian tanggung jawab tertentu dalam mempertahankan sistem yang mencakupnya itu, yang termasuk suatu bagian dan monopoli praktis mengenai kekuasaan paksaan. Menurut Samuel Edward Finer (1974: 34), Pemerintah harus mempunyai berbagai kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus (*process*), negara tempat kegiatan itu berlangsung (*state*), pejabat yang memerintah (*the duty*) dan cara, langkah, metode serta sistem (*manner, method and system*) dari lembaga pemerintah terhadap masyarakat.

Menurut Soemendar (1985: 1), mengungkapkan bahwa Pemerintahan dianggap sebagai badan atau lembaga yang berperan penting dalam penyelenggaraan pemerintahannya, yang selanjutnya pemerintah harus dapat memperhatikan akan adanya ketenteraman dan ketertiban umum, akan adanya tuntutan maupun harapan serta pendapat rakyat, akan kebutuhan dan kepentingan masyarakat, berbagai pengaruh lingkungan, pengaturan-pengaturan, komunikasi peran serta seluruh lapisan masyarakat dan legitimasi. Menurut Prajudi Atmosudirdjo (1984: 19), yang termasuk tugas pemerintah antara lain mencakup seperti tata usaha negara, rumah tangga negara, pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan serta pelestarian lingkungan hidup. Sedangkan yang termasuk fungsi pemerintah adalah pengaturan, pembinaan masyarakat, kepolisian serta peradilan. Dari beberapa pengertian pemerintah menurut para ahli di atas, konsep tentang pemerintah berkaitan dengan beberapa hal yaitu diantaranya:

1. Badan-badan publik yang turut bertanggung jawab dalam sebagian atau seluruh rute penyediaan jasa atau layanan yang dilakukan melalui otorisasi atau privatisasi;
2. Dalam artian yang luas, pemerintah meliputi konsep trias politica yang

terdiri dari tiga lembaga (eksekutif, legislatif dan yudikatif); 3. Tingkatan pemerintah yang dimulai dari yang paling atas yaitu dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Sementara itu, tujuan fundamental dari pemerintahan yaitu pemeliharaan keamanan (*basic security*) dan terciptanya keteraturan umum (*public order*) agar individu-individu dapat menemukan kebahagiaan. Dari keseluruhan tersebut menjadikan pemerintahan sebagai kebutuhan setiap manusia dalam memenuhi seluruh kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi secara individual.

Filosof Thomas Hobbes menunjukkan bahwa manusia sebagai binatang rasional (*rational animals*) menunjukkan kepatuhannya kepada pemerintahan yang dipimpin oleh seorang penguasa. Dalam satu komunitas itu, masyarakat dapat menciptakan serta taat pada pemerintahannya untuk mencapai tujuan membangun bagi diri mereka terhadap keamanan serta ketertiban umum (*safety and public order*).

1.4 Peran Pemerintahan menjadi Kebutuhan Manusia yang Paling Utama

Peranan pemerintahan dalam suatu kehidupan masyarakat yang secara umum telah mendunia baik secara signifikan selama sejarah hidup umat manusia. Pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan suatu keamanan dasar (*basic security*) hingga memiliki peran dalam memberikan perhatian terhadap urusan keagamaan dan kepercayaan, mengontrol perekonomian nasional, serta menjamin keamanan kehidupan sosial secara kekinian. Sebagaimana masyarakat Indonesia telah menjadi lebih kompleks, sehingga pemerintah juga harus mampu menjadi lebih kompleks, lebih berkuasa, serta lebih mendominasi terhadap masyarakat. Kontroversi terhadap betapa besar,

berkuasa, serta mendominasinya pemerintah akan selalu terus berlanjut dalam sisa sejarah hidup umat manusia.

Dalam konteks kybernology yang berkaitan dengan tujuan pemerintahan, Ndraha menyampaikan pendapat bahwa pemerintahan bertujuan untuk melindungi segala hak eksistensi (asasi) manusia, untuk melestarikan lingkungannya, serta memenuhi kebutuhan dasar yang dilakukan melalui proses interaksi antar 3 (tiga) peran, yakni antara lain: 1) mampu meningkatkan nilai sumber daya yang ada dan mampu menciptakan atau membentuk sumber daya baru (pembaharuan) sebagai peran SubKultur Ekonomi (SKE); 2) mampu mengontrol SKE, memberdayakan, serta redistribusikan berbagai nilai yang telah berhasil ditingkatkan, diciptakan atau dibentuk oleh SKE, yaitu melalui pelayanan kepada pelanggan oleh Sub Kultur Kekuasaan (SKK); serta 3) mampu mengontrol SKK oleh peran Sub Kultur Pelanggan (SKP). Jika tujuan tersebut tercapai, pemerintahan (governance) berkualifikasi baik (sehat, good) (Ndraha, 2008: 6-7). Dengan demikian tujuan pemerintahan erat kaitannya dengan fungsi pemerintahan. Ryas Rasyid (1999) berpendapat bahwa pemerintahan mengembangkan 3 (tiga) fungsi hakiki, yaitu pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan (*service, empowerment, development*) (Rasyid, 1999 dalam Sumaryadi, 2010: 22). Namun pada dasarnya secara umum, dapat dijelaskan bahwa pemerintah memiliki beberapa fungsi pelayanan, yaitu salah satunya sebagai penyedia (*provider*) jasa publik yang tidak diprivatisasikan pelaksanaannya serta layanan sipil seperti layanan birokrasi (Ndraha, 2003 dalam Sumaryadi, 2010: 22).

Istianto (2011: 21-22) menjelaskan bahwa Pemerintah merupakan suatu bentuk organisasi dasar dalam suatu negara. Tujuan dari pemerintah diungkapkan oleh Ateng Syafrudin yang selanjutnya sebagaimana dikutip oleh Tarsito (1978: 10): "Pemerintah harus mampu bersikap mendidik serta mampu

memimpin yang diperintah, pemerintah juga harus serempak yang dijiwai oleh semangat diperintah, pemerintah menjadi pendukung dari segala sesuatu yang hidup bersama diantaranya, pemerintah harus mampu menciptakan perwujudan terhadap segala sesuatu yang diinginkan secara samar-samar oleh semua orang, yang kemudian dilukiskan secara nyata serta dituangkan dalam kata-kata oleh berbagai orang atau individu yang terbaik dan terbesar”. Berdasarkan berbagai pemikiran di atas, sehingga terdapat beberapa pernyataan yang dapat memperlihatkan atau menunjukkan fungsi dasar pemerintah serta menjadikannya sebagai kebutuhan setiap manusia yaitu antara lain: 1. Mampu bersikap mendidik dan menjadi pemimpin yang diperintah yaitu Pemerintah yang berfungsi sebagai pemimpin (*leader*) serta pendidikan (*educator*). Para pamong yang diharapkan mampu memimpin serta menjadi panutan seluruh masyarakatnya; 2. Serempak dijiwai oleh semangat diperintah yaitu pemerintah harus mampu memahami berbagai aspirasi yang berkembang di masyarakat. Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang mengerti terhadap apa yang diinginkan dan menjadi kebutuhan seluruh masyarakatnya; 3. Menjadi pendukung dari segala sesuatu yang hidup bersama diantaranya yaitu yang dimaksud adalah pemerintah berperan sebagai katalisator serta sekaligus berperan sebagai dinamisator masyarakat. Sebagai katalisator yaitu sebagai penghubung terhadap setiap kelompok kepentingan di masyarakat. Sedangkan sebagai dinamisator yaitu sebagai penggerak terhadap segala bentuk kegiatan kemasyarakatan; 4. Menciptakan perwujudan terhadap segala sesuatu yang diinginkan secara samar-samar oleh semua orang yaitu pemerintah harus memiliki kepekaan terhadap segala perubahan yang terjadi di masyarakat, pemerintah tidak boleh lengah terhadap banyaknya keinginan di kalangan masyarakat. Dari hal tersebut banyak pemerintah yang jatuh atau hancur yang diakibatkan akan ketidakpekaan pemerintah terhadap

perubahan; 5. Melukiskan semua secara nyata dan dituangkan dalam kata-kata oleh berbagai orang yang terbaik dan terbesar. Yaitu pemerintah memiliki tugas untuk merancang dan atau membuat berbagai kebijakan yang kemudian dituangkan dalam bentuk peraturan-peraturan. Tidak kalah pentingnya, pemerintah harus mampu mengimplementasikannya dengan baik dan benar serta mempersiapkan perangkat dan sumber daya yang terbaik (Istianto, 2011: 22).

Perkembangan dalam era globalisasi pada saat ini, meskipun sebuah upaya perubahan paradigma ke arah yang bermaksud mengurangi peran pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan bahkan yang kemudian dengan tegas oleh David Boaz (1997) seperti yang sebagaimana dikutip Rian Nugraha D. (2006) mengungkapkan bahwa "*The best government is the least government*", namun adapun esensi fungsi pemerintahan yaitu semangat dalam memimpin, melayani, mengayomi, serta mendukung kepentingan publik tetap tidak boleh kalah atau berkurang. Apalagi harus dikalahkan oleh berbagai kepentingan para pelaku bisnis yang selanjutnya sering disebut sebagai "*The Invisible Hand*".

Pendapat Lemaire (1970, dalam Salam, 2002: 34) yaitu tentang fungsi pemerintahan menurut Djokosoetono (2002) yang selanjutnya disebut sebagai Pancapralla yakni antara lain: 1) Fungsi Bestuurzorg yang berarti melaksanakan kesejahteraan umum, 2) Fungsi Bestuur yang berarti menjalankan undang-undang, 3) Fungsi Kepolisian, 4) Fungsi mengadili, 5) Fungsi sebagai pembuat peraturan. Selain itu, adapun fungsi pemerintahan menurut Donner (1953), yang dimana fungsi pemerintahan tersebut dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu: 1. Fungsi politik (sebagai pembuat peraturan); serta 2. Fungsi administrasi (sebagai pelaksana peraturan). Kedua fungsi menurut Donner merupakan fungsi administrasi pemerintah, yang memiliki makna bahwa pemerintah sebagai lembaga eksekutif. Di samping itu, adapun cara dalam

mengklasifikasikan pemerintah memiliki banyak sekal carai, namun terdapat beberapa hal umum yang dapat menyatukan hal tersebut. Penggolongan tersebut cenderung berpacu pada 2 (dua) kriteria, antara lain: 1. Cara pengaturan dinas/fungsi, yang memiliki konsep lebih sempit; dan 2. Hubungan antara yang memerintah dengan yang diperintah.

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) pada Amandemen Ke IV, adapun fungsi pemerintahan yaitu mewujudkan cita-cita negara yang tertuang dalam pembukaan undang-undang alinea ke III, yang berbunyi: “Melindungi seluruh bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, serta keadilan sosial”. Hal ini diperkuat oleh Prajudi Atmosudirdjo yang dikutip Syafrudin (dalam Salam, 2002: 39-40) yang mengungkapkan bahwa tugas pemerintah yaitu antara lain mewujudkan cita-cita negara, dimana tugas pemerintah tersebut dikelompokkan sebagai berikut: 1. Tugas memerintah (*regeertaak*) yaitu diantaranya: Tugas perundang-undangan; Tugas pemerintahan dalam arti luas yakni; a. Tugas Kepolisian; b. Tugas Pertahanan; serta c. Tugas Peradilan. 2. Tugas Eksekutif, yang meliputi antara lain: a. Tugas dalam penyelenggaraan perundang-undangan. b. Tugas dalam penyelenggaraan pemerintah yang kemudian dilaksanakan oleh: 1. Badan pemerintahan pasif dalam arti yaitu tidak terjun secara langsung ke tengah kehidupan masyarakat umum (*bureauiesnst*); 2) Badan-badan pemerintahan umum (*algemene bestuursdienst*); 3) Badan-badan pemerintah teknik khusus (*technischeverticalediensten*); serta 4) Badan-badan penyelenggaraan objek-objek kesejahteraan atau ekonomi pemerintah atau perekonomian. c. Tugas pemerintahan/kepolisian (*bestruurstak*) yakni antara lain

mencakup: 1) Kepolisian kehakiman; 2) Kepolisian pemerintah; serta 3) Kepolisian keamanan.

Demikian pentingnya kehadiran pemerintah dengan berbagai fungsi yang dijalankannya sehingga menjadikan pemerintah sebagai kebutuhan manusia yang tidak dapat diabaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwilaga, Rendy, dkk. 2018. Sistem Pemerintahan Indonesia, CV. Budi Uyama, Yogyakarta
- Kansil dkk. 2003. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kirmadi. 2021. *Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Negara*. <https://panjatan.kulonprogokab.go.id/detil/239/ilmu-pemerintahan-dan-ilmu-negara-oleh-kirmadi-sip>
- Mariana, D., Yuningsih, N. Y., & Paskarina, C. 2020. Modul Ilmu Pemerintahan. In *Modul*. Universitas Padjajaran.
- Marlina, R. 2018. Pembagian Kekuasaan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1).
- Ndraha, Talizidhuhu. 2003. *Kybernology I (Ilmu Pemerintahan Baru)*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Ningrat, Bayu Surya. 1992. *Mengenal Ilmu Pemerintahan*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Nurcholis, Hanif. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta :Grasindo
- Syafiie, Inu Kencana. 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta.

BAB 2

ILMU PEMERINTAHAN SEBAGAI ILMU DAN SENI

Oleh Bambang Irawan

2.1 Konsep Pemerintah

Pemerintah merupakan sebuah sistem yang mengatur negara atau kelompok masyarakat. Encyclopedia (2000) mendefinisikan pemerintahan sebagai sistem kontrol sosial di mana hak untuk membuat peraturan atau hukum, dan hak untuk menegakkannya, diberikan kepada kelompok tertentu dalam masyarakat. Konsep Pemerintah sering digunakan lebih khusus untuk merujuk pada sekitar 200 pemerintah negara yang merdeka dan berdaulat di dunia ini, beserta perangkat organisasi seperti pemerintah negara bagian dan provinsi serta pemerintah local (Smelse dan Baltes, 2001). Sammy dalam Rhodes (1996) menjelaskan tentang konsep dasar pemerintah sebagai kegiatan atau proses memerintah atau pemerintahan, kondisi atau memerintahkan aturan, orang-orang dibebankan dengan tugas memerintah, dan metode atau sistem dimana masyarakat tertentu diatur. Pemerintah terjadi ketika mereka yang secara legal dan formal memperoleh otoritas dan kekuatan mengeksekusi dan melaksanakan kegiatan.

Studi terkait Ilmu Pemerintahan tidak terlepas dari ilmu politik, dengan beberapa lingkup kajian yang memiliki kesamaan dan perbedaan makna. Perbedaan tersebut memunculkan banyak makna yang dapat memperkaya khasanah pemahaman terhadap kajian yang ada pada ilmu pemerintahan.

2.2 Ilmu Pemerintahan Sebagai Ilmu

Berinteraksi dengan dunia pemerintahan secara praktis tidak cukup hanya menggunakan pengalaman berdasarkan kebiasaan dalam bekerja, tetapi juga bagaimana mengembangkan kemampuan teoritis untuk memahami dimensi subjek yang akan dipraktekkan. Sesuai dengan kajian keilmuan, terdapat tiga pendekatan yang dapat dipelajari terkait dengan koherensi ilmu pemerintahan yaitu:

2.2.1 Pendekatan Ontologi

Ontologi dapat dipahami sebagai adalah substansi kajian, focus orientasi dan hakekat sesuatu yang diteliti. Dengan kata lain, yang menjadi kajian oleh ilmu pemerintahan, meliputi definisi, batasan dan ruang lingkup ilmu pemerintahan itu sendiri. Syafiie (2011) menjelaskan bahwa ontologi memberikan pemahaman tentang keberadaan dan realitas, sehingga telaah persoalan secara ontologis dilakukan melalui penyelidikan terhadap sifat dan realitas dengan refleksi rasional serta analisis dan sintesis logika. Berdasarkan asumsi ini, dari sisi ontologi dapat diketahui bahwa ilmu pemerintahan dipahami sebagai cabang ilmu yang berkembang dari waktu ke waktu dan berbeda aplikasinya di berbagai tempat.

Mengikuti Finer (1974) kita dapat membedakan empat arti yang berbeda dari istilah pemerintah. Pertama, pemerintah mengacu pada proses pemerintahan, yaitu pelaksanaan kekuasaan secara otoritatif. Kedua, istilah ini dapat digunakan untuk merujuk pada keberadaan proses itu, ke kondisi aturan yang teratur. Ketiga, pemerintah sering berarti orang-orang yang menduduki jabatan otoritas dalam suatu masyarakat atau lembaga, yaitu jabatan-jabatan pemerintah. Akhirnya, istilah tersebut dapat merujuk pada cara, metode atau sistem pemerintahan dalam suatu masyarakat, yaitu struktur dan

pengaturan kantor-kantor pemerintahan dan hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang diperintah.

Keberadaan beberapa lembaga pemerintahan yang berdaulat merupakan ciri khas negara. Studi tentang pemerintahan berdaulat seperti itu telah menjadi perhatian utama para ilmuwan politik. Tetapi tidak semua pemerintah berdaulat. Kewenangan dan bahkan keberadaan pemerintah seringkali bergantung pada kekuasaan yang diberikan kepada mereka oleh pemerintah berdaulat. Pemerintahan berdaulat dalam masyarakat maju biasanya dianggap terdiri dari tiga set struktur organisasi yang berbeda, masing-masing memiliki peran tertentu: *pertama*, peran legislatif adalah membuat undang-undang. *Kedua*, eksekutif (juga kadang-kadang membingungkan disebut sebagai pemerintah) bertanggung jawab atas implementasi hukum dan di sebagian besar politik maju telah memainkan peran dominan dalam perumusan proposal undang-undang baru. *Ketiga*, peradilan, yang bertanggung jawab atas interpretasi hukum dan penerapannya dalam kasus-kasus (Kuper, 2005).

Para sarjana tidak hanya tertarik pada bentuk yang diambil pemerintah, tetapi juga ruang lingkupnya. Hal ini melebar dan mendalam di semua masyarakat maju selama abad ke-20, dengan pemerintah mengambil tanggung jawab yang semakin meningkat, khususnya untuk kebutuhan kesejahteraan warganya, meskipun dalam derajat yang berbeda-beda. Perdebatan terus berlanjut tentang seberapa jauh pertumbuhan ini merupakan cara yang diperlukan untuk mengurangi konsekuensi yang tidak diinginkan dari kapitalisme maju dan seberapa jauh hal itu mencerminkan ekspektasi publik yang terus meningkat tentang apa yang harus dilakukan oleh pemerintah. Tetapi menjelang akhir abad ini semakin diperdebatkan bahwa pertumbuhan ini mungkin telah mencapai batasnya, baik karena ketidakefisienan negara yang

nyata dibandingkan dengan sektor swasta maupun karena beban yang dibebankannya pada ekonomi produktif.

2.2.2 Pendekatan Epistimologi

Epistemologi merupakan salah satu pendekatan yang fokus pada bagaimana mendapatkan sesuatu beserta metode yang digunakan. Informasi terkait pemerintahan didapat melalui data empiris atau fakta lapangan tentang pemerintahan mulai dari tingkat local, regional, nasional, bahkan internasional. Sementara metode yang digunakan dapat beragam berupa deduktif, induktif, deskriptif, historis, eksperimen, dan lainnya. Pemerintahan yang berbasis ilmu pengetahuan diharapkan mampu terus berkembang dengan menyesuaikan dengan banyak pendekatan multidisiplin.

Poelje dalam Ndraha (2011) menjelaskan bahwa ilmu pemerintahan merupakan ilmu yang bertujuan untuk mengelola kepemimpinan dalam mengatur hidup bersama sebagai manusia ke arah kebahagiaan tinggi tanpa merugikan orang lain secara tidak sah. Berdasarkan uraian di atas, berdasarkan sudut pandang epistemologi, kajian ilmu pemerintahan lebih berorientasi pada sisi aplikasi atau penerapan, sehingga dapat di kategorikan dalam ilmu sosial terapan.

Studi tentang pemerintahan telah mengalami sejumlah perubahan dalam periode sejak Perang Dunia Kedua. Awalnya studi tentang pemerintahan tumbuh dari studi hukum tata negara. Hal ini ditandai dengan konsentrasi pada lembaga formal pemerintahan dan pada ketentuan konstitusional, sementara masing-masing negara cenderung dipelajari secara terpisah daripada dalam kerangka komparatif. Namun, di bawah pengaruh revolusi perilaku, dari tahun 1960an dan seterusnya, para ahli sarjana semakin memperhatikan bagaimana pemerintah sebenarnya memiliki orientasi aktivitas, kepada lembaga-lembaga di luar aparatur formal

negara tetapi memainkan peran penting dalam operasinya (seperti partai politik dan kelompok kepentingan lain). Perspektif ini menunjukkan bahwa bagaimana pemerintah beroperasi dalam praktiknya lebih bergantung pada bagaimana orang berperilaku politik dan apa sikap politik mereka daripada aturan kelembagaan formal. Selanjutnya, yang juga berpengaruh dalam perkembangan kajian ini adalah pendekatan-pendekatan yang berasal dari teori sistem, khususnya struktural-fungsionalisme. Studi komparatif yang difasilitasi ini, termasuk masyarakat berkembang dan maju, dengan memajukan bahasa konseptual berdasarkan fungsi yang dilakukan dalam masyarakat mana pun, dan dengan demikian bahasa yang dapat diterapkan pada studi pemerintahan di mana saja.

Perkembangan selanjutnya terlihat dengan masuknya pendekatan institusionalisme baru, dimana kajian pemerintahan difokuskan pada peran dan pengaruh aturan formal dan lembaga pemerintahan. Dikatakan bahwa aturan dan institusi ini membuat perbedaan karena memiliki pengaruh independen baik pada perilaku politik maupun hasil kebijakan. Akibatnya perdebatan normatif tentang manfaat desain konstitusional yang berbeda telah memperoleh dorongan baru, meskipun itu berarti mereka semakin diinformasikan oleh bukti empiris tentang apa sebenarnya dampak desain yang berbeda dalam praktik. Namun, pada saat yang sama, pengaruh berkelanjutan dari tradisi perilaku yang lebih awal telah dicontohkan oleh peminatan terhadap kajian pengaruh modal sosial dalam menentukan efektivitas pemerintahan (Puttnam, 1993). Perdebatan antara kedua perspektif ini tidak diragukan lagi dapat diharapkan untuk terus memberikan kontribusi positif.

2.2.3 Pendekatan Aksiologi

Aksiologi ilmu pemerintahan berbicara penerapan dan kemanfaatan ilmu. Dari sisi lokus penerapan penerapan, ilmu pemerintahan tersebut dapat dilihat dari level pemerintahan pusat sampai ke pemerintahan daerah. Sedangkan kemanfaatan ilmu pemerintahan dapat berupa pengembangan logika dan gagasan pemerintahan di satu sisi, dan peningkatan keterampilan birokrasi pada pelayanan public di sisi lain. Disamping itu juga diharapkan munculnya peningkatan pemahaman dan kesadaran akan fungsi pemerintahan.

Dari konsep pemerintahan tersebut yang dikaitkan dengan kaitan praktiknya, nampak jelas adanya perbedaan peran antara pemerintah selaku pelayan dengan masyarakat selaku objek yang dilayani. Hal ini sejalan dengan pendapat Ndraha (2011) pada tulisannya mengemukakan bahwa pemerintah pada dasarnya memiliki pemahaman dalam cara memberikan jaminan atas pemenuhan kebutuhan akan jasa publik dan layanan civil bagi masyarakat.

Walaupun demikian, relasi antara pemerintah dengan masyarakat cukup dekat. Sebagai contoh, ketika berbicara masalah hak asasi dan kewajiban layanan public yang bersifat dasar, maka pemerintah secara aktif akan berperan memfasilitasi perlindungan dan pelayanan tersebut. Itulah sebabnya ilmu pemerintahan secara sadar penting untuk di pelajari di berbagai aspek kehidupan.

Melihat sejarah di *Athena* sendiri, fungsi-fungsi pemerintahan dapat ditemukan dalam konstitusi berupa fungsi peradilan, perencanaan anggaran belanja, pajak, militer, dan kepolisian. Dalam pemerintahan modern dewasa ini Rasyid (1998) membagi fungsi pemerintahan menjadi empat bagian, yaitu pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan pengaturan. Maka dari itu, fungsi-fungsi pemerintahan yang dijalankan pada saat tertentu dapat menggambarkan kualitas pemerintahan itu sendiri. Jika pemerintah dapat menjalankan

fungsi-fungsinya dengan baik, maka dengan sendirinya diasumsikan pelayanan dapat membuahkan keadilan, pemberdayaan melahirkan kemandirian serta pembangunan yang menciptakan kemakmuran.

2.3 Ilmu Pemerintahan Sebagai Seni

Dalam kehidupan sehari-hari, aktivitas manusia dan interaksinya dengan semua unsur pendukung kehidupan yang ada tidak terlepas dari seni. Seni dapat dipahami sebagai nilai dasar kebebasan kreatif, hal ini mendukung adanya sudut pandang keyakinan (*focus of trust*) dalam menentukan pilihan dan perbedaan dengan konstruk formal maupun materialnya, sehingga tercipta terobosan baru yang lebih inovatif. Dari sisi bahasa, padanan kata seni dalam Bahasa Inggris *art*, sedangkan dalam Bahasa Latin disebut *ars*.

Sebagai suatu seni, maka ilmu pemerintahan menjelaskan tentang bagaimana kemampuan menggerakkan sumber daya organisasi melalui kharisma, pengaruh dan kekuasaan yang dalam hal ini merupakan domain pemimpin, sehingga mau bergerak sesuai tujuan organisasi yang telah dibuat. Menurut Terry dalam Syafii (2010) menjelaskan bahwa *art is personal creative power plus skill in performance*. Dari konsep ini dapat dipahami bahwa seni merupakan daya kreatif seseorang, ditambah dengan keahlian dalam menunjukkan performanya. Melalui seni, kemampuan dan kemahiran seseorang dituntut untuk menciptakan rasa dan karsa yang dimilikinya terhadap tugas dan fungsinya.

Dari uraian di atas terkait bidang kajian pemerintahan, dapat disimpulkan bahwa seni merupakan bagian penting menerapkan nilai estetika dalam aktivitas pemerintah. Ketika menjelaskan perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi yang dilakukan terhadap seluruh aktivitas organisasi, tuntutan kepatutan dan estetika akan menghadirkan pilihan terbaik

harusnya menjadi barometer dalam menjalankan pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Columbia University. 2000. *The Columbia Encyclopedia, Sixth Edition*. USA: Columbia University Press
- Finer, S.E. 1974. *Comparative Government*. England: Penguin Books
- Kuper A., Kuper J. 2005. *The Social Science Encyclopedia*. New York: Routledge
- Ndraha, T. 2011. *Kybernology, Ilmu Pemerintahan Baru*. Jakarta: Rineka Cipta
- Puttnam, R.D. 1993. *Making Democracy Work*, New Jersey: Princeton,
- Rasyid, R. 1998. *Pemerintahan yang Amanah*, Jakarta: Binarena Pariwara
- Rhodes, R.A.W. 1996. The New Governance: Governing without Government. *Political Study*, 44: 652-667
- Smelser, N. J., Baltes, P. B. 2001. *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences*. New York: Elsevier Science.
- Syafiie, I.K. 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia, Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta
- 2010. *Pengantar Filsafat*. Bandung: Refika Aditama

BAB 3

PENGERTIAN, OBYEK & RUANG LINGKUP ILMU PEMERINTAHAN

Oleh Ahmad Mustanir

3.1 Pendahuluan

Kata pemerintahan yang dikemukakan oleh Finer dalam Ifuper (2000: 418) merujuk kepada 4 definisi penting, yakni: **Pertama**, aparat pemerintahan berpacu terhadap sebuah mekanisme pemerintahan, disini kewenangan dijalankan oleh pihak-pihak yang sudah resmi sebagai penguasa. Pada konsep tersebut, seluruh mekanisme yang dijalankan pada lingkup pengoperasian kekuasaan dianggap sebagai suatu kegiatan yang memperlihatkan kemampuan aparatur pemerintahan dalam menjalankan tugasnya. Realitas tersebut bisa terlihat pada saat individu merasa jika seluruh kegiatan untuk mengatur serta menertibkan sehingga kegiatan menjadi terasa bertele-tele pada siklus yang dirancang dengan sadar oleh aparatur pemerintahan. Kondisi yang mengancam bagi amannya tiap-tiap orang adalah indikator mengenai ada ataupun tidak adanya suatu aparat pemerintah (Thomas Hobbes dalam Rasyid, 1999; 3) (Djopari and Solihah, 2020).

Aparat pemerintahan pasti hadir dalam mewujudkan target-target mulianya, yakni terlahirnya ketertiban sesuai dengan hal-hal yang dikatakan dengan membuat kehidupan menjadi tertib serta tentram. Ketenteraman merupakan keadaan jiwa pada tiap-tiap manusia sebab terwujudnya kepentingan-kepentingan dasarnya (sandang, pangan, papan), dan munculnya kesempatan agar dapat menjadikan aspek-aspek kemanusiaan menjadi aktual. Sementara tertib

merupakan kondisi serta keadaan yang dinamis yang mengilustrasikan mengenai terdapatnya ketaatan terhadap hukum, peraturan, serta konsensus sosial.

Kedua, kata pemerintahan merujuk terhadap tempat dimana mekanisme pemerintah itu dioperasikan. Proses untuk menamai sebuah keentitasan pemerintahan kerap memperlihatkan dengan langsung tempat keberadaan aparatur pemerintahan tersebut. Contohnya, kita bisa mengatakan sebuah pemerintahan pada tingkatan pusat ataupun daerah.

Pemerintahan nasional sering kita sebutkan menjadi tingkatan pemerintahan pusat dan juga menjadi ibukota dari Negara, sementara aparat pemerintahan yang subnasional kita katakan menjadi tingkatan pemerintahan daerah yang ada dibawah kontruksi dari aparat pemerintahan yang nasional. Selain dari kepopuleran yang dimaksudkan, kata tersebut merujuk pula pada institusional, badan ataupun komunitas yang melaksanakan mekanisme pemerintah. Di tingkat operasional, kita kerap menyamakan kelembagaan seperti kedinasan, departemen, lembaga, ataupun kantor menjadi representasi dari pemerintahan.

Ketiga, aparat pemerintahan memperlihatkan dengan langsung individu-individu yang memegang kekuasaan-kekuasaan pemerintahan serta menjadi pihak yang melaksanakan mekanisme pemerintahan. Seluruh kedudukan-kedudukan pemerintahan yang dipegang oleh individu yang lolos dalam pemilihan ataupun hanya diangkat oleh aparat pemerintahan secara langsung mengkokohkan kata pemerintahan tersebut.

Keempat, kata pemerintahan berpokok juga terhadap nilai bentuk, cara ataupun manajemen dari pemerintahan pada sebuah kelompok rakyat, yaitu struktur serta pengoperasian lembaga pemerintahan dan kaitannya pada pihak yang memberikan perintah ataupun pihak yang diberikan perintah. Manajemen pemerintahan mendeskripsikan seluruh

komunikasi aparatur pemerintahan yang saling berhubungan serta bergantung pada pengoperasian pemerintah. Manajemen pemerintah di akhirnya mendukung dibentuknya pengklasifikasian agar dapat menemukan perbedaan pada metode-metode yang dipakai oleh aparat pemerintahan untuk melaksanakan komunikasi pada unit-unit kekuasaannya. Pada masa kini, manajemen pemerintahan ada yang parlementer, mekanisme pemerintahan yang presidensial, serta manajemen pemerintah yang gabungan (*mixed system*).

Walaupun begitu, 2 manajemen pemerintah terdahulu lebih populer bahkan bisa dibilang tak mempunyai kekurangan sampai dibentuknya manajemen yang akhir. Contohnya, Negara Inggris adalah contoh bangsa yang menggunakan manajemen pemerintah yang parlementer. Sedangkan USA menerapkan mekanisme pemerintah yang presidensial dan Swiss menganut mekanisme pemerintah yang gabungan, Hal yang paling akhir pada hal-hal yang membedakan terminologi pemerintahan hanya memberikan sisa 1 definisi yang baik, yakni kaitan diantara pihak yang memberikan perintah serta pihak yang diberikan perintah.

Kuper (2000: 419) mengemukakan pendapatnya yaitu pihak-pihak pada pemerintahan yang bisa diberikan perintah berhubungan dengan seberapa jauh aparat pemerintahan berperan untuk melaksanakan pengintervensian kepada rakyat untuk mengupayakan tercapainya suatu target. Pada peristiwa yang wajar sejumlah aparat pemerintahan memahami jika demokrasi berusaha meminimalisir terjadinya pengintervensian pada kebebasan seseorang. Pemerintahan yang menganut paham demokrasi kerap bersandar untuk menjadi pihak yang melayani rakyat. Sedangkan, aparat pemerintahan yang lebih total akan berupaya secara maksimal agar bisa sebisa mungkin tidak membebaskan warganya dengan akan menjadikan dirinya menjadi majikan untuk pihak-pihak yang diberikan perintah. Walaupun begitu, kedua hal

tersebut mempunyai alasannya masing-masing yang bisa disetujui dengan baik sebab tiap-tiap keadaan rakyat ataupun kesepakatan dari aparatur pemerintahan tetap pada tujuan konstitusional (Labolo, 2014).

Di Indonesia, definisi tersebut sudah ditumbuhkan dengan berurutan oleh Ndraha (1999) pada periode masa yang kurang lebih 20 tahun dengan menggunakan sebutan ilmu pemerintahan baru (kybernologi). Walaupun teori ini sering mendapatkan konflik pada nilai-nilai resmi ataupun materinya mengenai ilmu pengetahuan, tapi sampai saat ini tak terdapat teori lainnya yang lebih kuat dibandingkan dengan hal-hal yang sudah dikemukakan oleh Finer, kecuali keluhan dari pihak-pihak yang memerhatikan pemerintah pada berbagai artikel pengetahuan umum. Mereka tidak mempelajari lebih banyak mengenai hal-hal yang dikemukakan oleh Ndraha pada bukunya yang berjudul *Kybernology* pada jilid 1-9, tentunya lumayan susah untuk mempelajari hal tersebut apabila cuma menilai beberapa penjelasan singkat. Malahan mereka yang cuma datang untuk melaksanakan kegiatan yang selevel dengan doktoral serta magister kerap mendapatkan hambatan agar bisa mempelajari latarnya, matriks, kerangka sampai teori yang dimaksud (Haudi, 2021) (Ndraha, 2015).

Apakah hal tersebut sebuah kemajuan atau kemunduran dari nilai kemajuan wawasan pemerintahan tentu saja tergantung dari beberapa penyebab, pada konteks ini, salah satu dari hal tersebut merupakan sebesar apa keakseptabilitan pelajar-pelajar pada jurusan pembelajaran pemerintah untuk paham serta mengerti akan teori serta konsep dengan semakin dekat sampai ke tingkatan mempraktekannya agar bisa terbiasa serta bisa melakukan identifikasi mengenai hal-hal yang membedakan ilmu pemerintahan serta studi pembelajaran lainnya. Melakukan debat jika tidak disertai dengan argumen yang mendukung

tentunya cuma bisa membuat tiap-tiap ilmu menjadi arogan. Kemungkinan lebih baik apabila duduk bersama-sama kemudian mencoba untuk memberikan konstruksi yang bijaksana yang bisa menjadi dasar pada pembelajaran mata kuliah wajib pada bidang pemerintahan.

Pada manajemen pemerintah yang semakin berkembang, pemerintahan yang mengakui kedaulatan diidentifikasi dengan terpisahnya fungsi pada lembaga eksekutif, yudikatif, serta legislatif. Lembaga eksekutif memiliki peran yang terpenting serta jika dipandang secara luas lebih menonjol untuk menerapkan aturan terhadap rakyat. Lembaga legislatif berfungsi untuk membuat aturan yang menjadi dasar resmi yang diberlakukan dengan menyeluruh. Sementara lembaga yudikatif bertugas untuk mengawasi, melakukan penafsiran, dan memberikan pengawalan pada pelaksanaan aturan sesuai dengan tema yang sudah ditetapkan.

Pemerintah adalah gejala yang lebih luas daripada terminologi pemerintahan tersebut. Aparat pemerintah memperlihatkan kepada kegiatan kekuasaan pada beragam kawasan publik. Dia tak cuma berfokus terhadap pemerintahan itu saja tapi juga berhubungan dengan kegiatan pada beragam konsep lembaga yang memiliki target untuk memberikan pengarahan, mengontrol serta melakukan pengaturan pada hal-hal yang berhubungan dengan kawasan publik seperti kebutuhan rakyatnya sebagai pihak yang menyuarakan (roters) ataupun pihak-pihak yang melakukan pekerjaan (workers). Apabila peranan aparat pemerintahan cuma pada ko otoritas politik agar tetap tentram serta tertib lewat tugas lembaga eksekutif, Robinson (dalam Kuper, 2000:1417) mengatakan, pemerintah lebih berfokus terhadap mekanisme untuk mengelola politik, pola ataupun cara mengurus permasalahan-permasalahan dan mengelola sumber daya umum (Djopari and Solihah, 2020).

Pada konsep tersebut, pandangan itu mengemukakan bahwa ada tiga aspek pokok yang perlu diperhatikan pada saat mempelajari mengenai pemerintah, yakni: transparansi, legitimasi, serta akuntabilitas. Akuntabilitas berhubungan dengan sebesar apa keefektifan yang dipengaruhi oleh pihak-pihak yang diberikan perintah kepada pihak-pihak yang memberikan perintah. Ataupun secara sederhana yaitu setinggi apa level keyakinan rakyat kepada pemerintahannya (Irnawati *et al.*, 2022) (Firmansyah *et al.*, 2022).

Legitimasi memperlihatkan kepada hak-hak pemerintah agar melaksanakan kekuasaannya kepada warga negaranya. Mengenai sejauh apa kekuasaan itu dilihat resmi untuk dijalankan. Hal tersebut berhubungan dengan sewajar apa serta pantaskah kewenangan pemerintahan perlu dilaksanakan, diketahui bahwa pemerintahan merupakan produk serta representasian dari rakyat negara tersebut. Transparansi berkaitan dengan keterbukaan apa bangsa untuk melahirkan proses dalam melakukan penjaminan akses umum pada saat pemutusan suatu hal. Hal tersebut berhubungan dengan sebesar apa keikutsertaan rakyat pada mekanisme penetapan ketentuan yang bisa membuat mereka yakin menjadi bagian dari seluruh dampak dan resiko yang bisa saja timbul (Mustanir, Muh Rais Rahmat Razak, *et al.*, 2022).

3.2 Pengertian Ilmu Pemerintahan

Pengertian serta pembelajaran yang berhubungan dengan ilmu pemerintahan sudah dijabarkan oleh sejumlah ahli, sejumlah Ali memandang studi pemerintahan menjadi metode pekerjaan ataupun cara mengelola; Sama halnya dengan yang dikatakan oleh U Roshental, yaitu: *De bestuurwetenschap is de wetenschap die zichuitslendbezighoudt met de studie van interneenexternewerking van de structurenenproessen*. Maknanya, ilmu pemerintahan

merupakan studi yang termasuk pada pembelajaran mengenai penjabaran metode pekerjaan menuju dalam serta menuju luar struktur dan mekanisme pemerintahan secara umum. (Sajida & Suprpto, 2014) pandangan ini lebih berfokus terhadap pengoperasian serta metode-metode pekerjaan yang harus dilakukan oleh pemerintah, bisa pada kegiatan di dalam ataupun kegiatan pada luar lingkup pemerintah itu sendiri.

Pandangan yang sejalan dikemukakan oleh H. A. Brasz, yang mengatakan bahwa; *“De bestuurswetenschapwaaronder het verstaat de wetenschap die zich bezighoudt met de wijze de openbardienst is ingerichtenfunctioneert, intern ennaarbuitentegenover de burgers”*. Artinya studi pemerintahan bisa dimaknai menjadi studi yang memahami mengenai metode-metode yang dilakukan oleh badan pemerintah umum tersebut dibuat serta dimanfaatkan dengan baik pada didalam ataupun diluar rakyatnya.

Studi pemerintahan yang menjadi studi yang memahami mengenai sistem pemerintahan ataupun cara mengelola pemerintahan, memperoleh penumbuhan serta diluaskan definisinya dengan memasukkan tugas pengkoordinasian kepada badan pemerintah yang melingkupi lembaga legislatif serta eksekutif oleh Inu Kencana. Inu Kencana Syafi'i, mengemukakan gagasannya bahwa (Syafiie, 2018):

“Ilmu Pemerintahan merupakan ilmu yang mempelajari tentang cara untuk menjalankan pengelolaan (eksekutif), mengatur (legislatif), memimpin serta mengkoordinasikan pemerintahannya (bisa di tingkatan pusat ataupun daerah, ataupun masyarakat bersama pemerintahannya) pada beragam fenomena serta gejala pemerintahan, dengan baik serta tepat”.

Lebih banyak berfokus terhadap struktur dinas serta keefektifan ketika aparat pemerintahan memimpin; *“De bestuurskundeleert, hoe men de openbardienst het besteinrichtenleidt”*. Maknanya, studi pemerintahan

memberikan pengajaran tentang cara-cara dinas umum dibuat serta dipimpin dengan sebaik mungkin.

Adapun beragam pengertian mengenai ilmu pemerintahan, bisa yang bersumber dari ahli-ahli Anglo Saxon ataupun Kontinental (Syafiie, 2014) (Mariana *et al.*, 2020) (Mustanir, Muh Rais Rahmat Razak, *et al.*, 2022), antara lain:

1. W. S. Sayre: Pemerintahan menurut pengertiannya yang paling baik yaitu menjadi komunitas pada bangsa, yang menunjukkan serta melaksanakan kewenangannya.
2. C. F. Strong : Pemerintahan secara umum memiliki wewenang untuk menjaga Negara agar tetap aman dan damai, dalam ataupun diluar. Maka dari itu, yang pertama, perlu menguatkan militernya ataupun mampu dalam melakukan pengendalian pada saat melaksanakan perang, yang kedua, perlu memiliki lembaga legislative yang kuat, itu maknanya dalam membuat perundang-undangan, yang ke-ketiga, perlu memiliki finansial yang kuat ataupun mampu untuk memenuhi kebutuhan uang rakyat untuk membayar biaya ongkos dalam bernegara pada saat penyelenggaraan suatu aturan, hal itu agar dapat dipenuhinya kebutuhan pemerintah.
3. R. Mac Iver : Pemerintah merupakan sebuah komunitas yang dibuat oleh sekelompok manusia yang berkuasa serta agar orang-orang tersebut dapat diberikan perintah. Menurut Mac Iver, ilmu pemerintahan merupakan suatu pembelajaran mengenai apa saja cara-cara yang dapat dilakukan supaya orang-orang bisa diberikan perintah.
4. Woodrow Wilson : Pemerintahan pada akhir uraiannya merupakan sebuah pengelompokan kekokohan, tak senantiasa berkaitan dengan komunitas yang memiliki kekuatan secara senjata, namun sejumlah kelompok individu dari banyaknya golongan manusia yang disiapkan oleh sebuah komunitas dalam memenuhi maksud serta

- target mereka bersama-sama, disertai hal-hal yang menerangkan kegiatan-kegiatan umum masyarakat.
5. David Apter : Pemerintahan itu adalah persatuan individu individu yang (a) bertanggung jawab untuk menguatkan pertahanan manajemen yang sudah ditugaskan kepadanya, hal tersebut adalah salah satu dari tugasnya, serta (b) melakukan pemonopolian yang praktis tentang pemaksaan kekuasaan.
 6. Talizuduhu Ndraha : Lembaga yang mengelola perwujudan kepentingan individu yang menjadi pemakai dari produk yang sudah dibuat oleh aparat pemerintahan yang berhubungan dengan pelayanan sipil serta publik. Pemerintahan atau government tercipta karena wewenang serta kekuasaan yang didapatkannya dari masyarakat. Sementara pemerintahan atau governance lebih berfokus pada mempunyai golongan-golongan sosial untuk melakukan pengaturan pada pribadinya dan berfokus pula pada cara sistem serta komunitas.
 7. Ramlan Surbakti : Pemerintahan atau government jika dipandang dari sisi etimologi bersumber dari bahasa Yunani; Kubernanataun Nakhoda kapal, maknanya adalah memandang ke arah depan, menetapkan beragam kebijaksanaan yang dilaksanakan agar dapat tercapainya suatu target warga negara, memperhitungkan arah pertumbuhan rakyat bangsa di waktu mendatang serta menyiapkan tahapan-tahapan agar dapat melakukan penyusunan pada pertumbuhan rakyat dan melakukan pengelolaan serta memberikan pengarahan kepada rakyat mengenai target yang sudah dirancang. Maka dari itu aparat pemerintahan lebih berhubungan dengan penyusunan serta penyelenggaraan keputusan politik untuk dapat tercapainya target warga sipil.

3.3 Objek Ilmu Pemerintahan

Agar dapat memahami objek dari ilmu pemerintahan, sebagai suatu pendekatan yang biasanya dimanfaatkan pada filsafat ilmiah, yakni pendekatan yang sistematis yang bersumber dari gagasan Immanuel Kant (Gahral, 2002:2-4). Intisari dari pendekatan secara sistematis yakni tiap-tiap pendisiplinan wawasan pembelajaran mempunyai objek serta hal yang membedakan pada suatu ilmu pengetahuan dengan ilmu pengetahuan yang lain, bisa dilihat perbedaannya dari objek-objeknya. Kant mendeskripsikan jika objek pada ilmu pengetahuan yaitu kodrat yang tak memiliki kejelasan, jika telah jelas maka tak melakukan penuntutan untuk terlahirnya ilmu pengetahuan agar bisa mempelajari objek serta menjabarkan kaitan-kaitan antara tafsiran yang sudah ada dan bisa diselenggarakan sebagai bentuk dari pertanggungjawaban. Tidak jelasnya objek memberi dampak dan akibat terdapatnya nuansa ataupun dalam bahasa Inggris dikatakan sebagai *nuances* pada definisi *a very small difference in color, tone, meaning, etc* (Webster, 2008:1106). Munculnya beragam tafsiran serta aliran pada sebuah ilmu pengetahuan merupakan suatu hal yang wajar. Terdapat banyak hal-hal aneh serta tidak normal sebab suasananya yang membawakan subjek dalam program penalaran yang *indiscriminate and unsystematic translation of his terms objek (Ding, Gegenstand)*. Objek kerap diartikan dengan asal-asalan dan bahkan semaunya saja sesuai dengan apa yang ia inginkan serta menikmati subjek dan bahkan terdapat hasrat politik, hingga hasil akhirnya tidaklah sistematis sesuai dengan apa yang terdapat dalam objek.

Kant sudah memberikan bayangan jika perjalanan serta kata terkenal dalam sebuah ilmu pengetahuan tak bisa pernah dijalankan secara lancar serta lepas dari kritik-kritik dan gugatan-gugatan. Terminologi Kant mengenai objek-objek pada sebuah ilmu pengetahuan, Kant *gives the concept of this*

undetermined thing hood the name 'thing-in-itself', using the terms Ding and sich, as opposed to Gegendstand or object an sich (Caygill 2000:304-305) tak bisa ditetapkan ataupun diperkirakan dengan benar sebab ada yang menutup ataupun cover atau tabir sebagai tirai untuk menyekat agar objek itu dapat dibentengi serta dilindungi. objek itu terdapat pada filsafat yang biasa disebut dengan sebutan '*thing-in-itself*' ataupun suatu hal yang terdapat pada pribadinya (Mustanir, Muhammad Rais Rahmat Razak, *et al.*, 2022) (Rafyansyah *et al.*, 2022).

Contohnya, pendisiplinan ilmu antropologi serta sosiologi yang memiliki persamaan yaitu melakukan pengkajian terhadap manusia ataupun objek material tapi mereka masing-masing memandang dari sisi yang tidak sama atau biasa disebut dengan objek formal. antropologi melakukan pengkajian pada budaya manusia, sosiologi melakukan pengkajian pada mekanisme komunikasi pada manusia dalam lingkup rakyat, sementara psikologi melakukan pengkajian pada semua hal yang berhubungan dengan jiwa kemanusiaan (Gahril 2000:2-5) (Mustanir, Muh Rais Rahmat Razak, *et al.*, 2022).

Itulah persaingan antar ilmu pengetahuan yang tak ada habisnya. Karl R Popper menuliskan pada buku yang populer yang berjudul *objective knowledge*. Dalam buku tersebut mengatakan jika penularannya mengenai persaingan ilmu pengetahuan. Kita mempunyai argumen agar bisa memiliki pandangan mengenai adanya sebuah pewarisan landasan untuk kemampuan kita dalam mendapatkan ataupun mempelajari suatu hal yang benar ataupun makna yang tersirat. Olehnya walaupun kita terkadang melakukan suatu kesalahan pada saat mencari ataupun mempelajari kebenarannya, spesifiknya selama waktu untuk mempelajari hal tersebut, namun kemudian hanya spesifiknya apabila kondisi yang tak pernah terjadi sebelumnya.

Terdapatnya mutu yang menjadikan sebuah objek sebagai suatu hal yang pokok ataupun begitu menarik sebab kondisi objek tersebut (*the immediacy*) ataupun terdapatnya kaitan yang langsung pada mekanisme yang mapan mengenai pengetahuan untuk mencari ataupun mempelajari hal-hal yang benar tak bisa menjadi jaminan bagi kesempurnaan suatu fungsi; tak ada yang bisa memberikan kepastian yang cukup absolut, walaupun kepastian agak memberi target-target yang praktis. Hal-hal yang menjadi pertanyaan pada keadaan yang tidak pasti ini, menjadi pendasaran pada amannya pengetahuan yang sudah terlewati.

Sehingga Popper memandang permasalahan pengetahuan itu menggunakan metode yang tidak sama dari hal-hal yang diyakini oleh orang-orang yang mendahuluinya. Persetujuan serta keamanan kepada penuntutan-penuntutan yang ditargetkan pada pengetahuan tidaklah jadi suatu permasalahan. Justru permasalahan yang ia hadapi yaitu perkembangan dari pengetahuan. Pada definisi apa yang bisa dibahas tentang perkembangan ataupun kemajuan pengetahuan tersebut, serta metode apa yang bisa kita lakukan agar bisa mewujudkannya.

Permasalahan yang paling pokok serta menjadi landasan yaitu hal-hal yang jadi objek material pada ilmu pemerintahan ini. Objek materialnya yaitu pengetahuan pada jurusan pemerintahan. apakah makna dari kata pemerintah? Yaitu suatu kelompok manusia yang memiliki pertanggungjawaban untuk melakukan pengontrolan pada sebuah negara. Pada buku yang dituliskan oleh Robert M. MacIver, yang berjudul "*The Web of Government*", pada buku tersebut yang menuangkan bahwa "pemerintahan merupakan suatu kelompok manusia yang dikelompokkan dan mempunyai wewenang, serta mereka berusaha agar dapat melakukan perubahan pada mitos mengenai pribadi mereka yang memiliki kekuasaan, sama

halnya dengan yang terjadi pada beberapa kepala pemerintahan yang diberikan perintah."(Mustanir, 2022)

Baron de Montesquieu (1689-1755) mengungkapkan pendapatnya bahwa pemerintah bisa memahami pada makna yang lebih meluas, yakni meliputi seluruh tugas-tugas kewenangan yang terdapat misalnya lembaga legislatif, eksekutif, serta yudikatif bisa dimengerti pada arti yang sempit, yakni cuma untuk tugas eksekutif. Montesquieu memandang jika melakukan pemisahan dengan ketat pada 3 kewenangan tersebut menjadi syarat agar dapat diperolehnya kebebasan, misalnya pada pendapatnya, "apabila lembaga legislatif dipersatukan bersama eksekutif, tidak terdapat lagi yang namanya kebebasan".

Begitu juga pada kekuasaan yudikatif serta legislatif. maka objek materi dari ilmu pemerintahan merupakan pemerintah yang meliputi seluruh tugas-tugas kewenangan (*Trias politica*) serta objek formal dari ilmu pemerintahan merupakan tugas dari kewenangan eksekutif (*unipolitika*). Tugas dari lembaga legislatif jadi kawasan dari sejumlah partai politik yang berusaha agar bisa mendapatkan perolehan suara yang paling banyak agar bisa mendapatkan posisi-posisi kedudukannya. Lingkungan tersebut yaitu kompetensi dari studi perpolitikan (Haboddin *et al.*, 2016).

Kegunaan dari lembaga yudikatif yaitu badan-badan untuk mengadili pada daerah hingga ke tingkatan pusat, misalnya Pengadilan Negeri, Pengadilan tinggi serta Mahkamah Agung yang berkompetensi dalam studi perhukuman. Pandangan tersebut didasari oleh pendekatan yang dikemukakan oleh Immanuel Kant yang disimpulkan oleh *critic of Pure Reason* (1781), *Critic of Practical Reason* (1788), serta *Critic of Judgement* (1790).

3.3.1 Objek Pemerintahan Secara Ontologis

Objek pemerintah jika dipandang dari sisi epistemologis merupakan suatu pemahaman yang benar serta jelas objek formal yang dijadikan bagian pada kepopuleran suatu lingkup pemerintah. pandangan dari sisi epistemologis merupakan aktivitas untuk melaksanakan *focusing on interest*.

Epistemology, (from the Greek 'episteme', 'knowledge', and 'logos', 'explanation'), the study of the nature of knowledge and justification; specifically, the study of (1) The defining features; (2) The substantive conditions or sources; and (3) The limits of knowledge and justification (Cambridge, 1999:273).

Epistemologi yang paling utama yaitu memahami mengenai konsep-konsep yang menjadi dasar ataupun sikap serta karakter pada pengetahuan serta usaha agar dapat dicapainya suatu hal yang benar. Apabila dijelaskan dengan merinci, epistemologi memahami tentang :

- 1) Bagaimana cara untuk melakukan pendefinisian, apa saja hal-hal yang dapat dijadikan kepemilikan ataupun yang tergolong pada objek formal dari kepopuleran ataupun objek materi yang menjadi bagian yang sangat pokok.
- 2) Menetapkan (*imposed*) keputusan-keputusan ataupun kondisi serta asal-asal dari pengetahuan yang bersubstansi, dan
- 3) Menetapkan batasan-batasan pada pengetahuan serta mekanisme agar dapat tercapainya suatu hal-hal yang benar.

Epistemologi merupakan kawasan yang merdeka pada aktivitas ilmu pengetahuan dalam mencari kebenaran yang sesungguhnya. Epistemologi merupakan hasil kajian dari filsafat agar dapat memahami serta menggunakan metode-metode lainnya yang dikehendaki oleh subjek atau kebebasan dalam mendapatkan atau memperoleh suatu hal yang memiliki harga dan mempunyai keyakinan serta berusaha agar dapat

memperoleh kebenaran pada objek formal yang sudah dipercayai. hal tersebut merupakan tempat penyusutan yang pokok pada filsafat sebab tempat pengusutan itu berkaitan dengan dua objek pokok yang utama pada saat melaksanakan penganalisisan filsafat, yakni pribadi sendiri (*ourselves*) serta dunia (*the world*).

Landasan Ontologi adalah perwujudan yang memiliki hakikat, hakikat dari objek yang sedang dilakukan pengamatan/sedang dalam pengkajian/sedang dilakukan penelahan oleh ilmu pengetahuan yang diinginkan. Sesuai dengan definisi ilmu pemerintahan yang dikatakan oleh sejumlah pakar, jadi bisa dilihat jika ada hal yang membedakan antara objek formal pada ilmu pemerintahan. Hal tersebut nantinya akan jadi posisi ilmu pemerintahan jadi semakin kabur dan membuat bingung.

Hal tersebut dikarenakan pakar-pakar yang memberi pengertian mengenai ilmu pemerintahan tersebut didasarkan pada latar belakang study studi kebangsaan misalnya studi perpolitikan, administrasi publik, ilmu hukum serta ilmu pengetahuan lainnya. Ilmu pemerintahan bersumber dari istilah ilmu serta pemerintah. Pemerintahan bersumber dari istilah pemerintah. Banyak definisi yang dikatakan oleh pakar-pakar mengenai ilmu pemerintahan. Tapi dari definisi itu ada yang membedakan pada objek formal untuk ilmu pemerintahan, sementara objek material yang tidak berbeda adalah bangsa ataupun pemerintahan.

Objek suatu ilmu pengetahuan yang dikatakan oleh Inu Kencana merupakan suatu hal yang jadi tema perbincangan, karena itu objek adalah hal-hal yang dikaji, dianalisis, dipahami, serta dibicarakan. Objek material merupakan suatu hal yang bersumber dari ilmu disiplin dan bisa disamakan dengan studi-studi lainnya, sebab memiliki sifat luas serta jadi tema yang dibicarakan dengan global mengenai tema permasalahan (*subject matter*). Sementara objek formal

memiliki sifat spesifik serta khusus sebab subjek ini adalah pusat perhatian (*focus of interest*) pada sebuah ilmu pengetahuan yang berdisiplin. Kemudian dia mengemukakan pula hal yang membedakan serta hal yang menyamakan studi-studi kebangsaan (yang di dalamnya terdapat ilmu pemerintahan, ilmu politik, ilmu administrasi Negara, ilmu hukum tata negara, serta studi kenegaraan) dilihat dari objek formal serta objek materialnya (Labolo, 2014) (Syafie, 2018).

Persamaan pada study studi kebangsaan itu terdapat di objek materialnya yakni bangsa. Sementara, hal yang membedakannya terdapat di objek formalnya. objek formal pada studi perpolitikan merupakan kewenangan, kebutuhan masyarakat, kelompok-kelompok yang menekan. Objek formal pada ilmu administrasi negara merupakan melayani, komunitas, sistem, serta birokrasinya. Objek formal pada ilmu hukum tata negara yaitu aturan serta undang-undang. Objek formal pada ilmu negara yaitu konstitusional, muncul serta lenyapnya bangsa. Serta objek formal pada ilmu pemerintahan yaitu kaitan-kaitan dari aparat pemerintah, gejala, serta kejadian-kejadian dalam lingkup pemerintah .

Dengan jelas Ndraha menyatakan pendapatnya bahwa ontologi ilmu pemerintahan memanfaatkan perintah penalaran sesuai dengan pemetaan sifat disiplin (*basic platform*), hingga *common flatform* pada beragam ilmu pendidikan yang diperoleh, yakni kaitan pada aparat pemerintahan dengan pihak yang diperintah (saling keterkaitan dalam lingkup pemerintah). Van Ylst menyatakan pendapatnya bahwa objek pada ilmu pemerintahan ter yakni kewenangansebut merupakan pemerintah pada makna yang sempit, yakni kewenangan lembaga eksekutif serta kewenangan lembaga legislatif, dan juga kewenangan lembaga yudikatif. Menurut pandangannya, apabila kita mengetahui objek pada ilmu pemerintahan maka sebuah ciri-ciri empiris pada metode ilmu pemerintahan jadi semakin jelas. penjabaran objek tersebut

dikelompokkan menjadi objek material serta objek formal pada ilmu pemerintahan (Karniawati, 2017) (Ndraha, 2015) .

- 1) Objek material Ilmu Pemerintahan merupakan kerealitasan dari pemerintah dengan definisi yang seluas mungkin, kemaksimalan dari tugas lembaga legislatif, eksekutif, serta yudikatif.
- 2) Objek forma Ilmu Pemerintahan merupakan kerealitasan dari aparat pemerintah pada definisi, yakni tugas lembaga eksekutif.

3.3.2 Objek Pemerintahan Secara Epistemologis

Sistematika dari epistemologis dalam objek formal aparat pemerintah mengacu pada contents book from the web of government yang dituliskan oleh R.M. MacIver. objek pemerintahan jika dipandang dari sisi aksiologis merupakan suatu sistem modern bagi konsep penilaian mengenai apa (*the desired government*), hal apa saja yang dipilih (*the preferred government*), "serta hal hal apa saja yang dikatakan sebagai hal poisitif" (*the good government*), serta juga menganalisis tentang sikapnya, standar penilaiannya, serta status pemetaannya.

Epistemologi adalah mekanisme untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang diinginkan. melakukan pengkajian terhadap ilmu pemerintahan dengan epistemologi bisa dilaksanakan lewat pertumbuhan ilmu pemerintahan tersebut. Ilmu pemerintahan kerap dinilai menjadi studi pembelajaran yang baru saja muncul. Sesuai dengan yang dikatakan oleh Taliziduhu Ndraha bahwa ilmu pemerintahan (*bestuur-swetenschap*) melalui sejumlah tahap-tahap agar dapat lebih berkembang.

Langkah yang pertama gejala pemerintah yang diamati lewat sisi pandangan serta metode yang sesuai dengan ilmu pada zaman tersebut hingga objek tersebut jadi ruangan yang melingkupi serta dipahami menjadi suatu mata pelajaran ataupun bagian integral dari sikap berdisiplin lainnya. Sama

halnya dengan ilmu hukum, sosiologi, studi perekonomian, serta studi administrasi. Tahapan yang kedua, gejala aparat pemerintah yang dipahami oleh disiplin ilmu pengetahuan yang terdapat dalam konteks tersebut. hingga dibentuklah para pakar pendisiplinan yang berhubungan. Contohnya pada saat sosiologi melakukan pembelajaran mengenai gejala pemerintah hingga terciptalah sosiologi pemerintah.

Sosiologi pemerintahan disini adalah spesialisasi dari aspek sosiologi. Langkah yang ketiga, dibentuknya organisasi pembelajaran (*body of knowledge*) yang diberikan konstruksi oleh teori-teori yang disumbangkan ilmu pendisiplinan yang khusus tersebut. Hingga terciptalah pendisiplinan Ilmu Pemerintahan yang elektis. Ilmu pemerintahan pada langkah awalnya sejalan *bestuurskunde*, memiliki sifat yang ideografik elektis. Hal tersebutlah yang menjadi awalan dari Ilmu pemerintahan di generasi yang pertama (Karniawati, 2017).

Di langkah yang keempat, terciptalah Ilmu Pemerintahan yang berdiri sendiri dan banyak disebut dengan sebutan *bestuur wetenschap*. Ilmu Pemerintahan pada generasi yang ke-2 tersebut didorong oleh metode yang bisa melakukan identifikasi pada target resmi yang baru (spesifik) pada antara beberapa objek resmi yang lain yang memiliki gejala serta bisa diamati. Di langkah yang ke-5, timbullah kemahiran yang denominatif pada Ilmu Pemerintahan.

Pada saat metodologi Ilmu Pemerintahan dimanfaatkan oleh studi lainnya sama halnya dengan Ilmu Pemerintahan yang memanfaatkan metode ilmu lainnya disaat Ilmu Pemerintahan sedang dalam proses pengkajian sebagai sebuah jurusan yang dikaji secara ilmiah (bidang di tingkatan S1 ataupun BKU di tingkatan S2) serta ketika Ilmu Pemerintahan dinyatakan menjadi suatu ilmu yang berdisiplin serta memiliki derajat akademik yang paling tinggi (S3) serta apabila Ilmu Pemerintahan bisa diimplementasikan pada kehidupan sehari-hari oleh pihak-pihak yang professional pada lingkup

pemerintah yang dihimpun pada sebuah pengasosiasian yang professional. Ilmu Pemerintahan pada generasi yang ke-3 tersebut sudah banyak dikembangkan pada negara-negara barat.

Di langkah yang keenam, bagian dari studi yang melakukan pembelajaran mengenai pemerintah di langkah yang kedua, contohnya sosiologi pemerintah, bertumbuh semakin cepat hingga dianggap menjadi suatu kedisiplinannya sendiri yang selanjutnya melakukan pembentukan pada studi pemerintahan generasi yang keempat (*bestuur sweetens chappen*) dan melakukan pendekatan lintas disiplin serta multidisiplin.

Di langkah yang ke-7, *bestuur sweetens chappen* tersebut apabila bisa mendapatkan kedudukan yang dinominatif, bisa kembali melakukan penyurutan pada jurusan-jurusan yang sebelumnya sudah dilakukan pengkajian oleh induk bidang tersebut. Contohnya pada saat memanfaatkan metode sosiologi ilmu pemerintahan, ilmu pemerintahan pada generasi yang keempat melakukan pengkajian pada gejala-gejala ataupun fenomena yang sosiologi. Hingga terciptalah ilmu pendisiplinan yang baru sama halnya dengan ilmu pemerintahan sosiologi dan sebagainya. Ketika gilirannya ilmu pendisiplinan tersebut melakukan pembentukan pada studi pemerintahan generasi yang kelima.

Ndraha mengemukakan pula bahwa epistemologi ilmu pemerintahan tersebut menumbuhkan konteks kaitan aparat pemerintah dengan memanfaatkan pendekatan yang bersifat monodisiplin (concept analyses and construction), multi disiplin (melihat suatu teori/permasalahan dalam beragam nilai). Van Ylst menjabarkan penelitian dengan menggunakan metode epistemologi pada Ilmu Pemerintahan merupakan usaha yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta masukan agar bisa mendapatkan pengertian dengan semakin mendalam serta gambling mengenai adanya studi

pembelajaran itu. Adanya Ilmu Pemerintahan yang tak memiliki kejelasan pada ruang lingkupnya serta objek-objeknya, sudah dilangsungkan lebih lama daripada studi-studi yang lain, contohnya ilmu perpolitikan.

Terdapat perasaan ragu pada kepopuleran ilmu pemerintahan hingga banyak yang menilai jika ilmu pemerintahan tak mempunyai potensi yang gamblang. Ilmu pemerintahan dinilai tidak terlalu memiliki peran yang lebih optimal apabila dilakukan perbandingan dengan studi perpolitikan, spesifiknya peranan untuk melakukan pengkontribusi pada ilmu tersebut pada program-program pemerintah. Iya beranggapan bahwa terciptanya ilmu pemerintahan pada negara Indonesia banyak berdasarkan terhadap perminatan serta objek untuk menganalisis field of study yang sejalan dengan studi-studi sosiologi yang lain, hingga bisa dinyatakan bahwa terciptanya studi-studi perpolitikan juga masuk dalam kategori ilmu pemerintahan tersebut begitu sangat terpaksa keberadaannya, berkaitan dengan pertumbuhan sosial politik yang pesat dan memerlukan pekerja yang memiliki kompetensi pada bidang tersebut.

Oleh karena kondisinya terpaksa, muncullah usaha untuk merintis yang dijalankan oleh jurusan ilmu pengetahuan lainnya dan yang lebih baik kondisinya misalnya ilmu hukum. Pada periode masa dari tahun 1945-1965, hampir seluruh lulusan-lulusan studi ilmu hukum pada negara kita terdorong agar menjalankan, melangsungkan serta menumbuhkan pendidikan studi studi perpolitikan. Sehingga ilmu politik tercipta karena kebutuhan serta kepentingan hukum pada negara kita. Di masa tersebut politik jadi pemimpin pada hidup yang bernegara serta berbangsa. Bangsa hukum jadi mitos yang membuat ilmu hukum tak memiliki daya dalam menangani krealitasan politik. Ilmu hukum membutuhkan ilmu politik yang menjadi usaha agar dapat dihadapinya karya lintasan

politik agar bisa dilandasi pada terselenggaranya suatu lingkup pemerintahan.

Kemudian, Indonesia mempunyai komunitas pada profesi ilmiahnya dalam jurusan ilmu politik yang dijadikan tempat oleh ilmu Hubungan Internasional serta Ilmu Pemerintahan. Komunitas tersebut dinamakan Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) yang didirikan pada tanggal 17 Januari 1985 di Jakarta. Ilmu Pemerintahan menjadi bagian pada ilmu politik yang turun temurun karena kondisi yang tidak stabil di masa awal-awal kemerdekaan bangsa Indonesia dari dijajah oleh Negara lainnya, menimbulkan sejumlah hal-hal yang tidak jelas sehubungan pada kehadiran ilmu pengetahuan itu pada ruang lingkup pembahasannya.

3.3.3 Objek Pemerintahan Secara Aksiologis

Aspek-aspek itu seluruhnya ada pada pemerintah pada definisi yang eksekutif (*the government*) serta tentu saja jika dipandang dari segi siologis harapan (*the hope*) kepada aspek-aspek itu terdapat kepada pihak-pihak yang diberikan perintah (*the governed*), (MacIver, 1963:7).

Landasan aksiologi adalah merupakan pemanfaatan/kegunaan/fungsi pada ilmu pengetahuan yang dikehendaki. Pelandasan aksiologi Ilmu Pemerintahan adalah pemanfaatan/kegunaan/fungsi pada studi Pemerintahan tersebut. Ndraha menjabarkan mengenai kegunaan dari Ilmu Pemerintahan dengan memandang manfaat dari ilmu pengetahuan yang dijabarkan oleh Fred N. Kerlinger. Ilmu pengetahuan secara umum memiliki 2 kegunaan, keluar serta kedalam. Keluar, sebuah studi pembelajaran yang memiliki fungsi menjadi peralatan agar dapat dilakukannya pengidentifikasian pada sebuah obyek, melakukan perekaman serta mendeskripsikan mengenai sebuah kondisi, menjelaskan kaitan pada gejala, melakukan pengujian pada pembelajaran lainnya serta

memberikan ramalan tentang hal-hal yang bisa saja terjadi di masa mendatang. Kedalam, konsep ini memiliki fungsi menjadi peralatan dalam melakukan pengujian pada pribadinya.

Ilmu pengetahuan memiliki sifat yang *heuristic*, maknanya mendapatkan, melakukan pengujian, memberikan koreksisereta melakukan pengembangan pada pribadi sendiri hingga senantiasa bisa untuk menjalankan tugas-tugas dengan baik. Apabila hal itu tak kejadian, jadi bisa dikatakan bahwa ilmu yang berkaitan belum kuat (tak ada cukup kenyataan yang bisa mendukung secara relevan serta konsisten) ataupun tertinggal oleh zaman yang kini sudah semakin modern (tak bisa dimanfaatkan menjadi peralatan agar bisa menangani ataupun melakukan antisipasi pada kondisi, sebab jaman kini sudah banyak perubahan) ataupun tak appropriate (seandainya istilah studi diumpamakan sebagai peralatan, jadi busi yang sudah mati tak bisa bersama dengan kunci inggris).

Ilmu Pemerintahan (yang termasuk studi pembelajaran) mempunyai manfaat yang teoritis serta kegunaan yang praktis. Manfaat teoritis pada Ilmu Pemerintahan tersebut dengan melakukan pengkajian/menumbuhkan/ memahami Ilmu Pemerintahan bagi kebutuhan pertumbuhan Ilmu Pemerintahan tersebut. Sementara kegunaan praktis pada Ilmu Pemerintaha disini dengan melakukan pengkajian/menumbuhkan/memahami Ilmu Pemerintahan agar dapat diimplementasikan pada program-program pemerintah. Targetnya yaitu agar dapat dilaksanakan manfaat dari aparat pemerintahan dengan sebaik mungkin hingga tujuan untuk menyejahterakan rakyat dapat segera diwujudkan (Karniawati, 2017).

3.4 Ruang Lingkup Ilmu Pemerintahan

Objek forma serta objek material pada ilmu pemerintahan begitu gamblang hingga kita bisa memandang ontology pada ilmu pemerintahan tersebut. Sementara itu, bahannya bisa mendeskripsikan mengenai pemerintah menjadi suatu studi, hal yang paling utama pada saat melakukan pengkajian pada ilmu-ilmu kenegaraan yang mempunyai keberadaan yang tidak sama.

Kedudukan ilmu pemerintahan pada bahan secara material serta forma mempunyai kehadiran yang tak pasti malah sudah disatukan lewat kepingan-kepingan pengetahuan yang dilakukan oleh ahli filosof, spesifiknya pada ontology pemerintahan itu sendiri.

Ruang lingkup ilmu pemerintahan yaitu (Sufianto, 2015) :

- 1) Pada bidang peraturan perundangan yang banyak dijabarkan ahl-ahli ilmu hukum, yakni:
 - a) Pembahasan konstitusi (tertulis ataupun tak tertulis)
 - b) Hukum kewarganegaraan dan azas pemakaiannya
 - c) Hukum Pemerintahan Daerah dan Pusat
- 2) Pada bidang ketatalaksanaan yang banyak dituliskan oleh ahli-ahli ilmu administrasi, yakni :
 - a) Administrasi Pemerintahan Pusat
 - b) Administrasi Pemerintahan Daerah
 - c) Administrasi Pemerintahan Kecamatan
 - d) Administrasi Pemerintahan Kelurahan
 - e) Administrasi Pemerintahan Desa
 - f) Administrasi Pemerintahan Tingkat Departemen
 - g) Administrasi Lembaga Non Departemen

- 3) Pada bidang kekuasaan yang banyak dituliskan oleh ahli-ahli ilmu politik, yakni:
 - a) Kebijaksanaan Internasional dan Politik Luar Negeri
 - b) Organisasi Politik (infrastruktur dan suprastruktur)
 - c) Kebijakan pemerintah
 - d) Pandangan umum pada penyusunan aturan serta lainnya
- 4) Pada bidang kenegaraan yang banyak dituliskan oleh ahli-ahli ilmu negara, yakni:
 - a) Tugas, hak serta wewenang pemerintah
 - b) Tipe, bentuk dan sistem pemerintahan
 - c) Fungsi unsur dan prinsip pemerintahan
- 5) Pada bidang pemikiran hakiki yang banyak dituliskan oleh ahli-ahli ilmu filsafat yakni:
 - a) Etika pemerintahan
 - b) Seni pemerintahan
 - c) Sekularisme dan pemerintahan agama
 - d) Hakekat pemerintahan
- 6) Pada bidang kaitan-kaitan pemerintahan yang banyak dituliskan oleh pakar ilmu pemerintahan sendiri yang dijadikan hasil pengkajian inti, yakni:
 - a) Hubungan antar kekuasaan (lembaga tinggi negara)
 - b) Hubungan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
 - c) Hubungan antar Departemen dan Lembaga Non Departemen
 - d) Hubungan antar Pemerintah dengan rakyat
 - e) Gejala dan peristiwa pemerintahan
 - f) Teori, asas, teknik, obyek, subyek, metodologi, mekanisme serta sistematika pemerintahan

- g) Pengkajian pemerintahan dalam dimensi ruang (perbedaan pemerintahan di berbagai bangsa)
- h) Pengkajian pemerintahan dalam dimensi waktu (kisah lingkup pemerintah pada jaman dahulu, sekarang, dan masa yang akan datang)
- i) Sistem pemerintahan.

Aktivitas memberikan perintah yang dilaksanakan oleh aparat pemerintah dikenal dengan sebutan pemerintahan. Dilaksanakan dengan memberikan perintah dengan mengatas namakan bangsa kepada individu yang akan diberikan perintah (rakyat/warga negara). Pada ilmu filsuf pemerintah dengan jelas tak memberi pedoman tentang cara-cara dalam menjalankan pemerintahan, namun memberi pengertian serta pedoman tentang metode untuk melaksanakan aktivitas pemerintahan dengan optimal (Hendrayady *et al.*, 2022)(Mustanir, 2020).

Maka dari itu, bisa ditemukan perbedaan pada definisi ilmu pemerintahan dan ilmu politik, ilmu negara, ilmu hokum tata Negara yang seluruhnya adalah studi-studi sosial yang digabungkan pada dalam studi-studi negara, sesuai dengan yang dirincikan dalam table dibawah ini (Sufianto, 2015) (Mustanir, Muh Rais Rahmat Razak, *et al.*, 2022):

NO	NAMA DISIPLIN ILMU PENGETAHUAN	OBJEK MATERIA	OBJEK FORMA
	Ilmu Pemerintahan	Negara	Hubungan-hubungan pemerintahan, gejala dan peristiwa pemerintahan
	Ilmu Politik	Negara	Kekuasaan, kepentingan rakyat, grup penekan
	Ilmu Administrasi	Negara	Pelayanan, organisasi, manajemen, birokrasi
	Ilmu Hukum Tata Negara	Negara	Peraturan perundang-undangan
		Negara	Konstitusi, timbul dan tenggelamnya negara

DAFTAR PUSTAKA

- Djopari, J. R. . and Solihah, R. 2020. 'Pengantar Ilmu Pemerintahan', in *Sejarah Pertumbuhan Pemerintahan dan Ilmu Pemerintahan*, pp. 1–53.
- Firmansyah, H. *et al.* 2022. *Pelayanan Publik di Era Tatanan Normal Baru*. Bandung: CV. MEDIA SAINS INDONESIA.
- Haboddin, M. *et al.* 2016. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Yogyakarta: Pusat Kajian Inovasi Pemerintahan dan Kerjasama Antar Daerah. Available at: <http://eprints.ipdn.ac.id/2629/>.
- Haudi. 2021. *Pengantar Ilmu Pemerintahan, Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Solok: Insan Cendekia Mandiri.
- Hendrayady, A. *et al.* 2022. 'Pengantar Ilmu Administrasi Publik', in. Purbalingga: Eureka Media Aksara, p. 227.
- Irnawati, J. *et al.* 2022. *Good Governance*. Bandung: CV. MEDIA SAINS INDONESIA.
- Karniawati, N. 2017. 'HAKEKAT ILMU PEMERINTAHAN (Kajian Secara Filsafat)', *CosmoGov*, 1(2), p. 205. doi: 10.24198/cosmogov.v1i2.11833.
- Labolo, M. 2014. *Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya, Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Mustanir, A. 2020. 'Implementasi E Government Pemerintahan Desa Dalam Administrasi Pelayanan Publik (Studi Kasus Web Site Desa Kanie Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang)', *OSF*.
- Mustanir, A. 2022. *Pelayanan Publik, Basya Media Utama & Penerbit Qiara Media*. Pasuruan: Basya Media Utama & Penerbit Qiara Media.
- Mustanir, A., Razak, Muhammad Rais Rahmat, *et al.* 2022. *Pengantar Ilmu Administrasi Publik*. Bandar Lampung: CV. MEDIA SAINS INDONESIA.

- Mustanir, A., Razak, Muh Rais Rahmat, *et al.* 2022. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Edited by A. Mustanir. Purbalingga: CV.EUREKA MEDIA AKSARA.
- Ndraha, T. 2015. *Kybernology: Ilmu Pemerintahan Baru*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rafyansyah *et al.* 2022. *Pengantar Ilmu Politik*. Edited by D. P. Sari. Padang: GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI.
- Sufianto, D. 2015. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syafiie, I. K. 2018. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama.

BAB 4

PROBLEMATIKA DAN PENELITIAN PEMERINTAHAN

Oleh Yulius Luturmas

4.1 Pendahuluan

Menjadi Aparatur Pemerintahan merupakan profesi yang mulia karena berkontribusi langsung kepada negara dalam wujud menjadi pelayan masyarakat. Dalam tugas dan fungsi tersebut, aparatur pemerintahan mendapatkan balas jasa atas kerjanya dalam bentuk upah/gaji yang diperoleh setiap bulannya. Dengan demikian, aparatur pemerintahan harus bekerja lebih serius dan professional dalam mengimplementasikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelayan publik.

Aparatur pemerintahan etisnya tidak semata-mata menuntut hak-hak dibayarkan tepat waktu, difasilitasi secara nyaman dengan fasilitas negara, namun harus diimbangi dengan pelaksanaan kewajiban daripada aparatur pemerintahan itu. Kepercayaan yang telah dipercayakan haruslah tetap dijaga dan dipelihara secara serius dalam wujud kerja sebagai seorang yang professional dan berdeikasi serta berintegritas.

Aparatur pemerintah sudah sewajarnya memprioritaskan kepentingan banyak orang (kepentingan bangsa dan negara) daripada kepentingan diri sendiri. Aparatur pemerintah juga diharapkan dapat bertugas secara benar sesuai dengan harapan masyarakat yang menginginkan kebaikan bersama dalam penyelenggaraan negara di masa depan. Simangunsong, 2020 dalam setiawan dan jejasa 2022

menjelaskan bahwa Negara-negara yang pilar-pilar demokrasinya tidak bekerja secara optimal, tidak memungkinkan pencapaian kualitas pelayanan publik yang lebih baik. Bahkan sebaliknya, pelayanan publik tanpa “Proses Politik yang Demokratis” cenderung membuka ruang bagi praktik-praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang berujung kepada penyakit baru di Pemerintahan .

Realita yang disaksikan ternyata sangat berbeda jauh dengan espektasi. Sebagian aparatur pemerintahan tidak melakukan tugas dan fungsinya secara baik. Secara kasat mata terlihat jelas dalam pemberitaan media cetak maupun media elektronik yang menggapbarkan perilaku mendukacitakan hati negara dengan tindakan-tindakan yang inprosedural, dan penerapan korupsi kolusi dan nepotisme di dalam kubu pemerintahan itu sendiri. Dengan kata lain hilangnya indenpendensi dan profesionalitas dari sebaian aparatur pemerintahan.

4.2 Problematika Pemerintahan

Dinamika berorganisasi ataupun berkelompok tidak akan pernah lepas dari problematika. Kata problematika merupakan sebuah kata yang sangat lazim dikumandangkan oleh siapa saja dalam berbagai aspek kehidupan.

Apa yang dimaksud dengan problematika? Secara etimologi, kata problematika berasal dari bahasa inggris yakni "*problematic*" yang memiliki arti yaitu masalah atau persoalan. Dituangkan didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang mendefenisikan problematika sebagai berarti hal yang belum dapat dipecahkan; yang menimbulkan permasalahan. suatu kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang membutuhkan penyelesaian atau pemecahan. Masalah diartikan sebagai suatu hal yang menghalangi tercapainya tujuan (Suharso, 2009).

Begitu pula dalam menjalankan roda pemerintahan, seringkali ada faktor faktor yang memacu terjadinya problematika dalam pemerintahan itu sendiri. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari dalam organisasi pemerintahan itu sendiri (faktor Internal), maupun faktor-faktor yang berasal dari luar organisasi pemerintahan (faktor eksternal). Secara sederhana akan dibahas faktor-faktor tersebut dalam uraian di bawah ini : Rohayatin , dkk (2017) dalam Jurnal Cakra Prabu merincikan beberapa faktor tersebut diantaranya:

a. Sumber Daya Manusia (Aparatur)

Pemerintahan dan setiap urusan yang dijalankan di dalamnya merupakan hal yang sangat penting bagi kelangsungan suatu negara. Segala urusan tersebut tentunya tidak berjalan otomatis tetapi dikerjakan aparatur pemerintahan. Berbicara tentang aparatur pemerintahan, maka lebih cenderung kita berbicara tentang Sumber daya manusia merupakan faktor yang paling vital dalam penyelenggaraan pemerintahan. Mengapa demikian? Karena manusia merupakan aktor yang melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi mimpi besar organisasi.

Mimpi besar organisasi tersebut biasanya ditulis secara singkat dan secara umum dikenal dengan visi dan misi. Organisasi pemerintahan sangat bertanggungjawab penuh terhadap implementasi visi dan misi tersebut.

Bagaimana jadinya ketika aparatur yang ada di dalam organisasi pemerintahan itu tidak memiliki kualitas atau sumber daya manusia yang memadai? sudah pastinya sangat berpengaruh terhadap pencapaian kerja organisasi. Organisasi akan mengalami stagnasi dan bahkan pemerintah dinilai tidak memiliki cukup energi untuk berkarya bagi negara. Pencapaian-pencapaian target menjadi tidak menentu karena memang skil yang dimiliki

aparatur pemerintahan tidak sebanding dengan tugas dan fungsi yang dipercayakan negara.

Namun kadang aparatur yang memiliki keterbatasan ada yang berusaha keluar dari zona tersebut, dengan melakukan kegiatan studi tiru, pembekalan-pembekalan yang dilakukan secara internal maupun eksternal yang berdampak positif terhadap penyelesaian permasalahan tersebut, namun ada juga aparatur pemerintahan yang menganggap hal tersebut merupakan masalah sepele dan tidak perlu ditanggapi secara serius, karena hanya formalitas saja.

b. Perilaku organisasi yang koruptif

Berita utama yang menjadi konsumsi publik yang sangat meresahkan warga negara adalah pemberitaan terkait korupsi aparatur pemerintahan. Sampai-sampai hal tersebut telah menjadi budaya pemberitaan media, sehingga masyarakat memang telah menganggap pemberitaan terkait korupsi. Uang negara yang dimulai dari puluhan juta sampai keangka milyaran rupiah digelapkan oleh aparatur pemerintahan untuk memuaskan kebutuhan hidup. Bahkan menjadi kebanggaan tersendiri ketika koruptor memiliki uang yang banyak dan bergaya hidup mewah dan terlihat berkelas dibandingkan dengan teman-teman sekantor yang gaya hidupnya jauh dibawah sang koruptor tersbut.

Bukan hanya berstatus pejabat tinggi and menengah, budaya korupsi juga telah berakar dan menjadi budaya sebagian orang yang membanggakan korupsi sebagai lahan garapan peningkatan pendapatan, dan istilah yang dialamatkan kepada koruptor adalah “gaji kecil namun penghasilan besar”. Berdasarkan laporan berjudul *Corruption Perceptions Index* tahun 2020 yang dirilis oleh *Transparency International*, Indonesia berada di peringkat

96 dari 180 negara paling korup (*Transparency International, 2018*) dalam setiawan dan jejasa 2022.

Bukan hanya korupsi uang, korupsi waktu kadang juga dipraktekan oleh sebagian aparatur pemerintahan yang dibuktikan dengan keterlambatan ke kantor, dan bolos kerja yang berdampak pada ketimpangan kerja aparatur pemerintahan.

- c. Penerapan prinsip *good governance* dan komunikasi birokrasi

Good governance atau pemerintahan yang baik merupakan istilah asing yang telah familiar dikalangan masyarakat. Setiap negara menghendaki atau menginginkan agar pemerintahan yang baik diwujudkan dalam pelayanan publik yang tersentralisasi kepada pelayana prima kepada masyarakat. Kadang dalam menjelang proses-proses demokrasi (Pemilihan pimpinan eksekutif dan legislatif), para politisi dan tim sukses bahkan masyarakat mempergunakan konsep *good governance* ini sebagai isu sentral dan banyak kajian mengenai baik maupun buruknya penyelenggaraan pemerintahan yang telah berlangsung. Pelayana prima dikomparasikan dan dicari celah antara perencanaan dan implementasi, sehingga menimbulkan konsep berkampanye dan bersosialisasi mencari simpati bagi para politisi.

Esensi daripada penerapan *good governance* dalam peyelenggaraan pemeritahan adalah aparatur pemerintahan benar-benar dapat mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat tanpa ada klasifikasi. Dan kepuasan dalam menerima pelayanan dirasakan oleh masyarakat tanpa ada perbedaan.

Tujuan *good governance* adalah berdasarkan **PERMENPAN Nomor: PER/15/M.PAN/7/2008 tentang**

Pedoman Umum Reformasi Birokrasi Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara yaitu:

1. Terciptanya birokrasi yang bersih;

Birokrasi yang bersih dimaksudkan adalah birokrasi yang murni, transparan, dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Praktek tersebut sangat berpengaruh untuk merugikan negara secara totalitas, membuat kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi pemerintahan menjadi turun. Dan ketika sedikit saja praktek KKN tersebut dipertontonkan dalam birokrasi, maka wajah birokrasi akan tercoreng, dan untuk mengembalikan dan memperbaiki citra birokrasi yang telah cacat baik secara eksternal maupun secara internal.

2. Terciptanya birokrasi yang bekerja secara efisien;

Model birokrasi pemerintahan yang baik juga merupakan dambaan semua pihak. Praktek birokrasi pemerintahan yang baik juga memiliki tujuan untuk menghadirkan birokrasi yang efisien, efektif, maupun produktif. Misalkan dalam pengurusan perijinan mengemudi (SIM), haruslah dilakukan secepatnya, Tertanggungjawab, dan tidak ada istilah joki atau nepotisme yang dipraktekan.

3. Membangun birokrasi yang bekerja transparan;

Birokrasi yang transparan merupakan birokrasi yang terbuka dalam penyelenggaraanya (perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi). Tidak hanya itu, birokrasi dituntut agar mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya secara terbuka kepada pihak terkait dan juga masyarakat. Dalam pertanggungjawabannya, harus jujur dan tidak menutupi/menyembunyikan data dan informasi. Namun hal ini tidak berlaku secara menyeluruh. Ada data/informasi yang harus dijaga, dilindungi, dan dirahasiakan oleh pihak pemerintah

yang sifatnya penting dan berdampak besar terhadap stabilitas nasional, seperti data-data intelegen, dll.

4. Menciptakan birokrasi yang melayani masyarakat.

Pelayanan publik atau pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan oleh aparatur pemerintah dengan harapan penuh bahwa pelayanan tersebut harus berkaitan dengan seluruh kebutuhan masuia dalam setiap aspek kehidupan. Menjadikan birokrasi lebih nyaman dan mudah diakses aan mengstimulasi terciptanya pelayanan prima.

5. Menciptakan birokrasi yang akuntabel.

Birokrasi harus menunjukan keterbukaan dalam mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilakukan. Dan birokrasi yang akuntabel dapat tercipta.

d. Lemahnya implementasi kebijakan

Proses kebijakan selalu akan terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan atau direncanakan oleh *policy maker* dengan apa yang senyatanya dicapai, sebagai hasil atau prestasi dari pelaksanaan kebijakan. Kebijakan perlu dilaksanakan dan itu adalah hal yang sangat enting konsentrasi ilmuan social mulai diarahkan ke permasalahan tersebut.

Ketimpangan dalam mengawal impementasi kebijakan akan membuat tidak menyambungny tahap perumusan kebijakan dan juga implementasi kebijakan itu sendiri. Sehingga pemerintah dapat menetapkan kebijakan namun belum dapat memastikan dampak yang diinginkan (Wahab, 2014: dalam Tinolah 2016)

e. Kepemimpinan yang transaksional

Kepemimpinan transaksional mengstimulasikan dan menggerakkan, memotivasi serta mempengaruhi bawahan dengan cara barter antara kinerja dan *reward*. Artinya, dalam sebuah transaksi bawahan dijanjikan untuk diberi

reward bila bawahan mampu menyelesaikan tugasnya sesuai memdengankan kesepakatan yang telah dibuat bersama.

Tiga dimensi yang dimiliki oleh kepemimpinan transaksional yakni:

contingent reward (kepemimpinan dengan memberikan hadiah merujuk pada perilaku yang berfokus pada pengklarifikasian persyaratan peranan dan tugas, serta memberikan bawahan hadiah materi atau psikologis jika menyelesaikan kewajiban kontraktual);

management by exception-active (merujuk pada pemantauan aktif pemimpin yang bertujuan untuk memastikan pemenuhan standar kerja;

management by exception-passive (terjadi saat pemimpin menunggu mengambil tindakan sampai terjadi kesalahan yang menarik perhatiannya dan pemimpin gagal ikut campur dalam masalah tersebut sampai masalah tersebut terlanjur menjadi serius

f. Inovasi birokrasi dan teknologi informasi

Perkembangan teknologi dan informasi berpengaruh bagi kehidupan masyarakat sangat berpengaruh besar terhadap penyelenggaraan pemerintahan dalam birokrasi. Diperlukan langkah cepat dan adaptasi yang maksimal dalam menjemput perkembangan tersebut. Seiring berjalannya waktu dan pesatnya perkembangan, maka birokrasi wajib hukumnya membenahi diri dengan menghadirkan inovasi dan kreatifitas tinggi yang adaptif sehingga dapat mempermudah pelayanan publik yang difokuskan kepada kesejahteraan masyarakat.

Pasti tergilas ketika pemerintah lewat birokrasinya tidak memproteksi masyarakat dengan dukungan informasi dan penguatan-penguatan kapasitas masyarakat yang kompleks. keunggulan yang ditimbulkan oleh perkembangan tersebut bisa saja mengesjahterahkan

masyarakat, namun sebaliknya jika kelemahan perkembangan tersebut sebagai ancaman karena pemerintah dan masyarakat tidak mampu beradaptasi, maka dipastikan.

g. Struktur organisasi yang adaptif

Adaptasi adalah bentuk penyesuaian terhadap kondisi real. Beradaptasi dapat membuat kita dapat lebih lama berada di suatu tempat. Begitupun dalam organisasi. Organisasi yang mampu beradaptasi merupakan organisasi yang fleksibel dan mampu menempatkan diri pada segala macam situasi dan kondisi. Organisasi adaptif adalah merupakan organisasi yang memiliki kemampuan untuk merespon perubahan lingkungan dan mengikuti harapan stakeholder dengan cepat dan fleksibel. Organisasi adaptif adalah proses pertumbuhan, perkembangan dan klimaks serta anti klimaks dalam sebuah daur hidup. Organisasi yang mampu mengelola evolusi adalah organisasi yang adaptif terhadap perubahan. (Siswanto, and Sucipto, Agus 2008) dalam Yuliani 2020

DAFTAR PUSTAKA

- Suharso A. R.2009, Kamus Besar Bahasa Ind. nesia (Edisi Lux) (p. 37). Semarang: Widyia Karya.
- Rohayatin Titin, warsituo tulus ulung ahmat, kumorotmo nurmandi wahyudi suranto. Jurnal cakra Prabu, vol 1, no 1|, Juni 2013 faktor penyebab belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pelayanan public oleh birokrasi pemerintahan <https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/50/38>
- Setiawan Irfan, Jesaja Christin Pratami; Analisis Perilaku Korupsi Aparatur Pemerintah Di Indonesia (Studi pada Pengelolaan Bantuan Sosial Di Era Pandemi Covid-19) jurnal media birokrasi https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjHo9G3z8n8AhVvR2wGHb11A0gQFnoECBwQAQ&url=https%3A%2F%2Fejournal.ipdn.ac.id%2FJMB%2Farticle%2Fdownload%2F2744%2F1356%2F&usg=AOvVaw260mEEj_TbXu7tb96iV0nc
- PERMENPAN Nomor: PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
- Tinolah Rizky Satiti; 2016. Kebijakan Publik yang Tidak Terimplementasikan: Studi Kasus Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan pada Perubahan Kepemilikan Angkutan Umum Milik Perseorangan Menjadi Badan Hukum di Surabaya; ; Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik; <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-kmp9e532c05c9full.pdf>

Herachwati Nuri, Dewi Irra Chrisyanti Jurnal manajemen teori dan terapan analisis dampak kepemimpinan transaksional dan transformasional terhadap pembelajaran organisasi pada pt bangun satya wacana Surabaya,;

Yuliani, Ansari Muh Isa, Kasmad Rulinawaty; 2020; Organisasi Adaptive Dalam, Pengembangan Kebijakan Pariwisata Di Kabupaten Bulukumba; journal.unismuh. <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiSxPHqg8v8AhWC-XMBHZTaD3kQFnoECA4QAQ&url=https%3A%2F%2Fjournal.unismuh.ac.id%2Findex.php%2Fkimap%2Farticle%2Fdownload%2F3740%2F2804&usg=AOvVaw0zwglX0HmbEcIxB2lEGdoE>

BAB 5

METODE DAN PENDEKATAN ANALISA DALAM ILMU PEMERINTAHAN

Oleh Nur Rohim Yunus

5.1 Pendahuluan

Untuk memahami ilmu pemerintahan, kita perlu memanfaatkan berbagai metode dan pendekatan. Ini karena, dari sudut pandang operasional dan konseptual, metode dan pendekatan ini dapat memberi kesan bahwa ilmu pemerintahan memiliki lebih dari satu wajah (bukan hanya satu wajah) (multifasi). Ini adalah sesuatu yang perlu dilakukan karena ilmu pemerintahan sebagai subjek ilmiah tidak boleh dipahami melalui lensa satu pintu saja; Sebaliknya, itu harus dipahami melalui lensa berbagai pintu, teknik, dan pendekatan. Dalam nada yang sama, proses memperoleh informasi pemerintah agar memiliki nilai kebenaran harus didasarkan pada pemikiran rasional, yang didasarkan pada logika, dan pemikiran empiris, yang didasarkan pada fakta. Oleh karena itu, salah satu cara untuk memperoleh ilmu pengetahuan adalah melalui penelitian. Penelitian juga tidak diragukan lagi memerlukan metodologi dan pendekatan khusus untuk mendapatkan pemahaman yang tepat dan akurat, termasuk dalam hal ini ilmu pemerintahan.

Ilmu pemerintahan diartikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana mengatur (*execute*), mengatur (*legislate*), memimpin dan mengkoordinir pemerintahan (pusat dan daerah, serta rakyat dan pemerintahannya) dalam

berbagai peristiwa dan gejala (Karniawati, 2007). Ilmu ini tentunya juga memerlukan metodologi dan pendekatan yang efektif dan rasional dalam pengkajian dan analisisnya.

Penelitian dan metode ilmiah berjalan beriringan; keduanya sangat diperlukan untuk kemajuan pengetahuan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kemajuan ilmu pengetahuan dapat dibuat untuk terus berkembang dengan menggunakan kajian guna memberikan penjelasan atas peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat. Penelitian dilakukan ketika ada masalah dan mencari jawaban secara ilmiah, karena itu rasa ingin tahu manusia menuntut cara dan proses dalam memecahkan kesulitan yaitu berpikir reflektif. Penelitian dan metode ilmiah memiliki hubungan yang erat, dengan metode ilmiah, pertanyaan dapat terjawab. Penelitian memerlukan praktik sains dan adopsi sikap ilmiah, selain penggunaan metode dari teknik yang dikembangkan sebelumnya (Soehartono, 2002). Oleh karena itu, metodologi dan pendekatan melakukan penelitian ilmu pemerintahan akan dibahas secara singkat dalam penelitian ini.

5.2 Urgensi Metodologi Dalam Ilmu Pemerintahan

Metode penelitian mengacu pada proses investigasi yang metodis dan terorganisir dengan baik. Makna istilah “sistematis” dan “terorganisir” menunjukkan bahwa agar penelitian berhasil, harus dilakukan sesuai dengan metodologi (prosedur) tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya sesuai dengan metode baku. Pengetahuan yang menyelidiki ketentuan metodologi yang digunakan dalam tahapan proses penelitian terkandung di dalam metode penelitian. Karena penelitian adalah usaha keras dengan tujuan memperluas pengetahuan seseorang dan ilmu pengetahuan adalah kumpulan informasi yang mengikuti serangkaian standar, kita dapat menyimpulkan bahwa ada hubungan yang erat antara keduanya. Penelitian,

dalam arti yang paling mendasar, adalah penerapan prosedur yang membentuk apa yang disebut "metode ilmiah," yang merupakan seperangkat prosedur yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan ilmiah. (Ruslan, 2004)

Oleh karenanya, kriteria penelitian ilmiah secara umum bersifat sebagai berikut: (Nazir, 2009)

1. Berdasarkan fakta, bukan berdasarkan kira-kira atau legenda yang tidak memiliki dasar pengetahuan yang jelas.
2. Bebas dari prasangka, yaitu tidak berdasarkan sudut pandang yang subjektif, tetapi berdasarkan alasan dan pembuktian logis yang objektif.
3. Menggunakan analisis, identifikasi masalah, dan dapat membantu peneliti sebagai pedoman dalam kerangka berpikir, upaya menjawab untuk hasil penelitian selanjutnya secara sistematis, logis, akurat, dan tepat.
4. Menggunakan teknik kuantifikasi, pengukuran data melalui kuantifikasi untuk menghindari tolak ukur yang perkiraan secara tidak tepat atau tidak jelas dalam melakukan metode penelitian. Menghindari ukuran menurut perasaan (intuitif), seperti kalimat sejauhmana (sangat luas).
5. Dalam melakukan proses penelitian dan hingga tahapan hasil penelitian harus menggunakan tolak ukur yang objektif, sistematis, dan logis.

Ilmu adalah kumpulan informasi yang telah terakumulasi dari waktu ke waktu dan secara konsisten mengenai subjek atau objek tertentu. Bidang studi atau disiplin ilmu yang dapat memenuhi syarat harus memenuhi empat kriteria sebagai berikut: (Ibrahim & Supriatna, 2020)

1. Ada dan jelas obyeknya sebagai sasaran yang dikaji;
2. Ada dan jelas cara atau langkah yang ditempuh atau metode dan pendekatan untuk mengkaji obyek tersebut;
3. Ada dan jelas sistematikanya;
4. Ada dan jelas tujuannya

Oleh karena itu, eksistensi dan pengetahuan dapat dikatakan sebagai bidang studi atau disiplin ilmu yang harus memenuhi keempat sifat tersebut, seperti halnya ilmu-ilmu sosial dan humaniora, naturalisme dan agama, dan seterusnya. Mengingat bahwa politik adalah ilmu dan bidang pengetahuan, sangat penting bagi pemerintah untuk menunjukkan sifat-sifat ini.

5.3 Metodologi Analisis Ilmu Pemerintahan

Aspek fundamental ilmu yang mencakup objek dan bentuk material dalam mengejar kebenaran ilmiah, meliputi fakta dan data, fenomena, pengetahuan, teori, paradigma, variabel, proposisi, proposisi, dan metode untuk menganalisis kebenaran ilmiah. Selain itu, ada objek dan bentuk material. Metode ilmiah adalah cara yang digunakan sains untuk maju dan cara yang digunakan sains untuk memajukan dirinya sendiri. Istilah "metodologi" mengacu pada istilah umum yang mencakup berbagai macam pendekatan yang diteliti secara ilmiah, termasuk jenis, fase, dan jenis pendekatan.

Metode dapat diterapkan baik dari segi pendekatan metode ilmiah melalui metode penelitian teoretis maupun pragmatis melalui metode (kuantitatif dan kualitatif), jenis metode (deskriptif, analitik, dan deskriptif analitis), maupun berbagai metode (survey, historis atau sejarah, Kepustakaan, Kancan/Lapangan, dsb). Metode dapat dimanfaatkan dalam sejumlah bidang studi yang berbeda, termasuk: biologi, kimia, ilmu komputer, fisika, psikologi, sosiologi, dan astronomi, juga dalam hal ini Ilmu Pemerintahan.

Metode untuk menganalisis peristiwa, fakta, dan data merupakan inti dari metodologi ilmu pemerintahan, yang kemudian digunakan untuk memberikan wawasan baru dan kemajuan teoretis yang memajukan bidang ilmu dan praktik pemerintahan. Manfaat dan tujuan untuk kemajuan

pengetahuan teoretis epistemologis dan pengetahuan pragmatis aksiologis dapat dicapai melalui penerapan metodologi ilmu pemerintahan. Pendekatan, jenis, dan jenis metodologi penelitian dapat dimanfaatkan dengan metodologi ilmu pemerintahan untuk memperoleh, menemukan, mencari, menjelaskan, dan menganalisis pemerintahan.

5.4 Pendekatan-Pendekatan Dalam Analisa Ilmu Pemerintahan

Ada tiga pendekatan yang dapat digunakan dalam melakukan pengkajian dan analisis ilmu pemerintahan. Diantaranya adalah: Pendekatan Eklektik, Pendekatan Integratif, dan Pendekatan terapan.

5.4.1 Pendekatan Eklektik Dalam Analisa Ilmu Pemerintahan

Analisis Ilmu Pemerintahan dengan pendekatan Eklektis sebagian besar bahannya berasal dari ilmu-ilmu pembantu seperti ilmu politik, sosiologi, ilmu hukum, dan sebagainya. Selanjutnya disusun secara berdampingan dan berurutan menampilkan informasi informasi yang bersifat paradigmatik konseptual, teoretis ataupun normatif.

Eklektisisme adalah sikap berfilsafat dengan mengambil teori yang sudah ada dan memilah mana yang disetujui dan mana yang tidak sehingga dapat selaras dengan semua teori itu. Hal ini dilakukan agar dapat mengambil nilai yang berguna dan dapat diterima. (Azizy, 2004)

Sebagai sikap filosofis, eklektisisme melibatkan identifikasi dan pemisahan teori yang valid dari yang tidak valid untuk mencapai keadaan harmonis di antara semua teori yang ada. Hal ini dilakukan agar nilai-nilai yang wajar dan bermanfaat dapat diperoleh kembali. Sistem yang saling berhubungan dikembangkan dari sana. Perspektif tentang filsafat ini berpendapat bahwa para filsuf dapat bertahan tanpa

berusaha keras untuk pemikiran mereka sendiri dengan hanya menganalisis tulisan-tulisan para filsuf lain dan menggabungkan kebenaran tertentu. Ketika konsep disatukan tanpa mempertimbangkan konteks aslinya atau kemampuannya untuk berdiri sendiri, kita mendapatkan sinkretisme, yang buruk bagi semua orang. Ahli eklektik percaya bahwa upaya semacam ini adalah cara paling efektif untuk menerapkan semua ide yang berguna. Misalnya dalam ranah akademisi, kemasyarakatan, politik, kemasyarakatan, dan sebagainya.

5.4.2 Pendekatan Integratif Dalam Analisa Ilmu Pemerintahan

Analisis Ilmu Pemerintahan dengan pendekatan Integratif dilakukan dengan mencari informasi yang dipetik dari berbagai disiplin ilmu yang berbeda-beda, disaring dan dipertimbangkan kemudian diintegrasikan menuju ke arah yang terpadu. Pengetahuan baru yang terintegrasi secara paradigmatis maupun secara teoretis berbeda sama sekali dengan disiplin ilmu yang semula merupakan induknya.

Pendekatan Integratif didefinisikan sebagai kajian yang menggunakan cara pandang dan atau cara analisis yang menyatu dan terpadu (Noor, 2018). Pendekatan integratif-interkoneksi adalah pendekatan yang berusaha saling menghargai; keilmuan umum dan agama, sadar akan keterbatasan masing-masing dalam memecahkan persoalan-persoalan. (Hidayat, 2014), (Susanto, 2015).

Pendekatan Integratif atau terpadu diartikan juga sebagai rancangan kebijaksanaan pengajaran dengan menyajikan bahan-bahan pelajaran secara terpadu, yaitu dengan menyatukan, menghubungkan, atau mengaitkan bahan pelajaran sehingga tidak ada yang berdiri sendiri atau terpisah-pisah. Pendekatan terpadu terdiri dari dua macam :

- a) Integratif Internal, yaitu keterkaitan yang terjadi antar bahan materi itu sendiri, misalnya subjek kajian ilmu pemerintahan dengan kajian ilmu administrasi negara.
- b) Integratif Eksternal, yaitu keterkaitan antara bidang studi yang satu dengan bidang studi yang lain, misalnya bidang studi ilmu pemerintahan dengan hukum lingkungan dengan tema kebijakan penghijauan, maka analisis dapat dilakukan dengan cara mengkaji kebijakan dari ilmu pemerintahan dan menghubungkannya dengan pembahasan seputar pelestarian lingkungan sehingga terintegrasi adanya kebijakan penghijauan.

5.4.3 Pendekatan Terapan Dalam Analisa Ilmu Pemerintahan

Ilmu pemerintahan terapan berkaitan erat dengan praktek pemerintahan, dengan fungsi memperbaiki praktek-praktek penyelenggaraannya menuju pemerintahan yang baik. Ilmu pemerintahan terapan merupakan pengetahuan yang bersifat empiris, dengan memperhatikan aspek normatif. Ilmu pemerintahan terapan sangat terkait pada nilai-nilai setempat.

Poelje adalah karya sastra paling awal yang secara eksplisit mencoba menetapkan studi tentang pemerintahan sebagai disiplin ilmu tersendiri. Definisinya tentang ilmu pemerintahan sebagai ilmu terapan (*applied sciences*) meniscayakan penggunaan sumber daya dari disiplin akademik lainnya. Hal ini berlaku sama untuk semua ilmu yang merupakan ilmu terapan.

Manusia adalah aspek integral dari masyarakat negara, itulah sebabnya ilmu pemerintahan mencurahkan begitu banyak ruang dan waktu untuk membahasnya. Dengan demikian, sangat jelas bahwa fokus ilmu pemerintahan, dalam arti luas, adalah pada layanan publik (institusi pemerintah). Tujuan dari studi pemerintahan adalah untuk memaksimalkan kepuasan masyarakat secara keseluruhan tanpa menggunakan

cara kriminal untuk mencapai tujuan tersebut. Istilah "bahagia" dapat memiliki dua arti berbeda, yang satu mengacu pada kesejahteraan emosional suatu kelompok dan yang lainnya mengacu pada kesejahteraan spiritual kelompok tersebut. (Rahimallah, 2022)

Kita semua tahu bahwa ilmu pemerintahan pada umumnya dianggap sebagai ilmu misterius akhir-akhir ini. Hal ini cukup bisa dimaklumi mengingat perkembangan ilmu pemerintahan masih relatif muda. Sejarah perkembangan dan lahirnya ilmu ini dimulai sebelum Perang Dunia II dengan seorang ilmuwan Belanda bernama Van Poelje, dan berlanjut sejak saat itu sebagai ilmu pemerintahan.

Pengabdian Van Poelje meliputi mempelajari struktur dan fungsi pemerintahan dari tradisi hukum, kemudian mengembangkan tradisi tersebut dengan menggunakan wawasan ilmu-ilmu sosial. Van Poelje bekerja dengan sukses selama bertahun-tahun dalam struktur dan fungsi pemerintahan, tetapi terjebak dalam disiplin ilmu politik, dan tidak menjadi mandiri dan diakui oleh komunitas ilmiah hingga setelah tahun 1970-an. (Poelje, 1953)

Dalam perkembangannya, ilmu pemerintahan baik hukum, ilmu politik, ekonomi maupun sosiologi selalu berada dalam koridor disiplin ilmu sosial. Pada masa itu di Eropa Barat, ilmu pemerintahan didominasi oleh ilmu hukum, karena fenomena pemerintahan selalu dianggap sebagai bagian dari ilmu hukum. Masalah pemerintahan selalu dianggap dapat diselesaikan dengan penerapan ketentuan hukum yang tepat dan benar mengenai masalah tersebut. Studi tata pemerintahan sering dipandang kurang luas dibandingkan kegiatan pejabat pemerintah dalam menegakkan hukum administrasi dan pemerintahan nasional.

Pada saat itu, studi tentang pemerintahan sering dipandang sebagai ilmu politik, dan proses pemerintahan suatu negara sering dianggap sebagai bagian dari, atau esensi dari

cara kerja sistem politik. Oleh karena itu, gejala pemerintahan selalu dianggap sebagai bagian dari ilmu politik. Tentu harus kita akui bahwa dalam perkembangan ilmu pemerintahan, hasil penelitian ilmu sosial yang menyelidiki fenomena pemerintahan selalu menjadi yang utama. Jadi bukan hal yang aneh jika ada ilmu yang berkembang seperti ini, bahkan jika akhirnya menjadi mandiri.

5.5 Penutup

Dari pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa ilmu pemerintahan dalam analisis dan penelitiannya juga menggunakan metodologi dan pendekatan-pendekatan. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam ilmu Pemerintahan juga menggunakan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif, namun sebagai ilmu sosial tentunya ilmu pemerintahan dalam pengkajiannya lebih banyak menggunakan metode penelitian kualitatif yang didasarkan oleh pandangan dan perspektif. Sedang jenis metode, yaitu deskriptif, analitik, dan deskriptif analitis, maupun berbagai metode, yaitu survey, historis atau sejarah, Kepustakaan, Kancah/Lapangan, dsb.

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam analisa ilmu pemerintahan diantaranya dengan menggunakan pendekatan eklektis, yaitu dengan mengambil teori yang sudah ada dan memilah mana yang disetujui dan mana yang tidak sehingga dapat selaras dengan semua teori itu. Kemudian pendekatan integratif yaitu dengan mencari informasi yang dipetik dari berbagai disiplin ilmu yang berbeda-beda, disaring dan dipertimbangkan kemudian digabungkan menjadi satu simpulan yang terpadu. Pendekatan yang terakhir adalah pendekatan terapan, yaitu keterkaitan ilmu pemerintahan dengan praktek pemerintahan, dan menganggap ilmu

pemerintahan sebagai bagian dari ilmu terapan (*applied sciences*).

DAFTAR PUSTAKA

- Azizy, A. Qodri. 2004. Hukum Nasional: eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum. Jakarta, Teraju.
- Hidayat, Muslih. 2014. Pendekatan integratif-interkonektif: tinjauan paradigmatis dan implementatif dalam pembelajaran pendidikan agama islam. TA'DIB, Vol. XIX, No. 02, Edisi November .
- Ibrahim, Abd Halil Hi; Supriatna, Thahja. 2020. Epistemologi Pemerintahan: Paradigma Manajemen, Birokrasi, dan Kebijakan Publik. Yogyakarta, Gramasurya.
- Karniawati, Nia. 2017. HAKEKAT ILMU PEMERINTAHAN (Kajian Secara Filsafat). Jurnal Ilmu Pemerintahan, CosmoGov 1(2):205. DOI: 24198/cosmogov.v1i2.11833
- Nazir, Moh. 2009. Editor, Risan Sikumbang, Metode penelitian, Bogor, Ghalia Indonesia.
- Noor, Fuad Arif. 2018. Pendekatan integratif dalam studi islam. ISLAMUNA: Jurnal Studi Islam 5(1). DOI: 10.19105/islamuna.v5i1.1904
- Poelje, G. A. van. 1953. Pengantar umum ilmu pemerintahan. penerjemah, B. Mang Reng Say. Jakarta, Soeroengan.
- Rahimallah, Muhammad Tanzil Aziz. 2022. Ilmu pemerintahan: perkembangan dari masa klasik sampai kontemporer (seri review buku). IPDN Project. November. DOI: 10.31219/osf.io/5t4z9.
- Ruslan, Rosady. 2004. Metode Penelitian: Public Relations dan Komunikasi. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Siswanto. 2015. Perspektif Amin Abdullah tentang Integrasi-Interkoneksi dalam Kajian Islam. Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam 3(2):376. DOI: 10.15642/teosofi.2013.3.2.376-409
- Soehartono, Irawan. 2002. Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu

Sosial Lainnya, Bandung: Remaja Rosdakarya.

BAB 6

PERKEMBANGAN DAN PERTUMBUHAN ILMU PEMERINTAHAN

Oleh Kristhiana Anthonia Laratmase

6.1 Pendahuluan

Pemerintahan berasal dari kata pemerintah, yang paling sedikit kata “perintah” tersebut memiliki empat unsur yaitu, ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak saling memiliki hubungan, pihak yang memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan.

Lahirnya suatu bangsa, pasti memiliki latar belakang sejarah yang berbeda walaupun semuanya tidak memiliki latar belakang sejarah tersendiri baik itu nasional maupun lokal, untuk memenuhi kehidupan masa lalu suatu bangsa dan perkembangannya, harus memahami proses rekonstruksi sejarah, karena dengan adanya perkembangan sejarahlah dapat di pahami oleh masyarakat.

Sejarah perkembangan ilmu pemerintahan menjelaskan bagaimana tatanan kehidupan masyarakatnya masih sederhana masih asli, memiliki ciri-ciri karakter yang khas berdasarkan adat istiadat leluhur yang berlaku terus yang memiliki ciri khas sendiri dan tidak terpengaruh dari luar. Dalam hal ini ilmu pemerintahan disebut ilmu murni, dilihat dari adat-istiadat yang terkandung nilai-nilai yang harus di junjung tinggi oleh lapisan masyarakat.

Pemerintahan juga merupakan sebuah ilmu seni mengapa disebut sebagai seni karena ada banyak pemimpin

pemerintahan yang tanpa memiliki dasar pendidikan pemerintahan, tetapi dia mampu berusaha serta dengan kharismaniknya menjalankan roda pemerintahan. Pada era sekarang ini, banyak sekali terjadi disiplin ilmu mampu memenuhi syarat yaitu dapat dipelajari dan diajarkan, memiliki objek, baik materia maupun forma.

Dalam mempelajari ilmu pemerintahan, kita dapat mengetahui bagaimana cara dan ciri dari pemerintahan. Dapat mengetahui bahwa pengertian terdapat adanya suatu perbedaan antara pemerintah dan pemerintahan. Pemerintahan sebagai perbuatan atau cara dalam memerintah. Adanya ilmu pemerintahan di ajarkan untuk melayani masyarakat serta kondisi yang memungkinkan anggota masyarakatnya.

6.2 Perkembangan Ilmu Pemerintahan

Perkembangan ilmu pemerintahan di tentukan oleh perkembangan masyarakat dari faktor-faktor lain yang melandasi berkembangnya penduduk, melalui ancaman, perang dan penjarahan. Sebagaimana dalam ilmu pengetahuan telah menghasilkan sistem pemerintahan yang bertumpu pada kekuatan rakyat yang dikenal dengan istilah demokrasi, dari, oleh dan untuk rakyat, gagasan ini menyingkirkan kekuasaan absolut dan individual.

Berkembangnya ilmu pengetahuan tidak bisa dilepaskan dari semakin kompleksnya pemasalahan yang di hadapi manusia, sehingga setiap bidang ilmu yang berkembang dan membangun keterkaitan yang kuat antara sebuah imu dengan ilmu lainnya. Yang merupakan disiplin ilmu yang tertua karena sudah dipelajari sebelum masehi oleh plato dan Aristoteles, namun kemudian pemerintahan berkembang menjadi suatu seni kemudian menjelang abad XX menjadi ilmu pengetahuan terapan, karena dipergunakannya metode ilmiah dalam mempelajari gejala pemerintahan. Pada dewasa ini

pemerintahan berusaha keras untuk menjadi disiplin ilmu pengetahuan murni yang berdiri sendiri karena kebutuhan akan adanya ilmu pemerintahan itu sendiri.

Perkembangan pemerintahan secara berawal mulai dari tahap prasejarah hingga tahun 1993, ilmu pemerintahan telah menjadi ilmu yang multi disiplin dan mono disiplin dengan penekanan pada umum, organisasi dan pengambilan keputusan, perencanaan dan pelaksanaan serta prinsip swastanisasi dalam pemerintahan.

Dalam perkembangan ilmu pemerintahan, sekarang ini dapat dilihat dari penerapan ilmu yang dibedakan atas ilmu murni (*pure science*), ilmu praktis (*applied science*) dan campuran. Untuk mempelajari dan melaksanakan koordinasi serta kemampuan memimpin bidang legislasi, eksekusi dan yudikasi dalam hubungan pusat dan daerah antar lembaga serta antar yang memerintah dengan yang diperintah.

1) Perkembangan Pemerintah

Perkembangan dari pemerintahan adalah penambahan dan atau tekanan penduduk, serta penguasaan oleh suatu pemerintah atau Negara. Kelebihan produksi dan penciptaan, kewajiban atas dasar timbal-balik merupakan cara-cara untuk mendapatkan kekuasaan atas sesama manusia atau kelompok masyarakat. Pihak yang memerintah menawarkan perlindungan hukum. Dan kesejahteraan, menyajikan kesentosaan bagi pihak yang diperintah.

2) Pemerintah Zaman Purba

Sejarah menunjukan bahwa ada sistem pemerintahan yaitu bangsa-bangsa inka dan Aztek. Sistem kerajaan Mesir dan Babilonia purba, kerajaan-kerajaan Persia beragam, Negara kota bangsa Romawi dan Yunani, kerajaan Bizantium, Negara-negara Hindu Kuno dan kerajaan Moghul, khalifah Arabia dan Negara-Negara Muslim.

Ada sistem pemerintahan eropa sejak keruntuhan sistem feodal sampai kepada abad absolutisme dan kemudian sistem-sistem pemerintahan kolonial.

a. Pemerintahan Inka

Kerajaan Inka, berdiri antara tahun 1200-1500 Masehi dan memiliki sistem pemerintahan despotisme. Raja Inka digambarkan sebagai titisan dari matahari. Dia juga adalah seorang penguasa absolut, dibantu di bawah kekuasaan raja. Depostisme adalah suatu bentuk pemerintahan yang ditandai oleh kekuasaan sewenang-wenang dan tak terbatas dari pihak penguasa. Rakyat selalu mematuhi ketentuan atau aturan yang sudah di tetapkan . Salah satu dari sekian banyak tugas mereka adalah melakukan kunjungan dari rumah ke rumah untuk menyaksikan agar para wanita menjadi istri dan ibu rumah tangga yang baik. Semua warga diatur dengan peraturan-peraturan yang ketat. Mereka yang di sudah uzur atau lanjut usia menerima pensiun dalam bentuk bahan makanan dan kebutuhan hidup lainnya.

Pemikiran tentang bentuk-bentuk pemerintahan dikemukakan oleh Plato dan Aristoteles. Bagaimana Plato dan Aristoteles menjelaskan tentang pemikirannya sebagai berikut :

a) Plato

Plato dan muridnya Aristoteles mengembangkan pemikiran mereka tentang pemerintahan Negara dan beragam bentuk Negara. Plato dan Athena (428-347 sebelum masehi) menyatakan bahwa pemerintahan mesti memiliki pengetahuan ilmiah mengenai permasalahan yang dimintai keputusannya. Dalam perkembangannya Plato merancang sebuah Negara ideal, dan memandang kehidupan bermasyarakat sebagai suatu sistem

yang saling mengisi. Dengan hidup bermasyarakat, dalam hal ini manusia meniadakan kekurangan dan memudahkan kebutuhan umum.

b) Aristoteles

Dalam monarki tidak terlalu penting pemerintahan oleh satu orang, karena tentunya seorang dari yang kaya. juga dalam demokrasi tidak mesti pemerintahan dari banyak orang, melainkan pemerintahan dari orang-orang yang miskin pemerintahan yang demokrasi itu buruk karena kenyataannya bahwa kebanyakan rakyat tidak berpendidikan dan berpengetahuan baik atau pemerintahan dari orang-orang yang miskin sehingga bentuk pemerintahan itu adalah pemerintahan yang dapat disebut sebagai mobokrasi atau pemerintahan dari suatu gerombolan pengacau.

Aristoteles menemukan bahwa pemerintahan dari semua zaman terkutat pada dua hasrat kekuasaan, yang satu didasarkan kekuasaan, dan yang lainnya atas dasar kesejahteraan orang banyak. Karena itu di temukan suatu imbalan yang adil antara dua kepentingan yang perlu diadakan pemisahan antara bentuk pemerintahan itu sendiri dan kinerjanya yang nyata.

b. Polis Yunani

Polis Yunani berasal dari perkiraan Barat tentang pemerintahan dan politik adalah Negara kota (polis) bangsa yang dimaksud dengan polis adalah sebuah Negara yang terdiri dari hanya sebuah kota dengan daerah yang terletak di sekitarnya (misalnya seperti Yogyakarta). Yang mana Organisasi pemerintahannya hampir sama, yaitu sebuah permusyawaratan rakyat

atau sebuah eklesia, yang pada hakikatnya memangku kekuasaan tertinggi, berdaulat di mana semua warga yang dewasa ikut duduk sebagai anggotanya.

c. *Imperium* Romawi

Kebudayaan Romawi menyerap banyak dari bangsa Yunani, namun bangsa Romawi menunjukkan diri sebagai penguasa dan pembangun. Pada masa di itu juga terjadi penyebaran penduduk yang mana bangsa Yunani menyerbu ke timur dan bangsa Romawi menyebar ke Eropa Barat dan kawasan Laut Tengah.

d. Pemerintahan Romawi

Romawi merupakan, sebuah Republik Oligarik yang mana kepemimpinan berada ditangan sejumlah kecil manusia. Penduduk terbagi ke dalam dua kelas: kaum Patrisian dan Kaum *Plebeyer* (kaum miskin). Hanya kaum Patrisian yang menyandang hak penuh sebagai warga Negara. Mereka menguasai konsulat dan senat. Dalam hal ini pemangku wewenang politik yang tertinggi dalam pelaksanaan kekuasaan, masing-masing memiliki hak veto terhadap keputusan rekannya.

1) Objek Ilmu pemerintahan

Objek adalah sesuatu yang menjadi pokok pembicaraan sehingga dengan demikian objek merupakan apa yang akan diamati, diteliti dan dipelajari dan di bahas. Jadi yang membedakan suatu disiplin ilmu objek formanya. Objek formanya bersifat khusus dan khas yaitu hubungan-hubungan pemerintahan dengan sub-subnya. Baik hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah, hubungan yang diperintah dengan yang memerintah, hubungan antar lembaga serta hubungan antar departemen.

Objek material ilmu pemerintahan secara kebetulan sama dengan objek material ilmu politik, ilmu administrasi Negara dan ilmu Negara itu sendiri. Peristiwa pemerintahan dapat bersifat sekali atau berulang kali sedangkan gejala pemerintahan dapat bersifat sentralis ataupun sentralisasi.

2) Ilmu Pemerintahan sebagai Disiplin Ilmu

Secara garis besar pandangan umum ilmu pemerintahan terbagi menjadi 4 bagian yaitu :

1) Cabang-cabang Ilmu Pengetahuan

Ilmu pengetahuan secara garis besar terdiri dari ilmu-ilmu sosial dan ilmu-ilmu eksata. Ilmu sosial meliputi, filsafah pemerintahan, politik, administrasi, hukum Negara, ekonomi, jiwa, kepariwisataan, sejarah, komunikasi, akuntansi management, kepustakaan, antropologi dan lain-lain.

2) Kualifikasi ilmu pengetahuan

Untuk mengetahui keberadaan ilmu pemerintahan diantar ilmu-ilmu lainnya adalah mengetahui kualifikasi atau penggolongan ilmu pengetahuan berdasarkan objek ilmu pemerintahan dibagi menjadi 2 golongan yaitu ilmu murni dan ilmu praktis

3) Kajian ilmu pengetahuan

Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari dan mengetahui apakah ilmu pemerintahan termasuk dalam ilmu pengetahuan ada 3 yaitu ;

- a. Ontologi adalah teori tentang adanya realitas. Dalam Meninjau persoalan secara ontologis, yaitu mengadakan penyelidikan terhadap sifat dan realitas dengan refleksi resional serta analisis dan sintetis logika.
- b. Epistemologi : bagaimana cara membedakan pengetahuan tersebut, dalam hal ini perlu mempertanyakan sebagai berikut; bagaimana

terminologinya, filsafatnya, sistematikanya, teori atau teknik, asas dan dasarnya.

- c. Aksiologi : diartikan sebagai penerapan ilmu pengetahuan dari klarifikasinya kemudian dengan melihat tujuan ilmu itu sendiri dan perkembangannya.

6.3 Pertumbuhan Ilmu Pemerintahan

Pertumbuhan ilmu pemerintahan modern ditandai dengan lahirnya kameralistik (Ilmu Perbendaharaan) yang telah berkembang di Prusia pada awal abad ke-18. Di mana Negara harus mengurus lapangan pekerjaan pangan sendiri sehingga berdasarkan hak itu perlu adanya usaha agar didalam setiap jabatan yang ada harus terpenuhi sebagaimana dibutuhkan untuk memenuhi kesejahteraan umum.

Ilmu pemerintahan dipengaruhi oleh ilmu-ilmu lain misalnya humaniora (sosiologi, psikologi, psikologi-sosial, antropologi, ekonomi, politikologi) dan di tandai dengan penanganan antar disiplin, dengan pendayaguna dari teori-teori, istilah-istilah serta metode dari semua ilmu selain dipercaya dengan filsafat. Oleh karena itu di lihat dari pertumbuhan ilmu pemerintahan dari zaman dahulu, dapat di katakana bahwa ilmu pemerintahan merupakan ilmu yang selalu berkembang dan tidak dibatasi oleh kewajiban-kewajiban lainnya.

Pemerintahan merupakan suatu gambaran tentang bagaimana pada permulaan pemerintahan setelah terbentuk dan bagaimana pemerintahan itu telah berkembang dari 3 tipe masyarakat yaitu masyarakat setara, masyarakat bertingkat, dan masyarakat berlapis.

1. Masyarakat setara (*Samenlevingen en Gelijkheid*)

Masyarakat setara merupakan masyarakat yang sangat primitif, misalnya manusia pemburu yang belum mengenal tentang kehidupan modern terhadap suatu kebutuhan permanen akan para pemimpin. Seperti Produksi makanan, pendidikan keturunan, pembagian kerja, menuntut akan adanya pemimpin.

2. Masyarakat bertingkat (*Samenlevingen met Rangorde*)

Masyarakat bertingkat dapat di kategorikan seperti kaum lelaki yang mana kaum lelaki berambisuis dan energik di bandingkan dengan kaum wanita. Kaum wanita bisa menghasilkan lebih banyak dari yang dikonsumsi sendiri. Lewat kekerabatan, keturunan, dan perkawinan, posisi sebagai pemimpin dimapankan dan dilanjutkan oleh para pengikut kelompok masyarakat.

3. Masyarakat berlapis (*Gelaagde Samenlevingen*)

Yang maksudnya masyarakat berlapis adalah kepemimpinan yang telah disiapkan untuk mendapatkan kebutuhan hidup yang tidak sama dan merata bagi semua warga masyarakat.

Dari pertumbuhan Ilmu Pemerintahan dari zaman Purba sampai pada zaman Baru. Dapat kita lihat bahwa perkembangan serta pandangan-pandangan tentang politik dan pemerintahan memisahkan pandangan tentang filsafat, etika dan Theologia. Ilmu pemerintahan sangat berkembang dan bertumbuh dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip tatanan suatu Negara yang berdaulat. Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang dengan melihat pertumbuhan ilmu pemerintahn yang absolut serta memiliki kesatuan yang utuh berdasarkan pada nilai-nilai bangsa itu sendiri. Pada dasarnya ilmu pemerintahan tidaklah mungkin dapat berdiri sendiri tanpa bantuan ilmu lain ketika berjuang mengidentifikasi diri secara jelas dan mandiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Djopari. Ratnia Solihah. (n.d). Sejarah Pertumbuhan Pemerintahan dan Ilmu Pemerintahan. *Ilmu Pemerintahan*, 1-53.
https://books.google.com/books/about/dasar_dasar_ilmu_pemerintahan.html?id=55IFEAAAQBAJ
<https://repository.penerbiteureka.com/media/publications/556912-pengantar-ilmu-pemerintahan-603e74df.pdf>
- Labolo, Muhadam. 2007.*Memahami Ilmu Pemerintahan*, Jakarta : Kelapa Gading Permai.
- Ningrat,Bayu Surya.1992. *Mengenal Ilmu pemerintahan*, Jakarta : Rinek cipta
- Syafie, Inu Kencana. 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia* Jakarta : Rineka Cipta.

BAB 7

TANTANGAN DAN MASA DEPAN ILMU PEMERINTAHAN

Oleh Iwan Henri Kusnadi

7.1 Ilmu Pengetahuan dan Tantangannya

Perkembangan ilmu pengetahuan telah menjadi sebuah mata rantai kehidupan yang tak bisa dipisahkan dengan kehidupan dan eksistensi manusia. Ilmu pengetahuan yang semakin maju menjadi bukti nyata akan pemikiran manusia yang semakin kompleks. Hasil-hasil pemikiran manusia dalam keilmuan ini dapat dilihat melalui kemajuan dalam berbagai bidang, seperti dalam bidang teknologi dan komunikasi, kita telah mengenal komputer, laptop, ponsel, i-pad, dan internet, serta diluncurkannya satelit yang saat ini mengorbit bumi untuk membantu proses transmisi. Selain itu, di bidang kedokteran kita telah tak asing dengan istilah kemoterapi, kloning, vaksin, dan USG. Semua kemajuan ilmu pengetahuan itu diciptakan dengan tujuan membantu manusia dalam menjalani hidupnya. Akan tetapi, perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin maju ini juga diiringi dengan tantangan yang semakin berat juga. Ilmu pengetahuan yang semakin kompleks dan penemuan dalam berbagai segi yang semakin mutakhir menjanjikan risiko yang semakin tinggi pula, baik bagi manusia maupun ilmu pengetahuan itu sendiri. Pola pikir manusia telah berkembang begitu pesat. Manusia tak lagi mempercayai sesuatu berdasarkan mitos belaka, mereka mulai melakukan analisa secara mendalam dan kritis atas segala sesuatu. Pada masa ini mereka tak hanya berpikir kritis saja, tapi juga memikirkan dan mempertimbangkan aspek guna

terhadap segala sesuatu. Semua peristiwa yang terjadi di muka bumi ini dapat diteliti melalui berbagai disiplin ilmu tertentu, baik masalah sosial maupun ilmiah. Hal ini dapat dilakukan melalui telaah berdasarkan berbagai pendekatan, dari pendekatan astronomi, fisika, kimia, sosiologi, sampai psikologi. Berbagai pendekatan dari berbagai disiplin ilmu ini telah mengalami spesialisasi studi sehingga satu bidang dapat mengkaji permasalahan di bidangnya dengan lebih optimal. Akan tetapi spesialisasi studi seperti ini juga menimbulkan sebuah problema, yakni arogansi disiplin ilmu yang menganggap bidangnya yang paling penting, mengabaikan eksistensi ilmu sebagai hal yang selayaknya dikembangkan demi kesejahteraan umat manusia, bukan menimbulkan kekacauan sosial atau bahkan kekacauan alam.

A. Gambaran Perkembangan Ilmu di Masa Depan Ilmu merupakan modal utama, subyek, dan juga obyek atas perkembangan segala sesuatunya yang ada di dunia ini. Manusia berlomba-lomba melakukan pengembangan, penelitian, dan riset sehubungan dengan ilmu pengetahuan. Bahkan agama menegaskan pentingnya menuntut ilmu. Namun, apakah ilmu itu? Sudah tepatkah manusia dalam mencari dan memanfaatkannya? Ilmu berasal dari bahasa Arab 'alimaya'lamu, atau kata sains dari scio atau scire yang berarti untuk mencari tahu (to know dalam bahasa Inggris). Secara terminologi, ilmu atau sains adalah pengetahuan dengan ciri-ciri, tanda-tanda, dan syarat-syarat tertentu. Menurut Ensiklopedia Indonesia, ilmu pengetahuan yaitu suatu sistem dari pelbagai ilmu pengetahuan tertentu yang telah diatur dan disusun sedemikian rupa menurut asas-asas tertentu sehingga menjadi kesatuan yang utuh sebagai hasil penelitian yang telah dilaksanakan secara teliti dengan menggunakan metode tertentu. Ilmu secara bahasa adalah pengetahuan tentang sesuatu yang disusun secara sistematis menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan

gejala-gejala tertentu di bidang tersebut (Bakhtiar:2005). Ilmu memiliki sifat fleksibel, akan terus berkembang sesuai perkembangan zaman atau kebudayaan dan juga kemampuan berpikir manusia. Kemajuan perkembangan ilmu dalam berbagai segi ini bertujuan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Akan tetapi, selalu ada sisi negatif di tiap hal yang eksis di muka bumi ini. Perkembangan dan kecanggihan sebuah konsep ilmu turut menimbulkan kekhawatiran bagi manusia. Ilmu dan teknologi yang semakin maju juga menimbulkan degradasi nilai. Manusia tergantung pada benda-benda yang dikembangkan dari ilmu pengetahuan, seolah tak bisa bekerja tanpa mereka. Akan tetapi produk tersebut memang dibutuhkan untuk membantu manusia dalam melakukan pekerjaan mereka. Hingga saat ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi begitu pesat. Telah banyak fasilitas yang tercipta demi terwujudnya kemudahan dalam aktivitas manusia. Sejak suksesnya penelitian rekayasa genetika terhadap makhluk hidup yang telah dirintis oleh Dr. Gurdon dari Medical Research Council Laboratory of Molecular Biology, Universitas Cambridge, Inggris pada tahun 1961, teknologi ini seperti menjadi 'mainan baru' yang tak bosan diotak-atik oleh para ilmuwan genetika. Jika pada masa itu mereka berhasil melakukan kloning pada katak, kapankah teknologi tersebut berhasil pada manusia? Ide melakukan kloning pada manusia ini tampaknya terus menjadi perbincangan oleh berbagai kalangan, dan menjadi kontroversi. Teknologi kloning ini dikritisi oleh 19 negara Eropa pada tahun 1997 dengan menandatangani pakta yang menyebutkan bahwa mengklon manusia merupakan pelanggaran martabat manusia dan merupakan penyalahgunaan ilmu. Belum lagi dalam perspektif agama teknik rekayasa genetika tak layak diteruskan karena terkesan membuat manusia berusaha menjadi tuhan, dengan memanipulasi teknologi untuk menciptakan makhluk hidup. Hal-hal apa saja yang bisa terjadi di masa yang akan datang?

Untuk menjawabnya, kita bisa melihat perkembangan yang terjadi pada masa ini dan melakukan prediksi. Sejumlah peristiwa yang terjadi tentunya telah memberikan gambaran atas apa yang akan kita hadapi di masa depan. Hal-hal tersebut adalah: a. Perubahan Lingkungan Hidup, meliputi: Jumlah penduduk yang bertambah, Krisis air bersih untuk kebutuhan rumah tangga dan industri, Krisis lahan untuk tempat tinggal, kawaasan industri, dan hutan, Rusaknya ekosistem, Musnahnya sejumlah organisme baik di darat maupun air, Meningkatnya suhu bumi karena efek rumah kaca, Meningkatnya risiko hujan asam; b. Degradasi Moral. Diprediksi pada masa yang akan datang masyarakat akan mengedepankan prinsip individualis dan kurangnya interaksi sosial. Dapat pula dikatakan akan terjadi krisis kemanusiaan karena gagasan, ide, atau ideologi yang tak utuh dan salah interpretasi.

Sondang P Siagian dalam Patologi Birokrasi Analisa, identifikasi dan terapinya (1994:1-34) intinya menjelaskan bahwa tantangan pemerintahan Indonesia kedepan berkisar pada tuntutan untuk memberikan respons terhadap beraneka ragam perubahan yang akan terjadi dalam masyarakat internal suatu bangsa, tingkat regional dan bahkan pada tingkat global.

- a) Pada tingkat nasional meliputi berbagai perubahan semua kehidupan dan penghidupan berbangsa dan bernegara dalam bidang politik, serta ekonomi social budaya, pertahanan keamanan, ilmu pengetahuan dan teknologi serta berbagai segi kehidupan lainnya.
- b) Pada tingkat regional dan global perubahan akan sangat kompleks, yang pada suatu sisi mendorong timbulnya kerja sama regional dalam berbagai bidang, disisi lain tidak mustahil akan menimbulkan persaingan yang sangat tajam. Kehidupan demokratis bermasyarakat, bernegara/berpemerintahan merupakan tuntutan semua komponen bangsa, yang akan serasi apabila setiap warga Negara

mampu menjaga dan memelihara keseimbangan hak dan kewajibannya, seperti hak menyatakan pendapat, hak memilih dan dipilih hak berserikat hak menjadi anggota organisasi politik berdasarkan keyakinan politiknya. Peroleh hak dikemungkinan bila warga Negara menuaikan kewajibannya, namun yang menjadi masalah adalah kecenderungan manusia untuk mendahulukan haknya ketimbang kewajibannya, hal ini menuntut birokrasi untuk merespon melalui pelaksanaan pendidikan politik. Terdapat tiga konotasi kemudian demokratis bagi birokrasi yang perlu perhatian :

Pertama, Kehidupan bernegara yang demokratis berarti berfungsinya dengan efektif semua lembaga kontitusional (fungsi legislative, eksekutif, dan yudikatif). *Kedua*, dalam mencapai tujuan politik, organisasi politik harus mendapat hak hidup, dengan peran sosialisasi kebijakan politik, pendidikan politik, partisipasi politik, penyalur aspirasi dan pengawasan social penyelenggaraan Negara.

Ketiga, terdapatnya aparat eksekutif yang benar benar berperan sebagai pelaksana utama kebijakan politik nasional yang telah disepakati bersama mitra kerjanya, yaitu sebagai abdi seluruh masyarakat, yang netral, transparan, dan kehidupan demokratis pada birokrasi itu sendiri.

Secara nasional birokrasi dituntut untuk segera dapat meningkatkan taraf hidup kesejahteraan masyarakat disamping spiritual juga yang bersifat materil seperti (1) Demokrasi ekonomi yaitu keadilan, pemerataan, pertumbuhan, kesenjangan social, kemiskinan, peningkatan kemakmuran. (2) Poptensi nasional yang ada untuk dijadikan dan dikembangkan menjadi kekuatan efekif mencapai tujuan nasional. (3) Tuntutan yang semakin meningkat akan pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, perumahan dll. (4) Kendala kendala yang

dihadapi yaitu keterbatasan kemampuan Negara menyediakan anggaran biaya berbagai program. (5) Pelestarian lingkungan dalam pengertian pembangunan berkelanjutan tanpa merusak lingkungan. Wahana yang paling efektif untuk meningkatkan mutu sumberdaya manusia adalah pendidikan dan pelatihan yang merupakan proses yang berlangsung seumur hidup, dan merupakan tanggungjawab bersama birokrasi dan masyarakat. Bagi birokrasi tantangannya berupa

- (1) Penciptaan iklim yang kondusif bagi terselenggarannya kegiatan diklat;
- (2) Tersedianya peraturan dan kebijaksanaan diklat sebagai pedoman semua pihak, (3) kegiatan pendidikan latihan berkualitas bagi masyarakat, dan bagi birokrat dengan dukungan anggaran memadai.

Birokrasi pemerintahan tidak bebas norma dan nilai yang berlaku di masyarakat, karenanya dalam mengembangkan budaya organisasi perlu memperhatikan kultur social yang dianut oleh masyarakat dan bangsa pada umumnya. Artinya bahwa dalam kehidupan modern sekalipun hendaknya tidak ada masyarakat terutama birokrat yang kehilangan jatidirinya sebagai warga bangsa. Untuk itu perlu mewaspadaikan akan dinamika perubahan kemajuan seperti pergeseran nilai budaya global, teknologi informasi, komunikasi, transformasi, yang bersifat revolusioner. Terorisme internasional, pertikaian teritorial yang melibatkan Negara tetangga, gerakan separatisme, berdasarkan pertimbangan sara, perdagangan narkoba, senjata nuklir dsb merupakan tantangan bahkan ancaman bagi pertahanan dan keamanan nasional yang menuntut aparat/birokrasi yang handal. Pada skala local perlu diwaspadai gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat berupa pembunuhan, perampokan, Pencurian, perkuliahian yang bisa melibatkan birokrat. Di bidang iptek yang harus dihadapi birokrasi yaitu :

(1) dengan mudahnya masyarakat mendapat akses pendidikan yang lebih tinggi maka birokrasi harus lebih teliti dan transparan dalam menetapkan, melaksanakan kebijaksanaannya sekaligus peluang untuk memanfaatkannya. (2) deengan gender banyak wanita karier, bagi birokrasi perlu pemikiran aspek kekaryaan, seperti persepsi pola dan gaya pengambilan keputusan, penilaian produktifitas, criteria perijinan terkait dengan peran sebagai seorang ibu rumah tangga, missal dengan jam kerja yang fleksibel, job sharing, pemanfaatan teknologi computer dan faksimil. (3) Dengan makin banyak lulusan pendidikan tinggi yang menjadi pegawai, birokrasi dituntut untuk melakukan gaya manajerial yang demokratis, (4) Birokrasi makin dituntut untuk pengadaan, penguasaan, penggunaan, computer. (5) Birokrasi dituntut meningkatkan kemampuan menyediakan informasi yang lengkap mutahir, akurat serta dapat dipercaya dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik. (6) Birokrasi dituntut bekerja dengan pendekatan kesisteman. Dalam satu kesatuan perespasi, gerak dan langkah manajemen.

7.2 Dinamika Ilmu Pengetahuan dan Tantangannya

Dalam tradisi sejarah, sains memfokuskan kajiannya dengan apa yang terjadi di masa lalu yang berkaitan dengan penemuan-penemuan ilmiah dan juga proses penemuan yang kompleks serta ide yang berkembang dari waktu ke waktu. Fokus ini juga berarti perlu untuk melihat perilaku suatu masyarakat yang diduga telah menyumbang terhadap fenomena ilmiah sepanjang sejarah. Dalam rangka inilah suatu peradaban bangsa tertentu patut dihargai atas kontribusinya terhadap perkembangan ilmu pengetahuan yang saat ini menjadi monopoli Barat dan Amerika. Banyak penulis sejarah ilmu pengetahuan berpendapat bahwa fenomena ilmu pengetahuan sekarang ini

merupakan hasil mutlak dari usaha daya pikir Barat dan berusaha mengesampingkan sumbangan bangsa lain. Mereka terlanjur tertarik dengan keyakinan ini, karena fakta menunjukkan bahwa revolusi ilmu pengetahuan memang terjadi di Eropa Barat. Bagaimanapun, melabelkan semua khasanah ilmu pengetahuan hanya kepada Barat adalah kurang tepat. Padahal pada kenyataannya bangsa dan peradaban lainnya seperti Muslim dan fakta-fakta di atas, yaitu Yunani, Cina, dan India mempunyai kontribusi yang sangat kuat dan luas, baik langsung maupun tidak langsung kepada fenomena ilmu pengetahuan. Problem keilmuan yang sudah puluhan tahun disampaikan oleh Prof. al-Attas. Karena tantangan terbesar menurutnya adalah ‘tantangan ilmu pengetahuan’ (the challenge of knowledge). Dan menurut Prof. Wan, buah fikiran Prof. al-Attas yang telah menyumbang besar kepada revolusi pemikiran dan perkembangan institusi pendidikan tinggi umat Islam sejak pertengahan tahun 1970-an adalah mengenai ilmu yang bersifat tidak neutral, bahwa ilmu-ilmu masa kini telah diserapi oleh unsur-unsur pandangan alam Barat sekular. (Prof. Dr. Wan Mohd Nor Wan Daud, “Pengantar Islam dan Sekularisme: Suatu Karya Agung Kullî”, dalam Prof. Dr. SMN al-Attas, *Islam dan Sekularisme*, Terj. Dr. Khalif Muammar (Bandung: PIMPIN bekerjasama dengan CASIS, 2011), xviii-xix).

Anggapan umum bahwa kemajuan sains dan teknologi di dunia Barat (Eropa dan Amerika) sejak beberapa abad sampai dekade terakhir ini disebabkan antara lain dan terutama sekali adalah oleh faham sekularisasi yang mengakhiri dengan apa yang disebut sebagai *zaman kegelapan*, dan asumsi ini memang ada benarnya mengingat hubungan yang tidak harmonis sepanjang sejarah antara dogmatis Gereja dan rasionalisme para saintis. Konflik berkepanjangan inilah akhirnya menjadi semakin sengit dan bahkan satu dengan yang lain berusaha menjatuhkan dan tidak segan-segan menindasnya (Dirnbeck,

2001: 29)maupun tidak langsung kepada fenomena ilmu pengetahuan.

Apakah tantangan yang dihadapi ilmu pemerintahan dewasa ini? Pertanyaan ini muncul di tengah kelesuan kita menghadapi realitas pemerintahan yang kian menggelisahkan. Di kuadran eksternal, ekologi pemerintahan kita berhadapan dengan anomali demokrasi, revolusi industri, global warning, transformasi digital dan pandemi. Sementara di internal domestik, kita kesulitan membangun trust pemerintahan yang kian defisit, disamping gagap merekonstruksi tata kelola pemerintahan pada level praktikal.

Pasca runtuhnya orde baru (1998), peran ilmu pemerintahan datang dengan gagah berani. Absennya ilmu politik sepanjang 32 tahun coba disubstitusi oleh ilmu pemerintahan baik secara akademik maupun praksis. Dari aspek akademik paradigmanya diubah, bukan dari atas tapi dari bawah, bukan dilayani tapi melayani, dan bukan mendayung tapi mengarahkan. Pada level praksis, ilmu pemerintahan bukan semata membentuk profile birokrasi publik robotik sebagai pelayan administrasi, juga bukan pula alat kekuasaan, tapi alat negara yang berdiri netral. Dengan perubahan paradigma itu, ilmu pemerintahan mendapat tempat yang layak di masyarakat, setidaknya lebih dari 20 tahun terakhir. Derajatnya menanjak tak hanya di level sarjana, demikian pula magister dan doktoral ilmu pemerintahan. Ditengah melimpahnya infrastruktur dan sumberdaya itu, soalan kita sejauhmana kontribusi ilmu pemerintahan dalam menjawab masalah di atas? Bila ilmu pemerintahan tak juga berkontribusi senyatanya, peran itu dengan sendirinya akan digantikan oleh ilmu sosial seperti politik, hukum dan administrasi.

Memang, persoalan pemerintahan tak bisa dilihat sebagai masalah nomotetik semata. Sebagai bagian dari masalah sosial, isu pemerintahan pun dapat berulang walau

ruang dan waktunya pasti berbeda. Itulah sebabnya masalah dalam pemerintahan cenderung bersifat idiografik. Trend ini karena persoalan pemerintahan bersifat sekali lalu hingga menjadikannya mirip studi kasus. Masalah kegagalan pemerintahan di masa orde lama memang terulang kembali di masa orde baru. Bukan mustahil menjadi hal yang sama di masa reformasi, meski konteks, ruang, dan waktunya tetap berbeda. Ini sedikit perbedaan antara ilmu sosial dan ilmu alam. Satu contoh. Ketika revolusi Lenin mampu menumbangkan kekaisaran Tsar di Rusia pada 1917, Amerika pun akhirnya mampu mengusir kolonisasi Inggris pada 1765. Demikian pula ketika Revolusi Perancis berhasil menenyapkan monarkhi absolut tahun 1789. Tentu saja ketiga revolusi itu tak bisa diulang, karena syarat *ceteris paribus* tak tersedia. Dalam kasus yang sama tak mungkin kita mengulang kembali peristiwa di tahun 1945 (kemerdekaan), 1966 (orde baru) dan 1998 (reformasi). Boleh jadi isunya sama, namun lokus dan tempusnya berbeda. Sekali lagi hal ini tak dapat diulang, sekalipun sifat-sifatnya mungkin dapat dikategorisasi. Persoalan di perangkat keilmuan kita adalah, apakah teori dan metodologi masih cukup kompatibel dalam menjawab masalah-masalah di atas. Ataupun ilmu pemerintahan bernasib sama dengan kasus ilmu politik dan administrasi yang pernah mengalami dekonstruksi di masa orde baru.

Kemalasan ilmu pemerintahan mengembangkan invention, inovasi & novelty, serta minimnya pemanfaatan ragam metodologi menjadikan ilmu pemerintahan seperti terpojok di sudut kelas. Ilmu pemerintahan kembali ke masa klasiknya, menjadi ilmunya para pejabat, membentuk birokrat robotik yang ditandai oleh eksklusivisme, serta minimnya kontribusi ilmiah dan praktis dilapangan pemerintahan. Itu sedikit kritik yang dapat dicatat. Sebagai perbandingan, sampai dengan periode kedua pemerintahan saat ini, filsafat dianggap ilmu yang tak membumi. Ibarat pesawat yang terbang tanpa

kepastian kapan mendarat. Ia hanya membangun kesadaran lewat pemaknaan akan konsep-konsep esensial. Tapi sejak Rocky Gerung mencairkan filsafat yang beku itu kedalam bahasa yang mudah dicerna, kelas filsafat mulai ramai diminati. Disini tampak bahwa filsafat mencoba menyapa bumi lewat kontribusi praktis pada isu-isu kolektif yang mengoreksi pembodohan dan pemiskinan oleh sistem. Dalam waktu tertentu menyoroti ketidakadilan, kedzoliman dan arogansi kekuasaan. Sejak 1999, kelas ilmu pemerintahan baru (kybernologi) di IIP meningkat dari lingkup yang sempit menjadi universal. Kendatipun IIP menyandang status ilmu pemerintahan, faktanya arus utama di kelas adalah ilmu administrasi dan ilmu politik (Ndraha, 2002). Ilmu pemerintahan yang sesungguhnya justru menempel di Universitas Padjadjaran hingga berakhir sekitar 2016. Pasca itu, kondisi ilmu pemerintahan khas IPDN terlunta-lunta, tak punya rumah, bahkan tak diakui, tidak saja oleh sistem juga oleh induknya sendiri. Praktis, ilmu pemerintahan kita melebur kemana-mana, ke ketiak politik, manajemen, dan pemerintahan umum (perlindungan masyarakat).

Disadari, kesepian ilmu pemerintahan sebagai sains sulit dihindari disebabkan dua hal utama. Pertama, secara saintifik ilmu pemerintahan belum memiliki universalitas di hampir semua perguruan tinggi kecuali bagian dari rumpun ilmu politik dan administrasi. Dua mazhab terakhir yang tumbuh yaitu kybernology (Talizi, 2002) dan Timoho (Sutoro, 2019) kendatipun memiliki basis pemahaman yang mirip namun berkembang eksklusif dengan penganutnya masing-masing. Jamaah kybernolog dan sekte Timoho. Kedua, secara struktural, kybernologi yang relatif lebih tua dan lengkap, kemunculannya tak memiliki kelas sebagai wadah pengajarannya. Disamping kesulitan teknis pemahaman, kemacetan inilah yang mendorong madzhab Timoho lahir dengan ide governabilitas tanpa identitas keilmuan (logos).

7.3 Prospek Ilmu Pemerintahan di Indonesia

Ilmu Pemerintahan mempelajari tentang manajemen atau pengelolaan organisasi publik, diantaranya lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, dan lembaga lainnya yang berfungsi dalam menjalankan fungsi negara, yang diatur dalam undang-undang. Kita akan memahami tugas-tugas administrasi, manajemen, dan organisasi pada badan-badan publik. Kamu juga akan dibekali dengan skill public speaking, negosiasi, dan pengetahuan politik.

Pada pembahasan dibawah ini akan dijelaskan beberapa prospek kerja ilmu pemerintahan di Indonesia sebagai berikut:

a) Berkarir Sebagai Dosen;

Profesi sebagai seorang dosen memang menyenangkan jika ia sudah terangkat sebagai dosen PNS dan bukan lagi dosen tetap non PNS, dosen tidak tetap, bahkan dosen luar biasa. Gaji dan tanggung jawab yang pasti menjadi dua hal yang patut untuk dipertimbangkan. Namun sebelum memutuskan menjadi dosen, lulusan ilmu pemerintahan sebaiknya melanjutkan studi dulu ke jenjang magister. Apabila Anda belum mengetahui universitas yang ada jurusan ilmu pemerintahan di Indonesia, maka Anda wajib mencari tahu. Kami akan membantu Anda dengan sedikit memetakan kampus-kampus di Indonesia yang terakreditasi A pada jurusan ilmu pemerintahannya. Pertama, ada jurusan ilmu politik dan pemerintahan di Universitas Gadjah Mada. Jurusan ini dinaungi oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di jurusan ini, Anda tidak hanya belajar soal pemerintahan, tetapi juga politik sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan dari bahasan pemerintahan tersebut. Kedua, ada jurusan ilmu pemerintahan di Universitas Hasanuddin. Jurusan ini juga masuk dalam Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Namun yang menjadi pembeda dengan UGM, jurusan

pemerintahan dan jurusan politik di Unhas merupakan dua jurusan yang berbeda. Ketiga, ada jurusan ilmu pemerintahan di Universitas Brawijaya.

b) Menjadi Penulis di Platform Spesifik;

Sebagai mahasiswa ilmu pemerintahan yang ditempa untuk berpikir kritis dalam melihat suatu isu, lulusan jurusan ini sangat berpeluang besar menjadi seorang penulis di platform yang spesifik membahas tentang politik dan pemerintahan hari ini. Apalagi di berbagai media sosial, semua orang senang membahas isu-isu terkini yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat sipil. Seorang aktivis mahasiswa yang baru-baru ini lulus di jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan UGM bahkan menuturkan dalam sebuah diskusi bahwa ia kini fokus menjadi seorang penulis. Pekerjaan ini ternyata mampu menunjang biaya sehari-harinya di Yogyakarta. Jadi bagaimana? Anda juga tertarik menekuni pekerjaan ini?

c) Bergabung dalam Lembaga Riset Sebagai Peneliti

Ciri dari mahasiswa jurusan ilmu pemerintahan adalah mereka mampu melihat suatu isu dari banyak perspektif. Negosiasi di kelas hingga menemukan atau bahkan tidak menemukan titik temu dari setiap kelompok sudah menjadi makanan sehari-hari. Nah dengan perspektif tersebut, lulusan ilmu pemerintahan pun bisa bergabung dalam sebuah lembaga riset menjadi peneliti. Sebagai peneliti, isu yang diangkat tidak harus selalu baru dan kontekstual. Tetapi bisa diramu juga isu yang sebelumnya untuk ditarik simpulnya dengan beberapa kejadian saat ini. Pekerjaan tersebut, bagi orang yang senang berpusing-pusing ria menyelidiki dan menganalisis sesuatu akan menjadi sangat menyenangkan. Berani coba?

d) Menjadi Jurnalis

Kemampuan analisis dan komunikasi yang bagus juga bisa mengantarkan seorang lulusan ilmu pemerintahan untuk memilih prospek kerja ilmu pemerintahan sebagai seorang jurnalis. Seorang jurnalis yang memiliki latar belakang pendidikan ini pasti bisa mengolah berita yang dimilikinya dengan bagus dan tajam, tentu saja.

Apalagi beberapa media besar hari ini telah memiliki rubrik tersendiri dalam membahas soal politik dan pemerintahan. Peluang lulusan ilmu politik pun bisa sangat besar dalam hal ini sebagai seorang jurnalis bahkan reporter. Jadi bagaimana, Anda tertarik?

e) Bergabung dalam Partai Politik

Peluang menjadi bagian dari partai politik adalah prospek kerja ilmu pemerintahan yang banyak dipikirkan orang. Sebuah anekdot mengatakan, jika ingin mengubah sesuatu, maka masuklah di dalamnya. Jika selama ini mahasiswa jurusan ilmu pemerintahan diajarkan tentang kondisi pemerintahan di Indonesia hari ini, maka mereka bisa memiliki motivasi yang tinggi untuk masuk dan mengubahnya lewat berbagai kebijakan.

Kebijakan ini, menurut banyak orang, hanya bisa diubah sesuai dengan kepentingan politisnya jika ia masuk di dalam dan membawa perubahan itu sendiri. Lulusan ilmu pemerintahan dan jengah melihat kebijakan pemerintah yang mungkin bagi sebagian orang, tidak horizontal ke masyarakat secara langsung, maka masuk dan bergabung dalam partai politik adalah salah satu upaya yang bisa Anda lakukan.

f) Menjadi Bagian dalam Organisasi Masyarakat

Jurusan ilmu pemerintahan biasanya melahirkan banyak aktivis-aktivis kampus. Mereka adalah orang-orang yang siap membela hak-hak sipil yang direnggut oleh negara. Teknik komunikasi, negosiasi, dan berpikir kritis menjadi bekal yang cukup bagi mahasiswa ilmu pemerintahan yang ingin terjun dan bergabung dalam organisasi masyarakat yang nirlaba ini. Orang yang senang membantu masyarakat dan ingin mengambil bagian untuk memastikan keterpenuhan hak-hak dasar masyarakat, maka Anda bisa mempertimbangkan untuk memilih pekerjaan yang satu ini.

g) Secara Mandiri Menjadi Konsultan Pemerintahan

Secara mandiri, Anda pun bisa menjadi konsultan pemerintahan. Pekerjaan ini akan mempertemukan Anda dengan banyak aktor-aktor politik yang biasanya Anda lihat di televisi. Sekarang mereka akan meminta pendapat Anda tentang kebijakan yang akan mereka ambil. Pemerintahan dalam hal ini bisa difokuskan pada pemerintah daerah. Dimana banyak dari mereka yang kadangkala membutuhkan konsultan sebelum menerapkan kebijakan mereka. Lulusan ilmu pemerintahan ingin melakukan perubahan dari pemerintah dan untuk masyarakat, pekerjaan ini sepertinya bisa Anda pilih.

h) Memilih Menjadi Spesialis Hubungan Masyarakat

Seorang humas atau bagian dari hubungan masyarakat tidak hanya bisa dijabat oleh lulusan ilmu komunikasi. Kini, seiring perkembangan zaman, ilmu pemerintahan pun bisa menjadi Humas di perusahaan atau kantor-kantor pemerintahan. Untuk masalah gaji, Anda bisa mendapatkan jutaan rupiah dengan tunjangan yang disesuaikan dengan kinerja. Sebagai Humas, Anda akan bertugas

mengomunikasikan apa yang diinginkan pemerintah di kantor Anda dengan masyarakat luas. Anda pun menganalisis SWOT terlebih dahulu sebelum menurunkan suatu kebijakan dalam suatu masyarakat tertentu. Intinya, Anda akan lebih peka apa yang diinginkan masyarakat dan apa yang harus Anda lakukan agar pemerintah di tempat Anda bekerja ingin mendengarkan.

i) Menjadi Konsultan Publik Bagi Calon Kepala Daerah

Tidak jauh-jauh dari profesi sebagai Humas, lulusan ilmu pemerintahan pun bisa menjadi ambil bagian sebagai pendamping pribadi sekaligus konsultan publik bagi calon kepala daerah. Sebagai konsultan, Anda akan mengarahkan kepala daerah tersebut untuk bersikap seperti yang diinginkan masyarakat.

j) Menjadi Seorang Pengawas dan Penyelidik Properti Pemerintah

Profesi yang satu ini bisa Anda jalani jika Anda bekerja di kantor yang khusus menyidik pemerintah. Anda akan berkolaborasi dengan banyak elemen jurusan, sehingga Anda tidak akan berjalan sendiri. Semua orang akan membantu Anda. Adapun untuk persoalan gaji, Anda bisa mendapatkan jutaan rupiah.

k) Menjadi Pembicara Di Stasiun Televisi

Pekerjaan ini bisa menjadi pekerjaan sampingan yang Anda tekuni sebagai seorang lulusan ilmu politik. Jika Anda memutuskan tidak melanjutkan studi S2, Anda bisa tetap diundang ke stasiun televisi sebagai pembicara jika Anda memiliki pengetahuan dan pengalaman yang luas soal pemerintahan hari ini.

7.4 Pengembangan Ilmu Pemerintahan

Akhir-akhir ini, dengan pesatnya perkembangan program studi Ilmu Pemerintahan yang dibuka oleh beberapa Perguruan Tinggi Swasta maupun Negeri di wilayah Provinsi Jambi, membawa kesan bahwa kini studi Ilmu Pemerintahan menjadi salah satu kecenderungan atau trend yang diminati oleh masyarakat Jambi. Padahal ini terjadi ditengah carut-marutnya informasi akan tata kelola pemerintahan yang sebagian besar diwarnai oleh upaya pembusukan secara politis. Dibeberapa Perguruan Tinggi yang sempat penulis mengajar didalamnya, rata-rata peminat program studi Ilmu Pemerintahan dengan mempelajari atau menjadi mahasiswa di program studi ini, mempunyai ekspektasi ideal untuk memperbaiki kondisi carut marutnya tata kelola pemerintahan yang sedang berlangsung jika kelak telah menyandang gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan. Di samping itu, yang utama adalah untuk mengetahui bagaimana mengelola pemerintahan dengan baik.

Ilmu Pemerintahan telah lama memang diposisikan kedalam sub Ilmu Politik yang mempelajari kekuasaan. Sebelumnya, Ilmu Pemerintahan muncul pertama kali sebagai bagian dalam ilmu yang mempelajari administrasi perusahaan, dan atau ekonomi perusahaan. Secara khusus pada jaman kolonial Hindia Belanda, diberikan sebagai kursus terhadap pegawai pamong praja yang akan menduduki dinas umum. Dalam perkembangannya, Ilmu Pemerintahan kemudian dikaitkan dengan, administrasi negara dan juga kebijakan publik. Persamaan Ilmu Pemerintahan dari ini semua adalah objek materia atau sasaran kajiannya, yaitu sama-sama mengkaji negara. Sedangkan Pembedanya terletak kepada objek formanya atau kekhususan pembahasannya, Ilmu Pemerintahan khusus membahas mengenai hubungan antara lembaga negara. Kekhususan inilah yang pada awalnya Ilmu

Pemerintahan sempat tidak bisa dibedakan dengan hukum pemerintahan yang membahas hubungan negara dari segi hukum-hukumnya.

Paradigma lama ini menempatkan negara sebagai sesama sasaran kajian Ilmu Pemerintahan sebagai sebuah arena. Ditengahnya panggung kekuasaan dipancangkan, yang dapat disaksikan sebagai berbagai babak drama untuk upaya-upaya memperebutkannya, mendirikan atau bahkan merobohkannya. Rakyat berada ditepi kekuasaan, dibebankan untuk melayani dan mengabdikan kepada kekuasaan, sewaktu-waktu harus siap dikorbankan untuk kekuasaan. Arena tempat kekuasaan dipancangkan itupun, boleh dibuat sesuka hati oleh kekuasaan, entah apakah dibuat sebagai tempat yang becek, kotor, rusak, bersih, rapi, atau terkendali. Tak pelak lagi, kondisi tersebut mengakibatkan adanya guncangan sosial dalam kehidupan bersama. Perang kepentingan berbalut ideologi dalam episode perang dingin dimasa lampau ternyata menumbalkan begitu banyak jiwa rakyat, dan kekuasaan juga tak kunjung puas akan hal itu, justru semakin haus. Ini terbukti setelahnya, ternyata rezim-rezim kekuasaan yang berkuasa pasca perang dingin justru semakin tiran dibalut dengan kepentingan kapitalisme. Secara sosial hal ini mengakibatkan eksistensi kemanusiaan rakyat tercabik-cabik karena kekuasaan, padahal kekuasaan didirikan oleh manusia. Tidak hanya itu, secara *nature* atau alam juga mengalami guncangan. Kekuasaan yang didirikan dengan menghalalkan segala cara, telah merusak ekologi kehidupan bersama tempat kekuasaan dan rakyat hidup. Degradasi sumber daya alam terjadi begitu pesatnya, karena kebijakan yang salah dalam mengelola sumber daya alam. Sumber daya alam dikeruk sedemikian rupa untuk diambil keuntungan atasnya tanpa batas demi menopang kepentingan kekuasaan yang sewenang-wenang. Kerusakan ekologis ini berdampak sistemik kepada kelangsungan hidup

bersama, baik secara moral, sosial, ekonomi, politik maupun budaya.

Berdasarkan hal tersebut, Taliziduhu Ndraha seorang pakar Ilmu Pemerintahan, memperkenalkan paradigma baru dalam mengelola pemerintahan yang dinamakan dengan *Kybernologi*. Sebenarnya *Kybernologi* adalah upaya mengembalikan Ilmu Pemerintahan kepada hakikat asalnya, yaitu bagaimana mengelola pemerintahan sebuah negara dengan tujuan untuk kemashlahatan kehidupan bersama seideal mungkin untuk dipergunakan mencapai tujuan bersama demi kesejahteraan rakyat dengan menggunakan cara-cara yang baik. Dalam *Kybernologi*, paradigma Ilmu Pemerintahan dalam mengelola negara bergeser, dari negara yang dianggap sebagai sebuah arena kepada publik sebagai ruang kebijaksanaan untuk melayani rakyat yang berada di ruang sipil. Ini membentuk persinggungan Ilmu Pemerintahan antara negara sebagai ruang kekuasaan, dengan publik sebagai ruang kebijaksanaan yang merupakan poros pergulatan jaminan pemenuhan kebutuhan eksistensial kemanusiaan antara rakyat diruang sipil dan negara diruang kekuasaan. Untuk itu dibutuhkan tata kelola yang memadai agar jaminan pemenuhan kebutuhan tersebut dapat berlangsung dengan baik dan berkesinambungan. Juga dibutuhkan satu manajemen penanganan konflik yang memadai, agar benturan diruang publik antara kepentingan dan kebutuhan tidak menyebabkan skala konflik yang dapat mengganggu sistem politik bernegara, karena pergulatan yang terjadi diruang publik ini sangat rentan terhadap benturan tersebut. Garis persinggungan ini memunculkan makna bahwa adalah kewajiban dari negara untuk melayani rakyat dalam segi hak-hak sipilnya maupun penyediaan barang publik yang bagus untuk memenuhi kebutuhan kemanusiaan bersama, dan kewenangannya negara untuk mengelola penyediaan barang publik tersebut supaya berkesinambungan dan layak dipergunakan bersama, demi

terciptanya kelangsungan hidup yang sejahtera, adil, aman dan tentram. Kekhususan bahasan Ilmu Pemerintahan pun bergeser, tidak lagi mengkaji hubungan antara lembaga negara, tetapi kepada hubungan antara negara dan masyarakat dalam rangka pemenuhan dan jaminan kebutuhan eksistensial kemanusiaan bersama, yang didasarkan kepada janji atau kontrak politik. Dalam hal ini akhirnya terbentuk domain dalam pengelolaan sebuah pemerintahan negara, yaitu; Negara sebagai subkultur kekuasaan berada diatas sebagai wasit yang akan menengahi subkultur ekonomi sebagai penyedia kebutuhan kemanusiaan dan selalu berupaya meraih keuntungan sebanyak mungkin, dengan subkultur sosial atau rakyat sebagai konsumen produk subkultur ekonomi, juga konsumen sekaligus pendukung kekuasaan melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan dan dukungan legalitas kekuasaan. Konsep ini membentuk gambaran, bahwa negara adalah sebuah kapal yang bermuatan manusia. Pemerintahan dalam hal ini adalah sebagai nahkoda yang akan mengarahkan dan mengantar seluruh isi kapal mencapai tujuan bersama, dengan selamat tak kurang suatu apapun. Selama perjalanan kapal tersebut mencapai tujuan, segala kebutuhan penumpang kapal, baik itu rakyat maupun *crew* kapal yang berupa nahkoda dan lainnya, terpenuhi dengan baik, cukup, aman dan nyaman. Juga terdapat jaminan keselamatan jika terjadi sesuatu didalam kapal, apakah sakit, luka, dan lain sebagainya, atau bahkan jika kapal menemui kendala ditengah lautan, pelampung telah disiapkan dengan standar baku keselamatan yang memadai mengutamakan keselamatan penumpang terlebih dahulu daripada *Crew*. Jadi, untuk mengemudikan kapal yang bernama negara ini, tidak hanya dibutuhkan kekuasaan seorang nahkoda pemerintahan yang akan memandu jalannya kapal, tetapi juga manajemen pengelolaan kapal yang baik. Jika ditilik dari segi kewenangan dan kewajiban negara, konsep ini juga dapat mengandaikan negara

sebagai suatu perusahaan yang besar. Perusahaan yang bernama negara ini yang disebut sebagai *corporate state*, memproduksi barang berupa barang-barang publik yang dipergunakan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak atau kebutuhan bersama, sekaligus memproduksi layanan jasa untuk memenuhi kebutuhan pelayanan akan hak-hak sipil rakyat. Negara didalam, memastikan agar produksinya dapat berjalan terus menerus berkesinambungan dengan kualitas yang semakin baik agar konsumen dalam hal ini adalah rakyat terpuaskan. Untuk itu dibutuhkan manajemen tata kelola perusahaan yang baik dan memadai agar produksi dapat berkesinambungan sekaligus memberdayakan konsumen, karena rakyat dalam posisi konsumen berperan dalam memberikan umpan balik bagi *corporate state* dan manajemennya, juga konstituen yang diperlukan agar mekanisme didalam *corporate state* tersebut berjalan dengan baik juga demi menghasilkan produksi yang berkualitas. Dari sini terlihat bahwa Ilmu Pemerintahan memiliki ruang perspektif yang multidimensi dalam memandang pengelolaan sebuah negara, tidak hanya dalam satu sudut pandang saja. Ini dikarenakan pergeseran paradigma tersebut membuat peminat dan pelaku yang dibekali Ilmu Pemerintahan dalam pengelolaan sebuah negara, diperlukan kebijaksanaannya dalam memandang gejala fenomena pemerintahan yang terjadi dan berlangsung, untuk memecahkan dan mencari solusi bersama kehidupan berbangsa dan bernegara dalam titik tolak aspek eksistensi kemanusiaan yang diusung. Sama sekali bukan mencari atau membuktikan benar dan salah secara hitam dan putih.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwi Wahyudi, *Hukum Tata Negara Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- A. Hamid S. Attamimi dalam Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2003.
- A.Mallarangeng, dkk, *Otonomi Daerah Prospektif, Teoritis dan Praktis*, BIGRAF, Publishing, Yogyakarta, 2001.
- Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, Yogyakarta: FH-UII Press, 2004.
- Bayu Surya Ningrat, *Mengenal Ilmu Pemerintahan*, Jakarta : Rineka Cipta, 1992.
- Chainur Anasjid. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. 2000.
- Darda Syahrizal, *Hukum Administrasi Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2012.
- Dominikus Rato, *Pengantar Hukum Adat*, cetakan pertama, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2009.
- Diana Halim Koentjoro, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004.
- Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Translated by Anders Wedberg, Harvard University Printing Office Cambridge, Massachusetts, USA, 2009.
- Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Grasindo, Jakarta, 2007.
- Iman Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, cetakan keempat, Liberty, Yogyakarta, 2010.
- Inu Kencana Syafi'ie, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.

- Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- _____, Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Sekjen dan Kepaniteraan MK RI. Jakarta. 2006.
- _____, *Perihal Undang-Undang di Indonesia*, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan : Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, 2010.
- Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtsstaat)*, Refika ditama, Bandung 2009.
- Muhadam Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan*, Kelapa Gading Permai, Jakarta, 2007.
- Maskun, Sumitro, *Otonomi Daerah Peluang dan Tantangan*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2001.
- Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2000.
- Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan*, Kanisius, Yogyakarta. 1998. Musanef,
- Sistem Pemerintahan di Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta, 1982. Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2008.
- Siti Nurbaya, *Kompleksitas Administrasi Pemerintahan Dengan Pendekatan Kebijakan Regional*, Dewan Perwakilan Daerah, Jakarta, 2011.
- Sujianto, *Implementasi Kebijakan Publik*, Pekanbaru : Alaf Riau, 2008. Sf Marbun, Moh. Manfud, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2006.

- Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Alumni, Cetakan Kedua Edisi I, Bandung, 2006.
- Sondang P. Siagian, *Filsafat Administrasi*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2003. S.M.Amien, *Fungsi Pengawasan Pada Pekerjaan Pemerintah*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Taliziduhu Ndraha, *Kybernologi Sebuah Metamorphosis*, Sirao Credentia Center, Tangerang, 2008.
- Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*. Prestasi Pustaka, Jakarta. 2006.
- , *Kybernologi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- , *Kybernologi I (Ilmu Pemerintahan Baru)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003. Tjahya Supriatna, *Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah*, Bumi Aksara, Jakarta, 1993.
- Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993.
- Y. Sri Pudyatmiko, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2009.
- Zainal Abidin, *Analisis Eksistensial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2007.
- Siti Nurbaya, *Kompleksitas Administrasi Pemerintahan Dengan Pendekatan Kebijakan Regional*, Dewan Perwakilan Daerah, Jakarta, 2011.
- Undang- Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

https://search.yahoo.com/search;_ylt=Awr9zVgFc5NjblkKcH1XNyoA;_ylu=Y29sbwNncTEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3BhZ2luYXRpb24-?p=perspektif+ilmu+pemerintahan+kedepan+yang+harus+dibangun&type=E211US773G0&fr=mcafee&b=8&pz=7&bct=0&xargs=0

BIODATA PENULIS



Dr. Neng Suryanti Nengsih, S.Sos., M.Si.

Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan
Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji
Tanjungpinang

Penulis lahir di Tembilahan, Inderagiri Hilir pada tanggal 12 Desember 1972. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIPOL) Raja Haji Tanjungpinang. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau Pekanbaru, melanjutkan S2 pada Universitas Padjadjaran Bandung dengan mengambil konsentrasi bidang kajian utama (BKU) Ilmu Pemerintahan, dan kembali melanjutkan pada program pendidikan Doktorat (S3) pada Bidang Kajian Utama Ilmu Pemerintahan Universitas Padjadjaran Bandung. Penulis mengawali karir sebagai dosen tetap pada Sekolah Tinggi Ilmu sosial dan Ilmu Politik Raja Haji dimulai pada tahun 1999 sampai sekarang.

BIODATA PENULIS



Dr. Bambang Irawan, M.Si, M.M

Dosen tetap pada Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi, Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

Dr. Bambang Irawan, M.Si, M.M lahir di Sungai Liput, tanggal 30 Mei 1979. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi, Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI. Menyelesaikan pendidikan S1 dan S2 pada Program Studi Administrasi Publik Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, dan Program Studi Doktor Ilmu Administrasi Publik pada Universitas Brawijaya.

BIODATA PENULIS



Ahmad Mustanir, S.I.P., M.Si

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)
Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

Lahir di Rappang (Kab. Sidenreng Rappang, SulSel) 06 Januari 1974. Menempuh dan menyelesaikan pendidikan TK Aisiyyah Palu Tahun 1980, SD Negeri 6 Rappang dan SD Negeri 3 Palu Tahun 1986, SMP Negeri 3 Toli-Toli Tahun 1989, SMA Negeri 1 Toli-Toli dan SMA Negeri 8 Makassar Tahun 1992, S1 Fisip UNHAS Tahun 1997 Prodi Ilmu Politik. S2 UNHAS Tahun 2003 Prodi Administrasi Pembangunan. Sekarang sedang menyelesaikan Disertasi S3 di Prodi Administrasi Publik UNM Makassar.

Pengalaman kerja – Pernah menjadi Dosen Luar Biasa di beberapa perguruan tinggi seperti Universitas Tadulako, Universitas Muhammadiyah Palu dan STIE Panca Bhakti Palu. Sekarang Dosen Tetap di Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang. Sebelumnya juga pernah bekerja di Konsultan baik sebagai Team Leader maupun Tenaga Ahli dalam berbagai proyek APBN dan Bank Dunia.

Pengalaman penelitian – Dalam beberapa tahun terakhir memperoleh Hibah Penelitian antara lain dari Kemendikbud Ristek/Kemenristekdikti, PP Muhammadiyah juga internal

Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang. Selain itu secara aktif melakukan riset secara mandiri dan bantuan Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang. Dari hasil penelitian ini telah melahirkan banyak tulisan dalam bentuk Article Jurnal dan Prosiding baik Nasional maupun Internasional bereputasi, lebih dari 35 Buku Ajar/Referensi/Monograph/Chapter serta memiliki lebih dari 70-an Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Hak Cipta. Di bidang Abdimas juga beberapa kali memperoleh Hibah dari Kemendikbud Ristek/Kemenristekdikti, Majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah dan Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang.

Pengalaman Pemberdayaan Masyarakat – Dalam berbagai proyek APBN dan Bank Dunia, Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM), Hibah PKM & PKMS Kemendikbud Ristek/ Kemenristek dikti dan Hibah internal Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang.

Penulis juga adalah seorang Researcher, Trainer, Reviewer Journal Scopus Q1, Reviewer beberapa Jurnal Internasional dan Nasional lainnya, Editorial Board & Editor in Chief di beberapa jurnal internasional & nasional. Penulis juga tercatat sebagai ilmunan dan masuk dalam Rangkingscientists Top 5000 Di Indonesia Versi Ad Scientific Index 2023 Version 1 tepatnya urutan 134. Saat ini menempati peringkat 630 SINTA 3 years dari 255.279 dosen/peneliti tingkat Nasional H-Index 33, i10-Index 59.

Saat ini penulis juga aktif sebagai pengurus dan anggota pada beberapa organisasi profesi seperti Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) Cabang Sidrap, Himpunan Indonesia. Untuk Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial (HIPIIS) Komisariat Daerah (Komda) Kabupaten Sidrap, Asosiasi Dosen Ilmu Pemerintahan Seluruh Indonesia (ADIPSI) dan Kesatuan Program Studi Ilmu Pemerintahan Indonesia (KAPSIPI) serta Pengurus Ikatan

Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Orda Sidrap 2022-2027.

Selain menjadi Dosen tetap pada Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang juga pernah menjabat sebagai Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan sejak tahun 2016-2019, dan sekarang sebagai Kepala LP3M Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang 2019-2023.

BIODATA PENULIS



Yulius Luturmas, S.AP.,M.Si

Dosen Tetap Pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara,
Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Lelemuku Saumlaki
(UNLESA)

Penulis lahir di Ambon pada tanggal 11 Oktober 1988. Menyelesaikan pendidikan sarjana pada Program Studi Ilmu Administras Negara di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Saumlaki (STIAS) pada tahun 2013, dan menyelesaikan pendidikan Magister di Universitas 45 Makassar 2015.

Membagikan Ilmu pengetahuan kepada orang lain merupakan kehormatan besar bagi penulis untuk mengabdikan diri sepenuhnya bagi negara Indonesia, itulah komitmen penulis.

BIODATA PENULIS



Nur Rohim Yunus

Dosen Bidang Hukum Tata Negara

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatulla Jakarta

Nur Rohim Yunus adalah santri alumni Pondok Modern Darussalam Gontor (1999) & ISID (2002). Meraih gelar Master of Law (LL.M) dari International Islamic University (IIU) Islamabad Pakistan dan Program Doktor (Ph.D) di GUU (Gosudarstvennyy Universitet Upravleniya) Moscow Russia (2022).

Saat ini menjabat sebagai Direktur Eksekutif Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKOLEGNAS) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selain aktif juga dalam kegiatan organisasi seperti Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Russia sebagai dewan pakar, anggota APHAMK Jakarta, anggota Asosiasi Pengajar HTN-HAN Jakarta, anggota ADI (asosiasi Dosen Indonesia), anggota HISSI (Himpunan Ilmuwan dan Sarjana Syariah Indonesia), pembimbing MCC (Moot Court Community) UIN Jakarta.

BIODATA PENULIS



Kristhiana Anthonia Laratmase, SH.,M.Si

Dosen Tetap pada Prodi Ilmu Administrasi Niaga
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lelemuku Saumlaki

Penulis lahir di Dobo, 29 september 1990, Penulis adalah Dosen tetap pada Program Studi Ilmu Administrasi Niaga, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Lelemuku Saumlaki. Menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas 17 Agustus Surabaya, pendidikan S2 di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (APMD) Yogyakarta. Pernah menjabat sebagai Ketua Program Studi Ilmu administrasi Niaga pada tahun 2019-2020, dan masih aktif menjabat sebagai Dosen tetap pada Universitas Lelemuku Saumlaki.

BIODATA PENULIS



Dr. H. Iwan Henri Kusnadi, S.Sos, M.Si

Dosen di Universitas Subang Provinsi Jawa Barat

Dr. H. Iwan Henri Kusnadi, S.Sos, M.Si lahir di Subang pada tanggal 15 November 1970 adalah anak keempat dari lima putera-puteri Bapak Basyrul Haqi (Alm) dan Ibu Hj. Oon Oniatini (Almh). Istri Hj. Eti Indahwati; dua putera : Muhammad Rifqi Baihaqi dan Muhammad Satria Bari' Baihaqi. Menyelesaikan pendidikan di SDN Kramat Karya Cinangsi tahun 1984, SMP Negeri Cibogo Subang pada tahun 1987, SMA Negeri 1 Subang pada tahun 1986. Tahun 1990, melanjutkan studi Strata Satu (S1) di STIA Kutawaringin Subang pada tahun 1996, Studi Strata Dua (S2) di STIA Mandala Indonesia Jakarta pada tahun 2006 dan melanjutkan Studi Strata Tiga (S3) di FISIP Universitas Padjadjaran lulus tahun 2016. Beberapa buku yang penulis telah hasilkan, di antaranya Ilmu Administrasi Publik, Manajemen Sumber Daya Manusia, Manajemen Strategi, Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia, Ekonomi Kreatif, dan lain-lain. Selain itu, penulis juga aktif melakukan penelitian yang diterbitkan di berbagai jurnal nasional maupun internasional. Penulis juga aktif menjadi pemakalah diberbagai kegiatan dan menjadi narasumber pada Workshop/Seminar/ Lokakarya tertentu. Mengajar di Universitas Subang Provinsi Jawa Barat sejak tahun 1997 untuk bidang kajian Administrasi

Publik, Pemerintahan daerah, Manajemen Strategi, dan Etika Administrasi Publik. Menyukai menulis dan meneliti pada bidang Kebijakan Publik. Alhamdulillah berkat keinginan untuk terus berkarya dalam meneliti dan menulis telah memiliki ID Sinta:6738215, ID Scopus:57218824020, ID Orcid: 0000-0001-7556-8029, ID Scholar: kbzYXCAAAA AJ, ID Publions: 4340221, dan ID Garuda: 1387752, Pangkat/Gol. Ruang: Lektor, Penata IIIc / Dosen PNS-LLDIKTI Wilayah IV Jawa Barat-Banten/NIP.197011152002121004. Riwayat Pekerjaan : Pembantu Ketua III STIA Kutawaringin pada tahun 2003-2007, Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara FIA Unsub pada tahun 2007-2011. Wakil Dekan I Fakultas ilmu Administrasi Unsub pada tahun 2011-2015; dan Deakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang pada tahun 2015-2021. Penghargaan yang diperoleh : Kepala BP7 Pusat dalam Penataran P4 Pola 144 Jam Tingkat Nasional di Cibubur Jakarta Tahun 1996; Menteri Pemuda dan Olah Raga dalam Penataran Kepemimpinan Pemuda Tingkat Nasional di Jakarta Tahun 1997; Menteri Pertahanan Negara dan Pemuda dan Olah raga dalam Pendidikan Bela Negara Tingkat Nasional di Cijantung Jakarta Tahun 1997; Kepala Kepolisian Republik Indonesia dalam Penataran Kamtibmas Tingkat Nasional di Kalapa Dua Jakarta Tahun 1998; Kodam III Siliwangi/ Aster III Kodam III Siliwangi sebagai Guru Militer Dodik Bela Negara Cikole Bandung; Presiden Soeharto sebagai Juara Kehormatan Lomba Dakhwah Pembangunan Tingkat Nasional di Majelis Dakhwah Indonesia Jakarta; n BP-7 Pusat dalam Lomba Diskusi Pemasarakatan dan Pembudayaan P-4 Tingkat Nasional di Jakarta Tahun 1997; Gubernur Jawa Barat sebagai Juara I antar Mahasiswa Perguruan Tinggi Se-Jawa Barat dalam Lomba Diskusi P2P4 Tingkat Provinsi Jawa Barat; Gubernur Jawa Barat sebagai Juara I dalam Lomba Pidato Dakhwah Pembangunan Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 1996.; Gubernur Jawa Barat sebagai Pemuda Pelopor I Bidang Industri Pedesaan Tahun 1996.;

Bupati Subang sebagai Juara I dalam Lomba Diskusi P-4 antar Perguruan Tinggi Tahun 1996; Bupati Subang sebagai Juara I Lomba Dakwah Pembangunan Tahun 1996; Penghargaan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia.dst. Organisasi : Pengurus IAPA Jawa Barat 2022-2024 dan Pengurus ICMI Kabupaten Subang, Pengurus IPHI Kabupaten Subang, Pengurus Yayasan Mulia Bhakti Al Mustofa Subang.

Email: iwanhenri01@gmail.com